

Katalog: 4102004.3174

# INDIKATOR



## KESEJAHTERAAN RAKYAT KOTA JAKARTA BARAT 2022



BADAN PUSAT STATISTIK  
KOTA ADM. JAKARTA BARAT

*BPS - Statistics of West Jakarta Municipality*



Katalog: 4102004.3174

# INDIKATOR



## KESEJAHTERAAN RAKYAT KOTA JAKARTA BARAT 2022



BADAN PUSAT STATISTIK  
KOTA ADM. JAKARTA BARAT

*BPS - Statistics of West Jakarta Municipality*



## **INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT 2022**

ISSN	: -
No Publikasi	: 31740.2305
Katalog	: 4102004.3174
Ukuran Buku	: 29,5 cm x 21,5 cm
Jumlah Halaman	: xii + 127 halaman
Naskah	: Badan Pusat Statistik Kota Administrasi Jakarta Barat
Penyunting	: Badan Pusat Statistik Kota Administrasi Jakarta Barat
Desain Kover	: Badan Pusat Statistik Kota Administrasi Jakarta Barat
Diterbitkan Oleh	: © Badan Pusat Statistik Kota Administrasi Jakarta Barat
Sumber Ilustrasi	: <a href="http://www.canva.com">www.canva.com</a>
Pencetak	: -

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Kota Administrasi Jakarta Barat



## **TIM PENYUSUN**

Pengarah:

Pudji Pangastuti, S.ST, M.A.P

Penanggung Jawab Teknis:

Resiwati Fajrina Mustiqa Zain, S.ST, M.Stat

Penyunting:

Resiwati Fajrina Mustiqa Zain, S.ST, M.Stat

Penulis:

Wanda Pribadi, S.ST

Diah Asrianda Puspa Negara, S.Tr.Stat

Marlyne Brillianty Prabandari, S.ST

Tata letak dan Infografis:

Wanda Pribadi, S.ST

Diah Asrianda Puspa Negara, S.Tr.Stat

Gambar Kulit:

Diah Asrianda Puspa Negara, S.Tr.Stat



## KATA PENGANTAR



Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Administrasi Jakarta Barat 2022 merupakan publikasi tahunan yang disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Administrasi Jakarta Barat. Publikasi ini menyajikan data dan analisis deskriptif ringkas mengenai gambaran umum kesejahteraan rakyat di Kota Administrasi Jakarta Barat.

Cakupan pembahasan, meliputi aspek kependudukan, pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, perumahan dan teknologi informasi, pendapatan dan pengeluaran rumah tangga, serta kemiskinan dan kriminalitas.

Pada tahun 2021 ini, pandemi COVID-19 masih berlanjut dan berpengaruh terhadap perkembangan indikator kesejahteraan rakyat. Hal ini dapat menjadi bahan evaluasi dan perencanaan khususnya bagi pemerintah dalam upayanya membangkitkan perekonomian, keadaan sosial dan pembangunan berkelanjutan di tengah pandemi.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga publikasi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Semoga publikasi ini dapat bermanfaat. Kritik dan saran dari semua pihak kami harapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Jakarta, 28 Februari 2023

**BADAN PUSAT STATISTIK  
KOTA ADMINISTRASI  
JAKARTA BARAT**  
Kepala,

**PUDJI PANGASTUTI, S.ST, M.A.P**



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR</b>	v
<b>DAFTAR ISI</b>	vii
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	ix
<b>DAFTAR TABEL</b>	xi
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	1
1.1 Latar Belakang dan Ruang Lingkup	3
1.2 Tujuan Penulisan	4
1.3 Jenis dan Sumber Data	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
<b>BAB II. KEPENDUDUKAN</b>	7
2.1 Jumlah dan Komposisi Penduduk	12
2.2 Status dan Usia Perkawinan	17
2.3 Pemakaian Alat/Cara Keluarga Berencana	20
2.4 Kepemilikan Akta Kelahiran	21
<b>BAB III. PENDIDIKAN</b>	27
3.1 Buta Huruf	31
3.2 Partisipasi Sekolah	34
3.3 Partisipasi Murni	37
3.4 Tingkat Pendidikan	38
3.5 Rata-rata Lama Sekolah	39
3.6 Harapan Lama sekolah	40
<b>BAB IV. KETENAGAKERJAAN</b>	45
4.1 Konsep dan Definisi Ketenagakerjaan	50
4.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	51
4.3 Tingkat Kesempatan Kerja	52
4.4 Penduduk Bekerja	53
4.5 Pengangguran	59
<b>BAB V. KESEHATAN</b>	63
5.1 Derajat dan Status Kesehatan Penduduk	68
5.2 Tingkat Imunitas dan Gizi Balita	71
5.3 Pemanfaatan Fasilitas Tenaga Kesehatan	73
<b>BAB VI. PERUMAHAN DAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI</b>	75
6.1 Luas Lantai	79
6.2 Jenis Atap Rumah	80
6.3 Fasilitas Rumah	82
6.4 Teknologi Komunikasi dan Informasi	85
<b>BAB VII. PENDAPATAN DAN PENGELUARAN RUMAH TANGGA</b>	93
7.1 Distribusi Pendapatan, Gini Rasio, dan Kriteria Bank Dunia	98

7.2 Pengeluaran per Kapita menurut Jenis Pengeluaran	100
<b>BAB VIII. KEMISKINAN DAN INDIKATOR LAINNYA</b>	109
8.1 Kemiskinan	113
8.2 Kriminalitas	117
<b>BAB IX. PENUTUP</b>	119

<https://jakbarkota.bps.go.id>

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.1 Jumlah Penduduk Kota Administrasi Jakarta Barat Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan Tahun 2022 (jiwa)	12
2.2 Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Barat, 2021 (jiwa/km <sup>2</sup> )	13
2.3 Piramida Penduduk Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2022 (ribu jiwa)	15
2.4 Rasio Jenis Kelamin Menurut Kelompok Usia di Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2022 (persen)	17
2.5 Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas Menurut Status Perkawinan di Kota Administrasi Jakarta Barat, 2022 (persen)	18
2.6 Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas Menurut Status Perkawinan dan Jenis Kelamin di Kota Administrasi Jakarta Barat, 2022 (persen)	19
2.7 Persentase Penduduk Perempuan Pernah Kawin Menurut Usia Perkawinan Pertama di Kota Administrasi Jakarta Barat, 2022 (persen)	20
2.8 Persentase Penduduk Berumur 15-49 tahun yang Pernah Kawin dan Alat KB atau Cara Tradisional yang Sedang Digunakan di Kota Administrasi Jakarta Barat, 2022 (persen)	17
2.9 Persentase Penduduk Berumur 0-17 tahun yang Memiliki Akta Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat, 2022 (persen)	22
3.1 Angka Buta Huruf Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta, 2021-2022 (persen)	33
3.2 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia Sekolah Menurut Jenis Kelamin di Kota Jakarta Barat, 2021-2022 (persen)	35
3.3 Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenis Kelamin di Kota Jakarta Barat, 2021-2022 (persen)	37
3.4 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Kota Jakarta Barat Tahun 2022 (persen)	38
3.5 Rata-rata Lama Sekolah di Provinsi DKI Jakarta dan Kota Jakarta Barat Tahun 2018 dan 2022 (tahun)	39
3.6 Harapan Lama Sekolah di Kota Jakarta Barat, 2020-2022 (tahun)	40
4.1 Diagram Ketenagakerjaan	50
4.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin di Jakarta Barat, Agustus 2021 – Agustus 2022 (persen)	52
4.3 Tingkat Kesempatan Kerja Menurut Jenis Kelamin di Jakarta Barat, Agustus 2020 – Agustus 2022 (persen)	52
4.4 Persentase Penduduk Bekerja terhadap Total Pekerja Menurut Jenis Kelamin di Jakarta Barat, Agustus 2020 – Agustus 2022 (persen)	53
4.5 Persentase Penduduk Bekerja terhadap Total Pekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Kota Jakarta Barat, Agustus 2022 (persen)	55
4.6 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Jakarta Barat, Agustus 2022 (persen)	56
4.7 Persentase Pekerja Formal dan Informal di Jakarta Barat, Agustus 2021 – Agustus 2022	57

4.8	Persentase Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan di Jakarta Barat, Agustus 2021 – Agustus 2022 (persen)	58
4.9	Tingkat Pengangguran Terbuka di Jakarta Barat, Agustus 2020 – Agustus 2022 (persen)	59
5.1	Angka Harapan Hidup Saat Lahir Kota Adm. Jakarta Barat dan Provinsi DKI Jakarta, 2013-2022	68
5.2	Angka Morbiditas Penduduk Kota Jakarta Barat dan Provinsi DKI Jakarta, 2022 (persen)	70
5.3	Penduduk yang Berobat Jalan Menggunakan Jaminan Kesehatan Kota Jakarta Barat dan Provinsi DKI Jakarta, 2022 (persen)	71
5.4	Persentase Balita Usia 1-4 tahun yang Mendapat Imunisasi Lengkap di Kota Jakarta Barat dan Provinsi DKI Jakarta, 2022	73
6.1	Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai Bangunan Kota Jakarta Barat dan Provinsi DKI Jakarta, 2022 (persen)	80
6.2	Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Atap Bangunan di Kota Jakarta Barat dan Provinsi DKI Jakarta, 2022 (persen)	81
6.3	Perkembangan Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Air Minum di Kota Jakarta Barat dan Provinsi DKI Jakarta, 2020-2022 (persen)	82
6.4	Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Bahan Bakar Utama untuk Memasak di Kota Jakarta Barat, 2021-2022 (persen)	84
6.5	Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Memiliki Telepon Seluler di Kota Jakarta Barat dan Provinsi DKI Jakarta, 2020-2022 (persen)	86
7.1	Gini Rasio di DKI Jakarta dan Nasional, 2018-2022	99
7.2	Skema Pengeluaran Rumah Tangga	101
7.3	Persentase Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan untuk Konsumsi Makanan dan Bukan Makanan Menurut Kelompok Pengeluaran di Kota Jakarta Barat, 2022 (persen)	101
7.4	Distribusi Pengeluaran Rata-rata Perkapita Sebulan untuk Konsumsi Makanan Menurut Kelompok Pengeluaran di Kota Jakarta Barat, 2022 (persen)	103
7.5	Distribusi Persentase Pengeluaran Rata-rata perkapita Sebulan untuk Konsumsi Non Makanan Menurut Jenis Komoditas Kota Jakarta Barat, 2022 (persen)	104
8.1	Tren Kemiskinan di Kota Jakarta Barat, 2018-2022	115
8.2	Perkembangan Garis Kemiskinan di Kota Jakarta Barat (Rupiah/kapita/bulan), 2018-2022	116
8.3	Persentase Penduduk yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan di Kota Jakarta Barat dan Provinsi DKI Jakarta, 2022 (persen)	118

## DAFTAR TABEL

	Halaman
2.1 Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Usia Muda, Produktif, dan Usia Tua di Kota Administrasi Jakarta Barat, 2022	23
2.2 Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kota Administrasi Jakarta Barat, 2018-2022	23
2.3 Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Barat, 2022	23
2.4 Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Administrasi Jakarta Barat, 2022 (persen)	24
2.5 Rasio Jenis Kelamin Menurut Kelompok Umur di Kota Administrasi Jakarta Barat, 2022	24
2.6 Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Angka Ketergantungan di Kota Administrasi Jakarta Barat, 2022	25
2.7 Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas Menurut Status Perkawinan dan Jenis Kelamin di Kota Jakarta Barat tahun 2022 (persen)	25
2.8 Persentase Penduduk Perempuan Pernah Kawin Berumur 10 Tahun ke Atas Menurut Usia Perkawinan Pertama di Kota Administrasi Jakarta Barat, 2022 (persen)	26
2.9 Persentase Penduduk Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin dan Alat KB atau Cara Tradisional yang Sedang Digunakan, 2022	26
2.10 Persentase Penduduk Berumur 0-17 Tahun yang Memiliki Akta Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil Kota Jakarta Barat, 2022	26
3.1 Tingkat Buta Huruf Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota Administrasi di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 dan 2022 (persen)	41
3.2 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Usia Sekolah dan Jenis Kelamin di Kota Jakarta Barat, 2021-2022 (persen)	41
3.3 Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kota Jakarta Barat, 2021-2022 (persen)	42
3.4 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Kota Jakarta Barat dan Provinsi DKI Jakarta, 2021-2022 (persen)	42
3.5 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kota Jakarta Barat dan Provinsi DKI Jakarta, 2018-2022 (tahun)	43
3.6 Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Jakarta Barat dan Provinsi DKI Jakarta, 2018-2022 (tahun)	43
4.1 Keadaan Ketenagakerjaan Jakarta Barat, Agustus 2020 – Agustus 2022	60
4.2 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Kota Jakarta Barat, Agustus 2022 (persen)	61
4.3 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kota Jakarta Barat, Agustus 2022 (persen)	61
4.4 Persentase Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan di Kota Jakarta Barat, Agustus 2021 – Agustus 2022 (persen)	62
4.5 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Jakarta Barat, Agustus 2020 – Agustus 2022 (persen)	62

5.1	Persentase Pemberian Imunisasi Dasar pada Balita Menurut Jenis Imunisasi dan Jenis Kelamin di Kota Jakarta Barat, 2022 (persen)	75
5.2	Persentase Perempuan Usia 15-49 Tahun Menurut Tempat Melahirkan Anak yang Terakhir di Kota Jakarta Barat, 2022 (persen)	75
6.1	Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai Bangunan Kota Jakarta Barat dan Provinsi DKI Jakarta, 2020-2022 (persen)	88
6.2	Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Atap Terluas di Kota Jakarta Barat dan Provinsi DKI Jakarta, 2020-2022 (persen)	88
6.3	Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan Utama di Kota Jakarta Barat dan Provinsi DKI Jakarta, 2022 (persen)	88
6.4	Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum di Kota Jakarta Barat dan Provinsi DKI Jakarta, 2020-2022 (persen)	89
6.5	Persentase Rumah Tangga Menurut Jarak Sumber Air Mandi/Cuci yang Menggunakan Pompa/Sumur ke Penampungan Kotoran di Kota Jakarta Barat dan Provinsi DKI Jakarta, 2020-2022 (persen)	89
6.6	Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Bahan Bakar/Energi untuk Memasak di Kota Jakarta Barat dan Provinsi DKI Jakarta, 2020-2022 (persen)	90
6.7	Persentase Rumah Tangga Menurut Pembuangan Akhir Kotoran/Tinja di Kota Jakarta Barat dan Provinsi DKI Jakarta, 2020-2022	90
6.8	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Telepon Rumah dan Komputer/Laptop di Kota Jakarta Barat dan Provinsi DKI Jakarta, 2020-2022 (persen)	91
6.9	Persentase Penduduk 5 Tahun ke Atas yang pernah Mengakses Internet dalam 3 Bulan Terakhir di Kota Jakarta Barat dan Provinsi DKI Jakarta, 2020-2022 (persen)	91
7.1	Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan untuk Konsumsi Makanan dan Bukan Makanan Menurut Kelompok Pengeluaran di Kota Jakarta Barat, 2022 (Rp/Kapita/Bulan)	105
7.2	Distribusi Pendapatan dan Gini Rasio DKI Jakarta, Tahun 1990, 2000-2022	105
7.3	Rata-rata Pengeluaran Makanan Perkapita Sebulan Menurut Jenis Pengeluaran Sebulan di Kota Jakarta Barat Tahun 2022	107
7.4	Rata-rata Pengeluaran Non Makanan Perkapita Sebulan Menurut Jenis Pengeluaran Sebulan di Kota Jakarta Barat Tahun 2022	108

# OUT

1 **Pendahuluan**

2 **Kependudukan**

3 **Ketenagakerjaan**

4 **Pendidikan**  
5 **Kesehatan**

6 **Perumahan & Teknologi Informasi**

7 **Pendapatan & Pengeluaran**

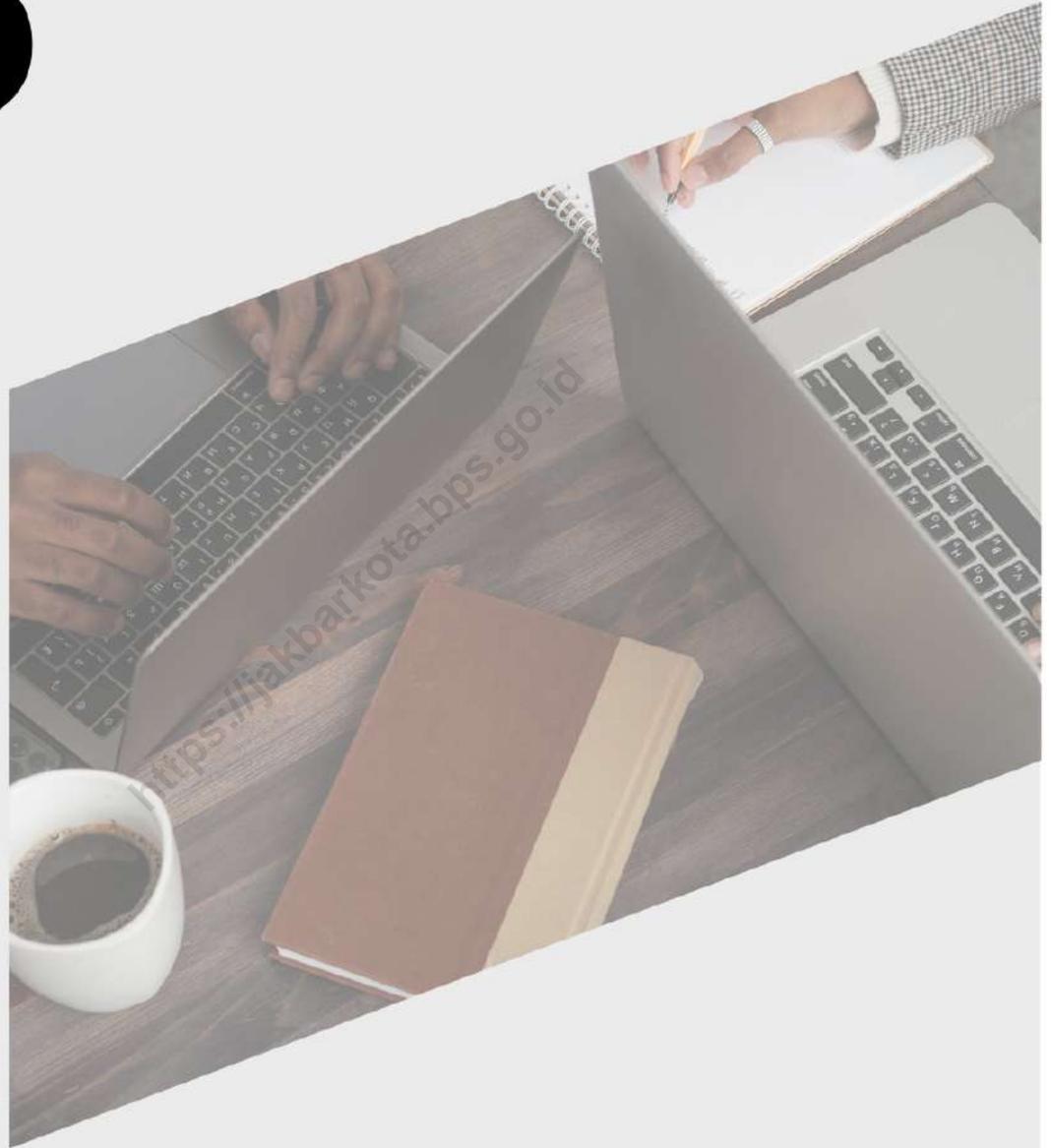
8 **Kemiskinan**

9 **Penutup**

LI  
NE



# BAB



## Pendahuluan

---







### **1.1. Latar Belakang dan Ruang Lingkup**

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui berbagai program pembangunan yang berkelanjutan terus berupaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Berbagai kebijakan pembangunan diarahkan untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi masyarakat. Hal ini sejalan dengan visinya yang dituangkan dalam “Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaan, keadilan dan kesejahteraan bagi semua”.

Sebagai ibu kota negara, Kota Jakarta seringkali menjadi cermin kemajuan pembangunan negara Indonesia menjadi referensi bagi pembangunan di wilayah lain. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap berbagai kinerja pembangunan, agar kebijakan yang akan diambil pada masa mendatang dapat mencapai sasaran dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum sekaligus menjadi contoh bagi pembangunan di wilayah lain.

Evaluasi terhadap hasil pembangunan salah satunya dapat dilakukan dengan melihat perkembangan indikator kesejahteraan rakyat, sebagai sasaran dari berbagai program pembangunan. Apabila indikator yang ada menunjukkan kesejahteraan rakyat meningkat, maka dapat diasumsikan bahwa kinerja pembangunan relatif sudah mencapai sasaran yang dituju, demikian pula sebaliknya. Indikator kesejahteraan rakyat yang dimaksud antara lain dapat dilihat dari tingkat pendidikan masyarakat secara umum, tingkat kesehatan, tingkat pendapatan masyarakat, tingkat pengangguran, kondisi perumahan, dan sebagainya.

Kesejahteraan rakyat memiliki dimensi yang sangat luas, sementara data yang tersedia masih terbatas, sehingga tidak semua aspek yang mendukung kesejahteraan rakyat dibahas dalam publikasi ini. Aspek-aspek kesejahteraan yang akan diulas adalah aspek kependudukan, pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, pendapatan, perumahan dan aspek lainnya.

## **1.2. Tujuan Penulisan**

Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Adm. Jakarta Barat tahun 2022 ini bertujuan untuk :

1. Memberikan gambaran tentang perkembangan kesejahteraan rakyat dan kesejahteraan sosial, sebagai dampak pembangunan yang telah dilakukan.
2. Menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk perencanaan pembangunan selanjutnya.

## **1.3. Jenis dan Sumber Data**

Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Adm. Jakarta Barat Tahun 2022 menyajikan informasi dalam bentuk ulasan, tabel-tabel, dan gambar. Pada setiap bab disertakan ulasan, sehingga dapat diperoleh gambaran informasi yang terkait dengan topik bahasan pada bab yang bersangkutan. Tabel yang disajikan memuat beragam indikator, baik dalam bentuk jumlah, persentase maupun rasio.

Sumber data utama penulisan ini berasal dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), Sensus Penduduk, Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) ditambah data penunjang lainnya yang berasal dari survei dan sumber data lainnya.

### **a. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)**

Kegiatan Susenas secara nasional dilakukan setiap tahun. Survei ini mengumpulkan data yang mencakup berbagai aspek sosial dan ekonomi, seperti kependudukan, kesehatan, fertilitas, pengeluaran rumah tangga, kriminalitas dan perumahan serta lingkungan. Karakteristik penting kependudukan seperti umur, jenis kelamin, status perkawinan, hubungan anggota rumah tangga dengan kepala rumah tangga dan pendidikan dikumpulkan melalui pertanyaan data pokok (kor) setiap tahun. Data yang lebih rinci, seperti konsumsi rumah tangga, perumahan, kesehatan, dan sosial budaya dikumpulkan melalui data sasaran (modul) yang dikumpulkan secara periodik, tiga tahun sekali.

**b. Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)**

Kegiatan ini merupakan kegiatan pengumpulan data yang secara nasional dilakukan setiap tahun. Survei ini merupakan kegiatan pengumpulan data yang mencakup berbagai aspek ketenagakerjaan seperti jumlah orang yang masuk dalam angkatan kerja, jumlah orang yang bekerja, jumlah orang yang mencari kerja, dan sebagainya.

**c. Sensus Penduduk**

Sensus penduduk merupakan kegiatan nasional yang bertujuan untuk mengumpulkan data tentang penduduk dan rumah tangga di seluruh Indonesia. Sensus penduduk dilakukan secara berkala setiap 10 tahun sekali, biasanya di tahun yang berakhiran 0, yaitu tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, 2010 dan 2020. Sensus Penduduk mencakup semua orang yang berada di wilayah geografis Indonesia pada saat pencacahan, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing (kecuali korps diplomatik beserta keluarganya), awak kapal berbendera Indonesia dalam perairan Indonesia, maupun para tuna wisma yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap.

**d. Survei Penduduk Antar Sensus**

Survei penduduk antar sensus dilaksanakan di pertengahan periode antara dua sensus penduduk. Rumah tangga terpilih diwawancarai guna mendapatkan informasi mengenai kondisi kependudukan misalnya fertilitas, mortalitas dan migrasi.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Analisis Indikator Kesejahteraan Rakyat DKI Jakarta dikelompokkan dalam 9 bagian, yaitu: pendahuluan, kependudukan, pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, perumahan dan lingkungan, pendapatan dan pengeluaran, kemiskinan dan indikator lainnya, serta penutup.

Dalam Bab II Kependudukan, membahas sejumlah indikator penting antara lain pertumbuhan dan komposisi penduduk, status dan usia perkawinan, kelahiran dan kematian, serta pemakaian alat/cara KB.

Perubahan-perubahan pada indikator ini mencerminkan kecenderungan atau perubahan yang menyangkut kesejahteraan penduduk.

Bab III Pendidikan, membahas sejumlah indikator penting perkembangan pendidikan yang sering dikaitkan dengan indikator pembentuk kualitas sumber daya manusia.

Bab IV Ketenagakerjaan, membahas struktur ketenagakerjaan di DKI Jakarta. Informasi yang terangkum di sini meliputi jumlah angkatan kerja, angka pengangguran, dan struktur penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha dan status pekerjaan. Pengaruh pandemi akibat Covid-19 terhadap penduduk usia kerja ditambahkan ke dalam satu subbag tersendiri.

Dalam Bab V Kesehatan, apakah derajat kesehatan masyarakat ibukota sudah baik atau belum, dapat dilihat dari beberapa indikator kesehatan yang akan dibahas di bab ini.

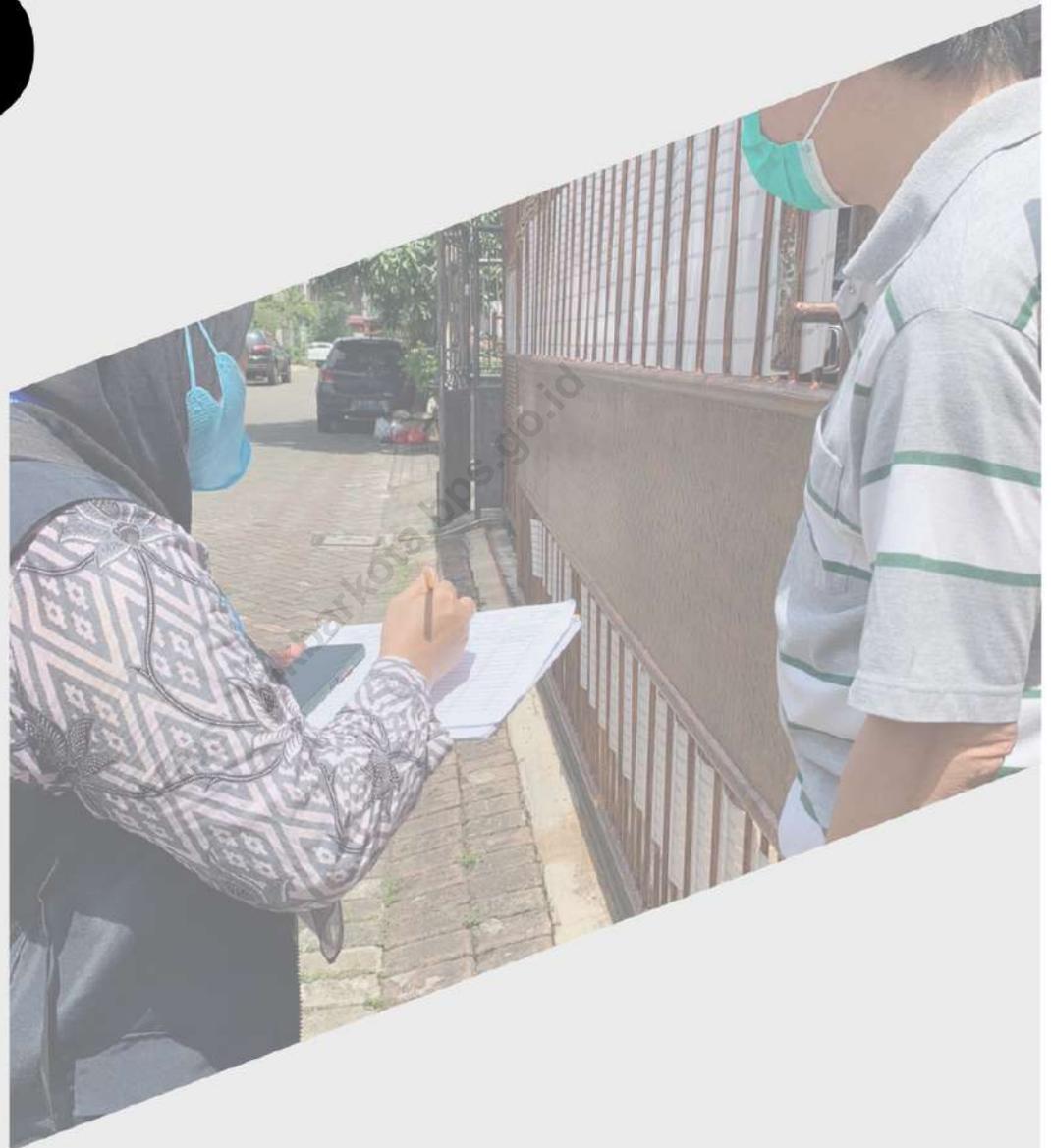
Bab VI Perumahan dan Teknologi Informasi, dalam bab ini akan dibahas beberapa indikator kualitas bahan bangunan rumah serta fasilitas yang digunakan serta penguasaan HP dan akses internet sebagai indikator pemanfaat teknologi.

Bab VII Pendapatan dan Pengeluaran Rumah Tangga, bab ini akan membahas aspek pendapatan, tingkat konsumsi rumah tangga dan pola konsumsi masyarakat.

Bab VIII Kemiskinan dan Indikator Lainnya akan membahas tingkat kemiskinan ibukota dan indikator lainnya.

Sedangkan Bab IX Penutup, merupakan ringkasan ataupun *highlight* beberapa indikator terpilih serta dampak pandemi COVID-19 terhadap beberapa indikator.

# BAB



## Kependudukan

---

# 2

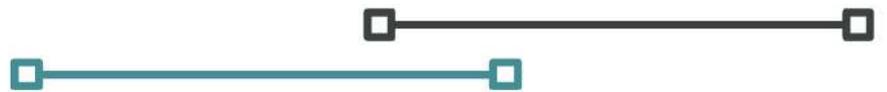




# "Tercatat lebih dari 2,4 juta jiwa

penduduk Kota Jakarta Barat yang turut  
memberi andil sebagai modal  
pembangunan Ibu Kota."

## BAB II



# KEPENDUDUKAN



Persentase Penduduk Kota Administrasi  
Jakarta Barat menurut Kelompok Umur

### Usia Produktif

(15-64 tahun)

**71,37**

### Usia Non Produktif

(0-14 tahun)

**22,60**

(65+ tahun)

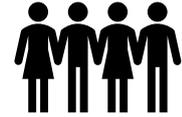
**6,03**



## BAB II

### KEPENDUDUKAN

---



Penduduk merupakan aspek penting dalam pembangunan, karena penduduk merupakan subjek sekaligus sebagai objek dalam pembangunan. Selain sebagai pelaksana, penduduk juga merupakan sasaran akhir dari semua target program pembangunan. Oleh karena itu data kependudukan sangat diperlukan sebagai penunjang dalam menentukan arah kebijakan. Data yang diperlukan tidak hanya menyangkut keadaan pada waktu kebijakan tersebut disusun, tetapi juga informasi masa lalu dan yang lebih penting informasi perkiraan pada waktu yang akan datang.

Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai lembaga penyedia data, berusaha memenuhi kebutuhan tersebut dengan melakukan perhitungan proyeksi data kependudukan dari hasil sensus penduduk (SP) dan juga Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang didalamnya termuat informasi kependudukan.

Jakarta Barat merupakan salah satu kota administrasi di wilayah Ibukota Jakarta. Kota metropolitan sekaligus kota tua menjadi daya tarik yang khas dari Kota Administrasi Jakarta Barat. Julukan ini didasarkan pada bangunan tua yang kuno yang berdampingan dengan gedung mewah lainnya.

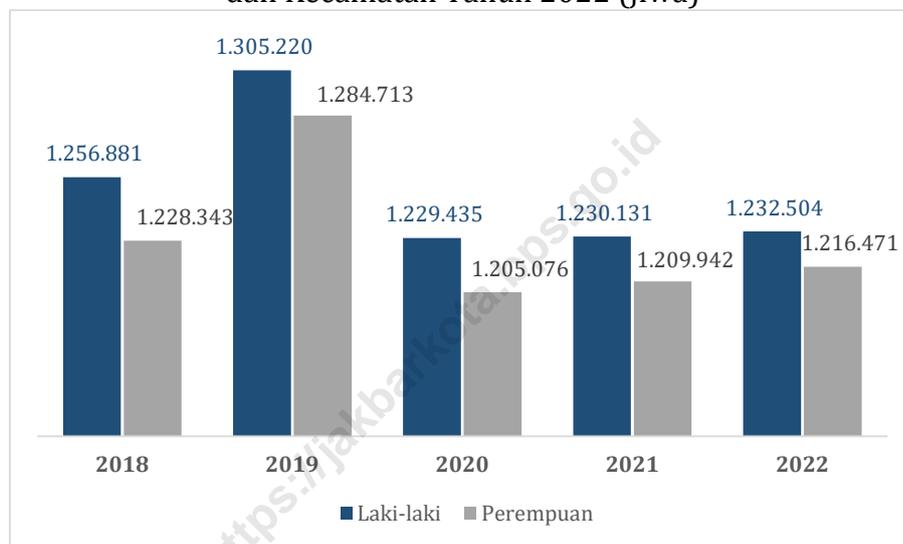
Penduduk Kota Administrasi Jakarta Barat yang tercatat lebih dari 2,4 juta jiwa pada tahun 2021 turut memberi andil sebagai modal dasar dalam pembangunan Ibu Kota. Namun demikian, jika jumlah penduduk tidak dikendalikan dengan baik, dapat memicu permasalahan mengenai penyediaan sandang, pangan, dan papan yang dapat mengganggu kesejahteraan masyarakat dan menimbulkan permasalahan-permasalahan lainnya.

Penyediaan pangan yang tidak tercukupi akan menimbulkan terjadinya kelaparan. Selain itu, ketersediaan permukiman yang tidak mencukupi akan menimbulkan permukiman kumuh, liar dan tidak layak huni.

## 2.1. Jumlah dan Komposisi Penduduk

Berdasarkan Jakarta Barat Dalam Angka Tahun 2022, Kota Administrasi Jakarta Barat dengan luas 129,54 Km<sup>2</sup> didiami penduduk sebanyak 2.573.536 jiwa. Penduduk ini tersebar di 8 Kecamatan dan 56 Kelurahan. Jumlah penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Cengkareng sebanyak 580.371 jiwa (22,55 persen), sedangkan penduduk terkecil terdapat di Kecamatan Taman Sari sebanyak 128.422 jiwa (4,99 persen).

Gambar 2.1  
Jumlah Penduduk Kota Administrasi Jakarta Barat Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan Tahun 2022 (jiwa)



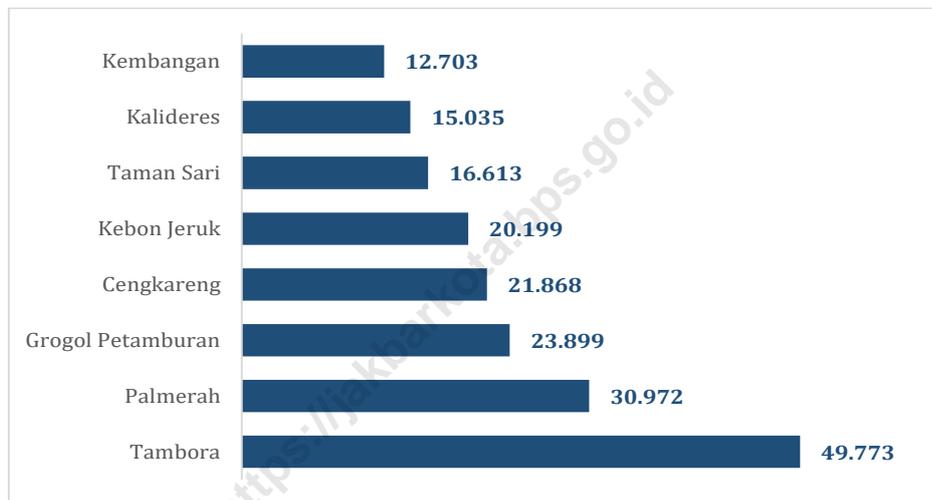
Sumber: Proyeksi Interim Sensus Penduduk Tahun 2020

Kota Administrasi Jakarta Barat masih menjadi satu-satunya kota administrasi di Provinsi DKI Jakarta yang memiliki proporsi penduduk laki-laki lebih banyak dibanding perempuan. Pada lima tahun terakhir, penduduk Kota Administrasi Jakarta Barat didominasi oleh penduduk laki-laki. Sebanyak 50,33 persen penduduk Kota Jakarta Barat tahun 2022 merupakan persentase penduduk laki-laki, dan 49,67 persen lainnya adalah penduduk perempuan.

### 2.1.1 Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk

Kota Administrasi Jakarta Barat memiliki kepadatan penduduk yang tinggi dibandingkan kota lainnya. Dengan luas wilayah 129,54 km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk yang terus meningkat dari tahun ke tahun, berakibat pada meningkatnya kepadatan penduduk di Kota Administrasi Jakarta Barat. Pada tahun 2021, kepadatan penduduk Kota Administrasi Jakarta Barat mencapai 19.867 jiwa/km<sup>2</sup>.

Gambar 2.2  
Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Barat, 2021 (Jiwa/Km<sup>2</sup>)



Sumber: Jakarta Barat Dalam Angka Tahun 2022, diolah

Kenaikan tingkat kepadatan penduduk di Kota Administrasi Jakarta Barat terjadi di seluruh kecamatan. Kepadatan penduduk pada tahun 2021 tertinggi terdapat di Kecamatan Tambora yaitu sebesar 49.773 jiwa/km<sup>2</sup>. Kecamatan yang relatif jarang penduduknya dibandingkan kecamatan lainnya di Kota Administrasi Jakarta Barat adalah Kecamatan Kembangan dengan luas wilayah 24,16 km<sup>2</sup>. Kepadatan penduduk di Kota Administrasi Jakarta Barat tidak terjadi pada kecamatan dengan jumlah penduduk tertinggi, yaitu Kecamatan Cengkareng. Dengan luas sebesar 26,54 jiwa/km<sup>2</sup>, Kecamatan Cengkareng memiliki kepadatan penduduk sebesar 21.868 jiwa/km<sup>2</sup>.

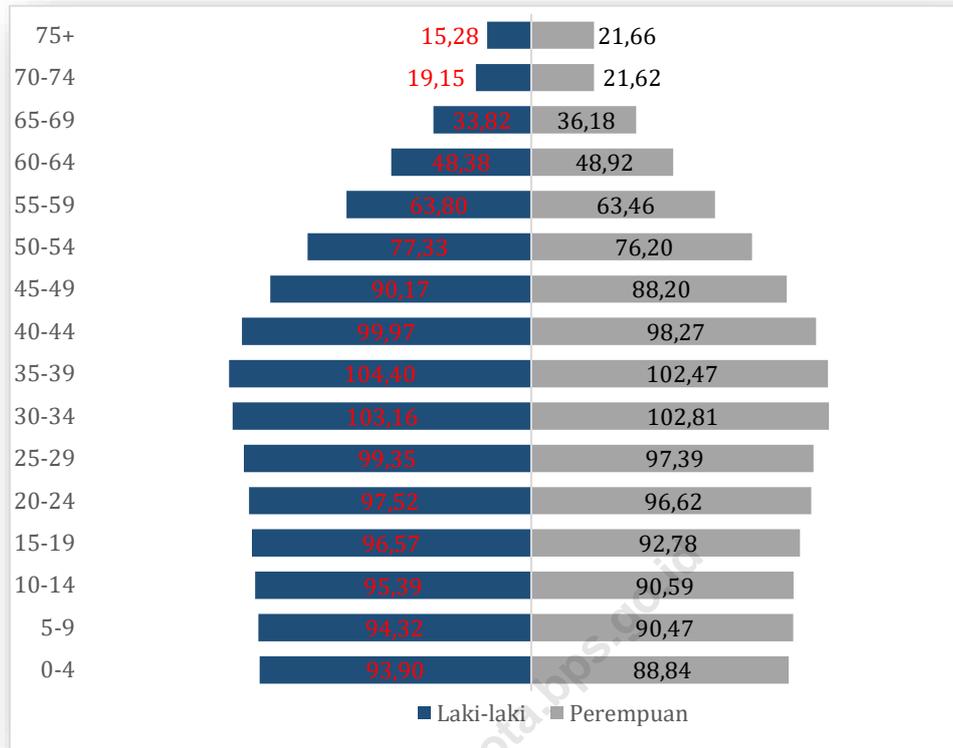
### 2.1.2. Komposisi Penduduk

Perubahan struktur penduduk menurut umur mempengaruhi besarnya angka rasio ketergantungan. Angka rasio ketergantungan adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia tidak produktif lagi (65 tahun keatas) dan penduduk yang belum produktif (0-14 tahun) terhadap penduduk usia produktif (15-64 tahun). Tinggi rendahnya rasio ketergantungan memengaruhi tingkat keberhasilan pembangunan di suatu wilayah. Semakin tinggi rasio ketergantungan, maka semakin besar pula beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif, berarti semakin besar.

Dari piramida penduduk dapat dilihat bahwa Kota Administrasi Jakarta Barat lebih banyak dihuni oleh penduduk usia produktif (15-64 tahun) sebanyak 1,75 juta jiwa atau sebesar 71,37 persen dari total penduduk Kota Administrasi Jakarta Barat. Persentase penduduk yang belum memasuki usia produktif (0-15 tahun) sebesar 22,60 persen dan penduduk tidak produktif lagi (lebih dari 64 tahun) sebesar 6,03 persen.

Berdasarkan Proyeksi Interim Sensus Penduduk 2020, angka ketergantungan Kota Administrasi Jakarta Barat tahun 2022 sebesar 40,12 persen. Angka tersebut menunjukkan setiap 100 penduduk usia produktif (15-64 tahun) menanggung beban sebanyak 40,12 penduduk usia tidak produktif (kurang dari 15 tahun dan 65 tahun keatas). Semakin besar proporsi penduduk usia non produktif, angka ketergantungan (*dependency ratio*) akan semakin besar. Ini berarti beban yang harus ditanggung oleh penduduk kelompok usia produktif cenderung meningkat. Masih rendahnya rasio ketergantungan penduduk Kota Administrasi Jakarta Barat yang berada dibawah 50 persen menunjukkan bahwa Kota Administrasi Jakarta Barat sedang menikmati "Bonus Demografi" dalam kurun waktu tersebut.

Gambar 2.3  
Piramida Penduduk Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2022 (ribu jiwa)



Sumber: Proyeksi Interim Sensus Penduduk Tahun 2020

### 2.1.3. Rasio Jenis Kelamin

Rasio Jenis Kelamin (*Sex Ratio*) merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui komposisi penduduk menurut jenis kelamin. Angka ini dinyatakan dengan perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan di suatu daerah pada waktu tertentu. Rasio jenis kelamin dapat pula dihitung untuk masing-masing kelompok umur.

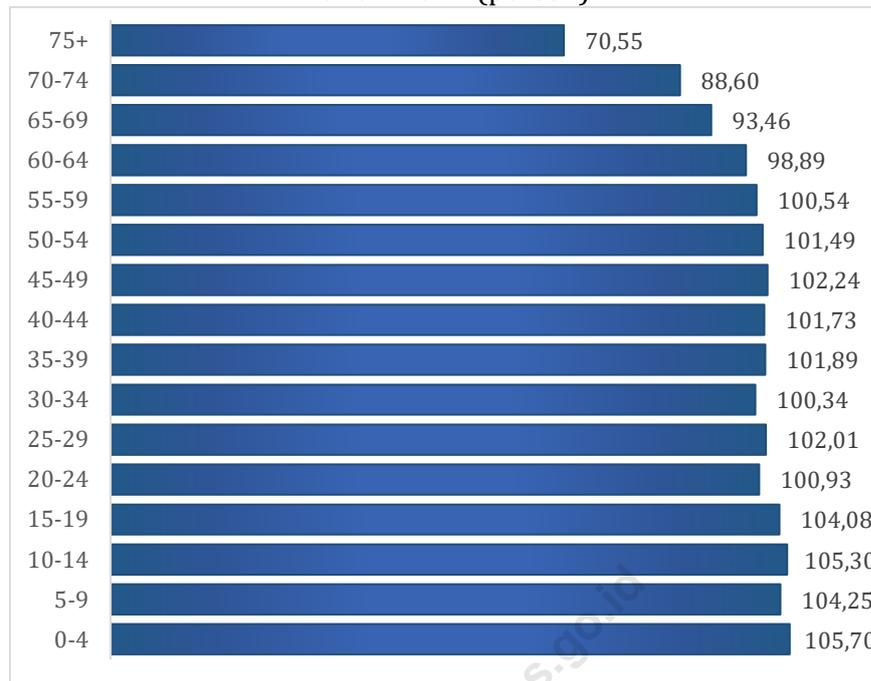
Melalui proses demografi, penduduk laki-laki biasanya lebih rentan dalam hal tingkat kesehatan. Penduduk laki-laki memiliki angka harapan hidup yang relatif lebih rendah dari pada angka harapan hidup penduduk perempuan. Di sisi lain penduduk laki-laki memiliki tingkat mobilitas yang lebih tinggi dari pada penduduk perempuan yang menyebabkan risiko terhadap kecelakaan, risiko dalam melakukan aktivitas relatif lebih besar dibandingkan perempuan. Hal ini terkait dengan aktivitasnya untuk

bersekolah ke jenjang yang lebih tinggi atau bekerja/mencari pekerjaan di tempat lain.

Berdasarkan angka proyeksi tercatat bahwa jumlah penduduk Kota Administrasi Jakarta Barat pada tahun 2022 mencapai 2,45 juta jiwa dengan rasio jenis kelamin 101,32 persen. Angka tersebut menunjukkan jumlah penduduk laki-laki hampir sama dengan perempuan. Pada tahun 2022, rasio jenis kelamin pada kelompok umur 5-9 tahun tercatat nilai rasio 104,25. Artinya, jumlah penduduk pada kelompok umur tersebut lebih banyak penduduk berjenis kelamin laki-laki dari pada perempuan. Hal ini sedikit bertentangan dengan teori demografi yang menyatakan pada kelompok umur 5-9 tahun pada umumnya lebih banyak perempuan, karena laki-laki lebih rentan terhadap masalah kesehatan sehingga kualitas ketahanan hidupnya/*(survival life)* lebih rendah dari pada perempuan.

Banyaknya penduduk laki-laki pada usia 5-9 tahun salah satunya disebabkan penanganan masalah kesehatan penduduk usia pendidikan dini di Kota Administrasi Jakarta Barat sudah baik. Karena sampai dengan saat ini Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat masih terus meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, baik dalam hal penyediaan fasilitas kesehatan maupun tenaga kesehatan. Penyebab lainnya adalah kesadaran para orang tua di Kota Administrasi Jakarta Barat dalam hal menjaga kesehatan anak sudah tinggi.

**Gambar 2.4**  
**Rasio Jenis Kelamin Menurut Kelompok Usia di Kota Administrasi Jakarta Barat**  
**Tahun 2022 (persen)**



*Sumber: Proyeksi Interim Sensus Penduduk Tahun 2020, diolah*

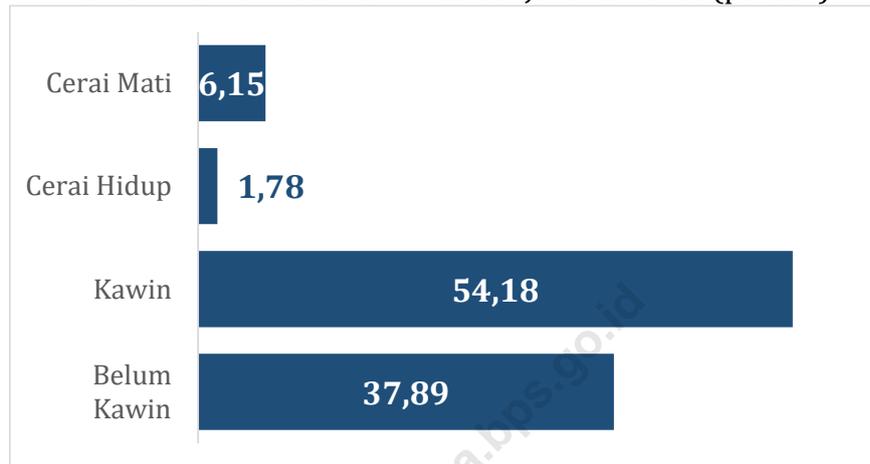
Dari Gambar 2.4, tampak bahwa beberapa kelompok umur yang memiliki rasio jenis kelamin dibawah 100,00. Kelompok umur tersebut berada di usia lebih dari 60 tahun yaitu 60-64 tahun, 65-69 tahun, 70-74 tahun, dan 75+ tahun. Kondisi tersebut menunjukkan jumlah penduduk perempuan lebih banyak di usia tua. Hal ini mencerminkan ketahanan hidup laki-laki lebih rendah dari pada perempuan. Secara teoritis ketahanan hidup laki-laki pada usia lanjut lebih rentan daripada perempuan, sehingga umur harapan hidup laki-laki lebih rendah dari pada umur harapan hidup perempuan.

## **2.2 Status dan Usia Perkawinan**

Komposisi penduduk menurut status perkawinan dan kelompok umur sangat penting untuk diketahui, karena hal ini terkait dengan masalah fertilitas, usia perkawinan pertama untuk perempuan (SMAM) dan masa reproduksinya, serta rata-rata anak lahir hidup (ALH) dan rata-rata anak masih hidup (AMH). Pengumpulan data fertilitas diperoleh dari perempuan pernah kawin (kawin, cerai mati, dan cerai hidup) dengan pertimbangan

kejadian kelahiran di Kota Administrasi Jakarta Barat biasanya terjadi pada ikatan perkawinan, sehingga kejadian kelahiran pada perempuan yang belum kawin tetap diperhitungkan sebagai faktor penentu angka fertilitas. Wanita belum kawin tetapi pernah melahirkan dimasukan dalam kelompok cerai hidup.

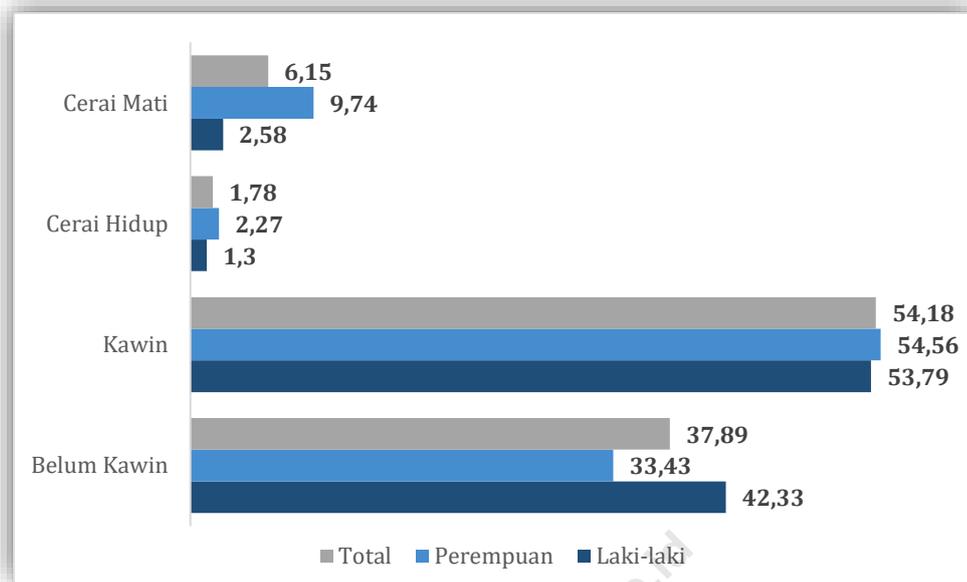
Gambar 2.5  
Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Ke Atas menurut Status Perkawinan di Kota Administrasi Jakarta Barat (persen)



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi DKI Jakarta, 2022

Secara umum, persentase penduduk di Kota Administrasi Jakarta Barat berumur di atas 10 tahun didominasi oleh penduduk yang sudah kawin yaitu sebesar 54,18 persen. Adapun proporsi penduduk Kota Administrasi Jakarta Barat yang belum kawin mencapai 37,89 persen. Penduduk yang mengalami perceraian lebih banyak pada cerai mati dibandingkan cerai hidup. Penduduk Kota Administrasi Jakarta Barat yang mengalami cerai mati sebesar 6,15 persen dan cerai hidup sebesar 1,78 persen.

Gambar 2.6  
Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke atas menurut Status Perkawinan dan Jenis Kelamin di Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun, 2022 (persen)



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi DKI Jakarta, 2022

Berdasarkan publikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi DKI Jakarta tahun 2022 memberikan gambaran proporsi penduduk laki-laki dan perempuan usia 10 tahun ke atas menurut status perkawinan (belum kawin, kawin, cerai hidup, dan cerai mati). Proporsi penduduk berstatus kawin masih mendominasi baik laki-laki maupun perempuan. Pada tahun 2022, proporsi penduduk laki-laki dan perempuan usia 10 tahun ke atas yang berstatus kawin masing-masing sebesar 53,79 persen dan 54,56 persen dan yang berstatus belum kawin 42,33 persen dan 33,43 persen.

Umur pada saat perkawinan pertama akan mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk. Karena semakin muda umur pernikahan pertama akan semakin panjang rentang waktu reproduksi sehingga lebih berpeluang melahirkan lebih banyak. Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi umur perkawinan pertama seorang wanita, diantaranya tingkat pendidikan dan aktivitas dalam kegiatan ekonomi.

Umur perkawinan pertama perempuan pada tahun 2022 di Jakarta Barat terbanyak pada usia lebih dari 19 tahun dengan jumlah sebesar 81,74 persen. Adapun, penduduk perempuan yang usia kawin pertamanya berusia kurang dari 19 tahun hanya mencapai 18,26 persen. Menurut Undang Undang

nomor 1 tahun 1974 batas usia menikah untuk perempuan adalah 16 tahun dan pria 19 tahun, dengan jumlah persentase 18,26 persen maka masih ada perkawinan dibawah umur di Jakarta Barat.

Gambar 2.7  
Persentase Penduduk Perempuan Pernah Kawin Menurut Usia Perkawinan Pertama di Kota Administrasi Jakarta Barat, 2022 (persen)



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi DKI Jakarta, 2022

### 2.3 Pemakaian Alat/Cara Keluarga Berencana

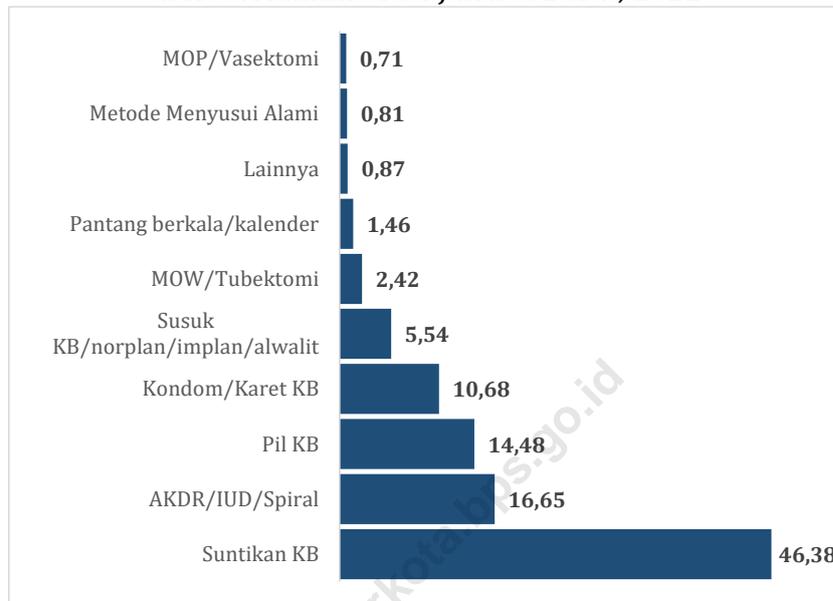
Pemakaian alat/cara KB sangat berperan dalam menurunkan angka fertilitas di Kota Jakarta Barat. Wanita pernah kawin semakin menyadari pentingnya perencanaan jumlah anak dalam mencapai kesejahteraan keluarga yang diinginkan.

Pada tahun 2022 dari hasil Susenas Maret, didapatkan informasi bahwa dari perempuan usia 15 sampai dengan 49 tahun yang pernah kawin sebanyak 8,96 persen pernah menggunakan, sebanyak 49,42 persen sedang menggunakan alat KB/cara tradisional untuk mencegah kehamilan, sedangkan 41,62 persen tidak pernah menggunakan.

Dari wanita usia 15 sampai dengan 49 tahun yang pernah kawin yang sedang menggunakan tercatat alat KB yang banyak digunakan adalah suntikan sebesar 46,38 persen, berikutnya IUD/AKDR/Spiral sebanyak 16,65 persen dan Pil sebanyak 14,48 persen. Adapun alat Kb yang lain seperti

kondom/karet KB, susuk KB/norplan/implant/alwalit, MOW/Tubektomi, dan pantang berkala memiliki persentase di bawah 10 persen.

Gambar 2.8  
Persentase Penduduk Perempuan Berumur 15-49 tahun yang Pernah Kawin dan Alat KB atau Cara Tradisional yang Sedang Digunakan di Kota Administrasi Jakarta Barat, 2022



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi DKI Jakarta, 2022

## 2.4 Kepemilikan Akta Kelahiran

Akta Kelahiran adalah bukti sah mengenai status dan peristiwa kelahiran seseorang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Bayi yang dilaporkan kelahirannya akan terdaftar dalam Kartu Keluarga dan diberi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai dasar untuk memperoleh pelayanan masyarakat lainnya. Akta Kelahiran nantinya akan sangat berguna di masa depan dalam mengurus berbagai hal seperti pendidikan, pekerjaan, pernikahan, dan lain-lain.

Gambar 2.9  
Persentase Penduduk Berumur 0-17 Tahun yang Memiliki Akta Kelahiran  
dari Kantor Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat, 2022 (persen)



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi DKI Jakarta, 2022

Dari gambar 2.9 menunjukkan bahwa penduduk yang berumur 0 sampai dengan 17 tahun yang memiliki akta kelahiran sebesar 99,31 persen dan 0,48 persen lain tidak memiliki akta kelahiran. Adapun masih ada penduduk berumur 0 sampai 17 tahun yang tidak tahu mengenai kepemilikan akta kelahirannya mencapai hanya 0,2 persen.

Tabel 2.1  
Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Usia Muda,  
Produktif, dan Usia Tua di Kota Administrasi Jakarta Barat, 2022

No	Kelompok Umur	2022	
		Jumlah (ribu orang)	%
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Usia Produktif (15-64)	1.747,76	71,37
2.	Usia Non Produktif		
	Usia bayi-Remaja (0-14)	553,50	22,60
	Usia Tua (65+)	147,71	6,03
	<b>Total</b>	<b>2.448,98</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Proyeksi Interim Sensus Penduduk 2020, 2022

Tabel 2.2  
Jumlah dan Proporsi Penduduk Menurut Jenis Kelamin  
di Kota Administrasi Jakarta Barat, 2018-2022

Jenis Kelamin	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Laki-laki	(jiwa)	1.256.881	1.305.220	1.229.435	1.230.131	1.232.504
	(%)	50,57	50,40	50,50	50,41	50,33
Perempuan	(jiwa)	1.228.343	1.284.713	1.205.076	1.209.942	1.216.471
	(%)	49,43	49,60	49,50	49,59	49,67
Jakarta Barat	(jiwa)	2.485.224	2.589.933	2.434.511	2.440.073	2.448.975
	(%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Sumber Data		Jakarta Barat Dalam Angka	Jakarta Barat Dalam Angka	Proyeksi nterim SP 2020	Proyeksi Interim SP 2020	Proyeksi Interim SP 2020

Sumber : Kota Jakarta Barat Dalam Angka Tahun 2022, Proyeksi Interim Sensus Penduduk Tahun 2020

Tabel 2.3  
Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Barat, 2022

Kecamatan	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	Kepadatan (jiwa/km <sup>2</sup> )	Jiwa (Orang)
(1)	(2)	(3)	(4)
Kembangan	24,16	12.703,39	306.914
Kebon Jeruk	17,98	20.199,17	363.181
Palmerah	7,51	30.971,77	232.598
Grogol Petamburan	9,99	23.898,70	238.748
Tambora	5,4	49.772,78	268.773
Taman Sari	7,73	16.613,45	128.422
Cengkareng	26,54	21.867,78	580.371
Kalideres	30,23	15.035,36	454.519
<b>Jakarta Barat</b>			<b>2.573.526</b>

Sumber : Kota Jakarta Barat Dalam Angka Tahun 2022

Tabel 2.4  
 Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin  
 di Kota Administrasi Jakarta Barat, 2022 (persen)

Golongan Umur	Persentase	
	Laki-laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)
<b>0-4</b>	7,62	7,30
<b>5-9</b>	7,65	7,44
<b>10-14</b>	7,74	7,45
<b>15-19</b>	7,84	7,63
<b>20-24</b>	7,91	7,94
<b>25-29</b>	8,06	8,01
<b>30-34</b>	8,37	8,45
<b>35-39</b>	8,47	8,42
<b>40-44</b>	8,11	8,08
<b>45-49</b>	7,32	7,25
<b>50-54</b>	6,27	6,26
<b>55-59</b>	5,18	5,22
<b>60-64</b>	3,93	4,02
<b>65-69</b>	2,74	2,97
<b>70-74</b>	1,55	1,78
<b>75+</b>	1,24	1,78
<b>Total</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Proyeksi Interim Sensus Penduduk 2020

Tabel 2.5  
 Rasio Jenis Kelamin Menurut Kelompok Umur  
 di Kota Administrasi Jakarta Barat, 2022

Golongan Umur	Tahun 2022
(1)	(2)
<b>0-4</b>	105,70
<b>5-9</b>	104,25
<b>10-14</b>	105,30
<b>15-19</b>	104,08
<b>20-24</b>	100,93
<b>25-29</b>	102,01
<b>30-34</b>	100,34
<b>35-39</b>	101,89
<b>40-44</b>	101,73
<b>45-49</b>	102,24

<b>50-54</b>	101,49
<b>55-59</b>	100,54
<b>60-64</b>	98,89
<b>65-69</b>	93,46
<b>70-74</b>	88,60
<b>75+</b>	70,55
<b>Total</b>	<b>101,32</b>

Sumber : Proyeksi Interim Sensus Penduduk 2020, diolah

Tabel 2.6  
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Angka Ketergantungan di Kota Administrasi Jakarta Barat, 2022

<b>Kelompok Umur</b>	<b>Jumlah Penduduk (ribu)</b>	<b>Persentase (%)</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>
<b>0-14</b>	553.503	22,60
<b>15-64</b>	1.747.758	71,37
<b>65+</b>	147.714	6,03
<b>Total</b>	<b>2.448.975</b>	<b>100,00</b>
<b>Dependency Ratio</b>	<b>40,12</b>	

Sumber : Proyeksi Interim Sensus Penduduk 2020, diolah

Tabel 2.7  
Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas menurut Status Perkawinan dan Jenis Kelamin di Kota Jakarta Barat tahun 2022 (persen)

<b>Status Perkawinan</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jakarta Barat</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
<i>Belum Kawin</i>	42,33	33,43	37,89
<i>Kawin</i>	53,79	54,56	54,18
<i>Cerai Hidup</i>	1,30	2,27	1,78
<i>Cerai Mati</i>	2,58	9,74	6,15
<b>Total</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Jakarta Barat, 2022

Tabel 2.8  
 Persentase Penduduk Perempuan Pernah Kawin Berumur 10 Tahun ke Atas  
 menurut Usia Perkawinan Pertama  
 di Kota Administrasi Jakarta Barat, 2022 (persen)

<b>Umur</b>	<b>Persentase Penduduk</b>
(1)	(2)
<19	18,26
19+	81,74
<b>Jakarta Barat</b>	<b>100</b>

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi DKI Jakarta, 2022

Tabel 2.9  
 Persentase Penduduk Perempuan Berumur 15-49 tahun yang Pernah Kawin dan  
 dan Alat KB atau Cara Tradisional yang Sedang Digunakan, 2022

<b>Alat KB</b>	<b>Persentase Penduduk</b>
(1)	(2)
<i>MOW/Tubektomi</i>	2,42
<i>MOP/Vasektomi</i>	0,71
<i>AKDR/IUD/Spiral</i>	16,65
<i>Suntikan KB</i>	46,38
<i>Susuk KB/norplan/implan/alwalit</i>	5,54
<i>Pil KB</i>	14,48
<i>Kondom/Karet KB</i>	10,68
<i>Intravag/tissue/kondom wanita</i>	0
<i>Metode Menyusui Alami</i>	0,81
<i>Pantang berkala/kalender</i>	1,46
<i>Lainnya</i>	0,87
<b>Jakarta Barat</b>	<b>100</b>

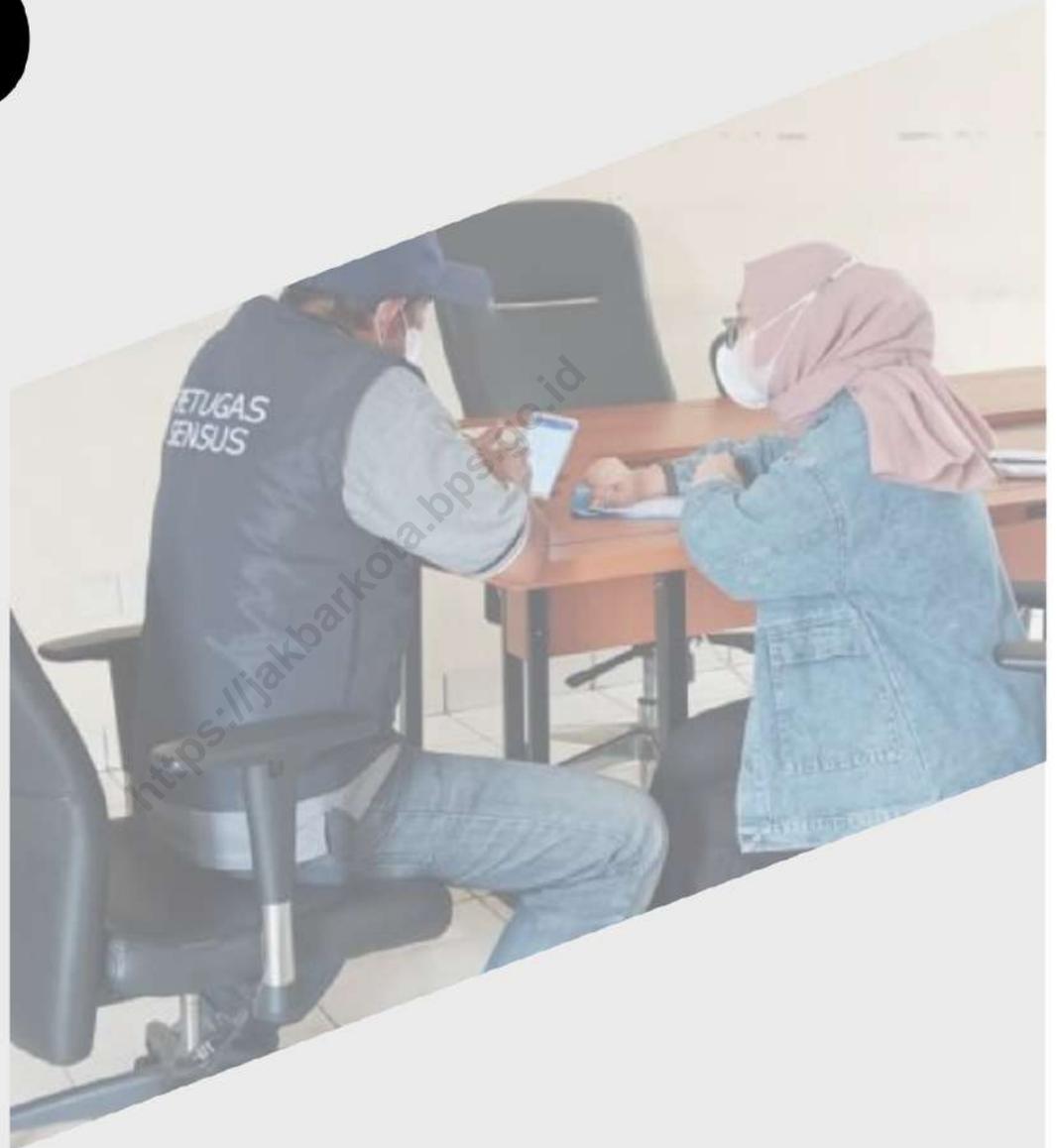
Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi DKI Jakarta, 2022

Tabel 2.10  
 Persentase Penduduk Berumur 0-17 tahun yang memiliki Akta Kelahiran dari  
 Kantor Catatan Sipil Kota Jakarta Barat, 2022

<b>Wilayah</b>	<b>Ya, Memiliki</b>	<b>Tidak Memiliki</b>	<b>Tidak Tahu</b>	<b>Total</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<i>Jakarta Barat</i>	99,31	0,48	0,2	100

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi DKI Jakarta, 2022

# BAB



## Ketenagakerjaan

---





# "Angka Partisipasi Kasar (APK)

adalah proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut

## BAB III



## PENDIDIKAN

### Angka Partisipasi Kasar Kota Administrasi Jakarta Barat, 2022

102,60 SD

88,07 SMP

73,81 SMA







Pendidikan merupakan salah satu pilar yang diperlukan dalam pembentukan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu pembangunan bidang pendidikan perlu mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah dan masyarakat agar dapat membentuk pola pikir yang maju dan kreatif. Dengan adanya SDM yang mumpuni diharapkan mampu berkompetisi dengan bangsa lain.

Peningkatan kualitas SDM melalui bidang pendidikan, diwujudkan pemerintah melalui berbagai kebijakan, antara lain pelaksanaan program wajib belajar (Wajar) 6 tahun yang telah dilaksanakan sejak tahun 1984, kemudian ditingkatkan dengan Wajar Pendidikan Dasar 9 tahun pada tahun 1994. Dalam kurun waktu 2 dasawarsa, dampak positif dari program wajib belajar telah mampu mengurangi angka buta huruf dan meningkatkan angka partisipasi sekolah.

Sejak tahun 2012, Pemprov DKI Jakarta sudah menggulirkan kebijakan wajib belajar 12 tahun, yang artinya siswa SMA sederajat mendapat subsidi dari pemerintah dalam hal pembiayaan pendidikannya. Kebijakan ini diimplementasikan dengan kebijakan SPP gratis pada seluruh tingkat sekolah dasar, menengah pertama dan menengah atas pada sekolah negeri.

Kebijakan di atas berimplikasi pada semakin banyak penduduk yang mampu menamatkan pendidikan dan secara tidak langsung turut memberi kontribusi pada penundaan usia anak-anak dalam memasuki bursa lapangan pekerjaan. Adanya pemerataan pendidikan diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan penduduk secara keseluruhan.

#### **3.1. Buta Huruf**

Salah satu keberhasilan program pendidikan ditunjukkan dengan semakin berkurangnya tingkat buta huruf penduduk secara umum. Tingkat buta huruf adalah indikator yang menggambarkan proporsi penduduk yang tidak bisa membaca dan menulis terhadap jumlah seluruh penduduk.

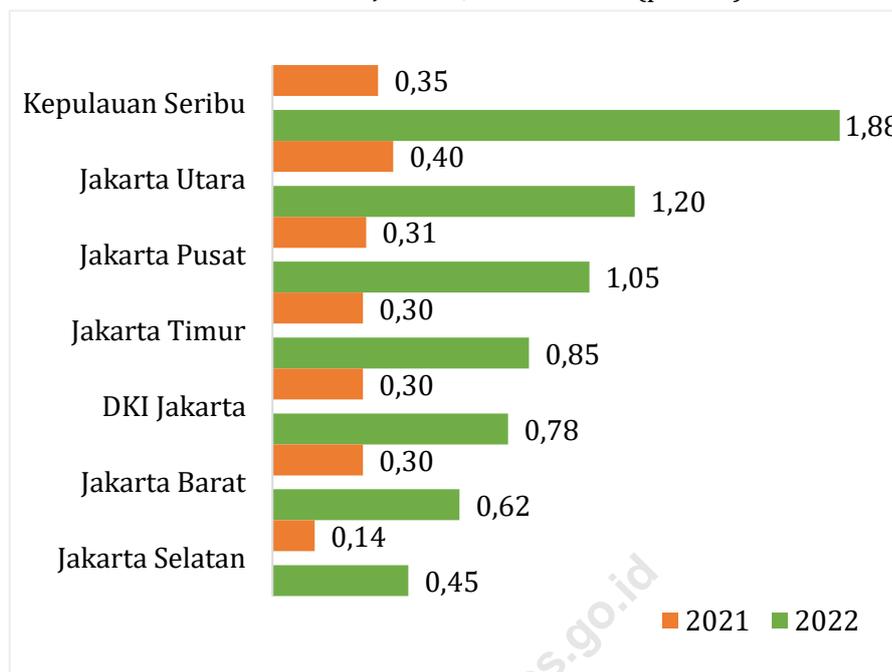
Kemampuan baca tulis merupakan pengetahuan minimum yang dibutuhkan oleh penduduk untuk dapat mengembangkan sumber daya yang dimiliki setiap individu. Berkaitan dengan ini, pemerintah berusaha agar seluruh penduduk bebas buta aksara. Usaha Pemerintah selama ini antara lain diwujudkan dengan program wajib belajar melalui jalur pendidikan formal dan program kejar Paket A dan B melalui jalur pendidikan informal di segala lapisan masyarakat, baik terhadap penduduk laki-laki maupun perempuan.

Angka buta huruf (ABH) penduduk usia 15 tahun ke atas Kota Jakarta Barat pada tahun 2022 adalah sebesar 0,62 persen, naik 0,32 persen dibandingkan dengan tahun 2021. Secara umum perubahan ABH yang terjadi dari tahun ke tahun pada umumnya disebabkan oleh migrasi internal yang terjadi pada penduduk wanita, misalnya pembantu rumah tangga yang berasal dari luar Jakarta yang tidak berpendidikan dan tidak bisa baca tulis bermigrasi ke kota Jakarta, sehingga menyebabkan angka buta huruf di Kota Jakarta Barat mengalami kenaikan. Sejalan dengan hal tersebut, ABH Provinsi DKI Jakarta juga mengalami kenaikan di tahun 2022. ABH Provinsi DKI Jakarta adalah sebesar 0,78 persen, naik 0,48 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan seluruh kabupaten/kota di Provinsi DKI Jakarta, ABH Kota Jakarta Barat pada tahun 2022, termasuk yang paling kecil diantara kabupaten/kota lainnya. ABH Kota Jakarta Barat merupakan yang terendah kedua setelah Kota Jakarta Selatan.

Nilai ABH yang berada di kisaran 1 persen dan kurang dari 1 persen, memiliki arti bahwa ABH tersebut sudah sulit untuk diturunkan dan cenderung berfluktuatif di sekitar angka tersebut.

Gambar 3.1.

Angka Buta Huruf Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta, 2021 - 2022 (persen)



Sumber : Susenas Maret 2022

Salah satu hal yang turut berperan meningkatkan kemampuan baca tulis adalah dilaksanakannya program pendidikan non formal dengan diberlakukannya program Paket A, Paket B, SMP Terbuka, dan program penuntasan keniraksaraan lainnya.

Berbagai kebijakan pemerintah di bidang pendidikan seperti pemberian “Bantuan Operasional Sekolah” (BOS), “Bantuan Operasional Pendidikan” (BOP), Beasiswa untuk siswa miskin (BSM), dan program bantuan Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang bertujuan membantu siswa tidak mampu untuk membiayai kebutuhan sekolah seperti membeli buku, pakaian seragam, dan uang saku/transpor.

### 3.2. Partisipasi Sekolah

Salah satu indikator pendidikan yang menggambarkan tingkat partisipasi penduduk dalam pendidikan adalah Angka Partisipasi Sekolah (APS). APS menggambarkan Proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah

tertentu yang sedang bersekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuh) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian.

APS dapat digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan. Nilai APS berkisar antara 0-100. Makin tinggi APS berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. Pada kelompok umur mana peluang tersebut terjadi dapat dilihat dari besarnya APS pada setiap kelompok umur.

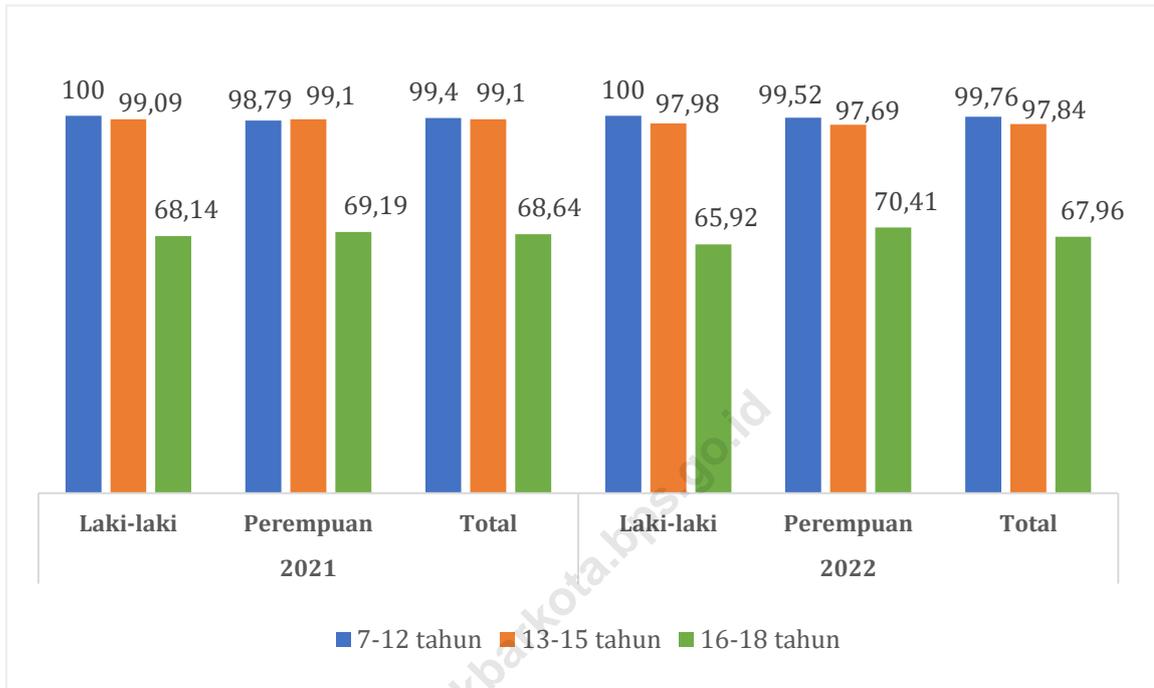
Indikator ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kualitas sumber daya manusia yang potensial di masa datang. Semakin banyak penduduk yang berpartisipasi dalam pendidikan, peluang untuk meningkatkan kualitas SDM di masa datang juga semakin besar.

Pada Tahun 2022, APS penduduk Kota Jakarta Barat secara umum mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2021. Pada Gambar 3.3 terlihat bahwa pada tahun 2022 APS kelompok usia 7-12 tahun adalah sebesar 99,76 persen, naik 0,36 persen dibandingkan tahun 2021. Namun, APS untuk kelompok usia 13-15 tahun dan usia 16-18 tahun justru mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. APS Kelompok usia 13-15 tahun mengalami penurunan sebesar 1,26 persen menjadi 97,84 persen di tahun 2022. Sementara kelompok usia 16-18 tahun, mengalami penurunan sebesar 0,36 persen menjadi 99,4 persen di tahun 2022.

Meningkatnya APS pada seluruh kelompok usia sekolah dari 7-12 menunjukkan bahwa program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang digulirkan Pemerintah Pusat dan program Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) serta Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang dikururkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdampak positif pada peningkatan minat dan partisipasi anak untuk tetap bersekolah. Namun demikian, dampak program ini mengalami penurunan di tahun 2022 untuk kelompok usia 13 – 15 tahun. Penurunan APS yang terjadi pada anak usia 16 – 18 tahun salah satu nya disebabkan oleh faktor biaya. Persepsi masyarakat yang kurang mementingkan pendidikan tinggi turut melengkapi faktor penurunan APS pada kelompok umur tersebut.

Gambaran secara rinci Angka Partisipasi Sekolah (APS) tahun 2022 menurut kelompok umur dan jenis kelamin dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 3.2  
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia Sekolah  
Menurut Jenis Kelamin di Kota Jakarta Barat, 2021 – 2022 (Persen)



Sumber : Susenas Maret, 2021-2022

Semakin tinggi jenjang pendidikan, angka partisipasi sekolah terlihat semakin kecil. Kondisi ini menunjukkan bahwa bagi penduduk yang kemampuan ekonominya terbatas, ada kecenderungan tidak menyekolahkan anaknya pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi, disamping alasan lain seperti anak tidak minat sekolah, transportasi, dan sebagainya.

Apabila dilihat berdasarkan jenis kelamin, terlihat bahwa APS laki-laki di Kota Jakarta Barat cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan APS perempuan pada setiap kelompok usia sekolah. APS laki-laki umur 7-12 tahun adalah sebesar 100 persen, lebih tinggi daripada APS perempuan yang sebesar 99,52 persen. Selanjutnya APS umur 13-15 tahun juga menunjukkan bahwa APS laki-laki adalah sebesar 97,98 persen lebih tinggi daripada APS perempuan yang sebesar 97,69 persen. Namun demikian, APS laki-laki pada umur 16-18 tahun lebih rendah dibandingkan APS perempuan. APS laki-laki umur 16-18 tahun adalah sebesar 65,92 persen, lebih rendah daripada APS

perempuan yang sebesar 70,41 persen. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi sekolah untuk jenjang pendidikan tinggi cenderung didominasi oleh perempuan dibandingkan laki-laki.

### **3.3. Partisipasi Murni**

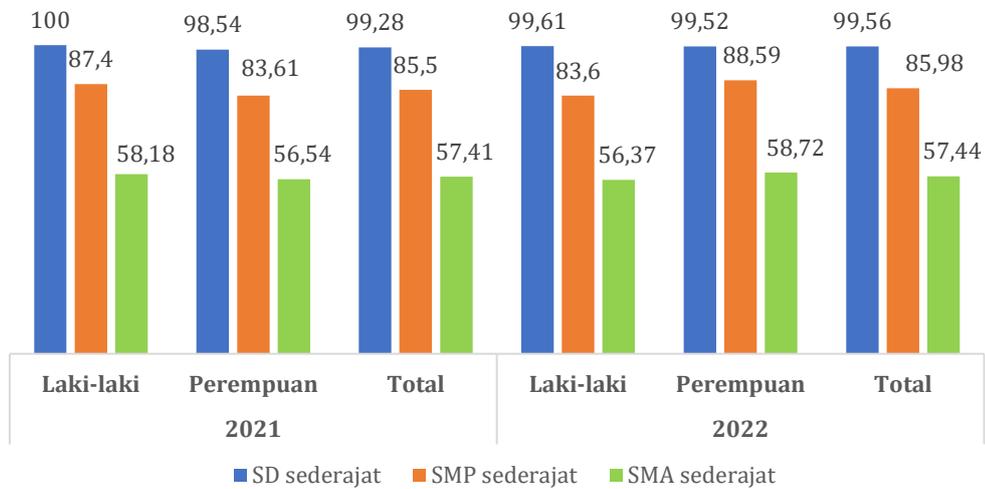
Indikator lain yang biasa digunakan untuk mengukur partisipasi sekolah adalah Angka Partisipasi Murni (APM). Angka ini memiliki pola yang relatif sama dengan APS dimana di jenjang SD APM lebih tinggi dibandingkan APM pada jenjang SMP dan SMA.

APM menggambarkan Proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian.

Nilai APM berkisar antara 0-100. APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai 100 persen.

APM SD pada tahun 2022 adalah sebesar 99,76 persen, naik 0,48 persen dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 99,28 persen. APM SMP juga mengalami kenaikan, dari 85,5 persen pada tahun 2021 menjadi 85,98 persen pada tahun 2022. Begitu pula pada jenjang SMA, APM mengalami kenaikan dari 57,41 persen pada tahun 2021 menjadi 57,44 persen pada tahun 2022.

**Gambar 3.3**  
**Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenis Kelamin**  
**di Kota Jakarta Barat, 2021 – 2022 (Persen)**



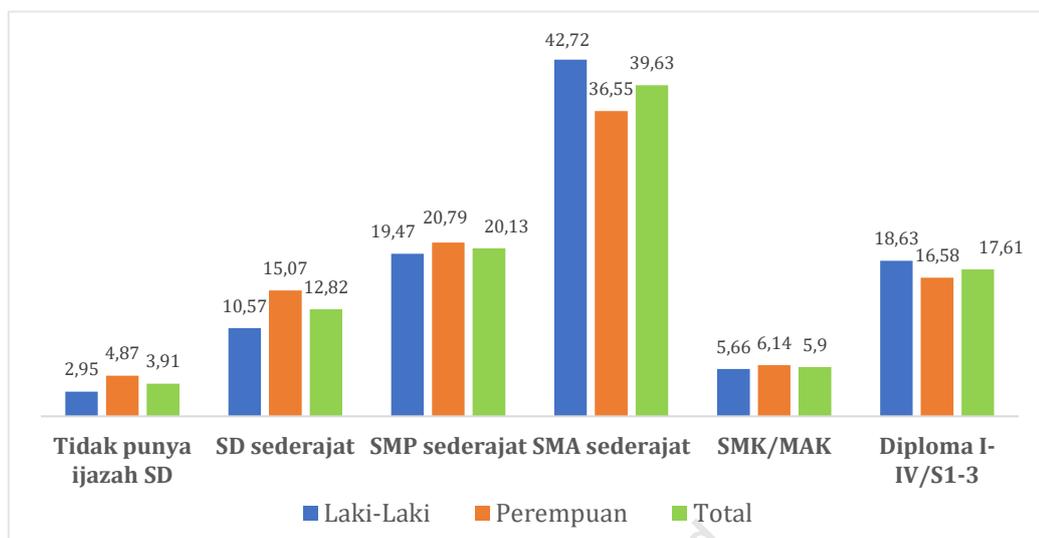
Sumber : Susenas Maret 2021-2022

### 3.4. Tingkat Pendidikan

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa tingkat pendidikan sangat berpengaruh terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia. Tingkat pendidikan yang relatif tinggi, diharapkan mampu meningkatkan produktivitasnya sebagai tenaga kerja. Selanjutnya peningkatan produktivitas seseorang dalam kegiatan ekonomi diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan hidupnya dan berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat secara umum.

Pada tahun 2022, penduduk usia 15 tahun ke atas di Kota Jakarta Barat yang mampu menyelesaikan pendidikannya hingga tingkat SMA/ sederajat (di luar SMK/MAK) adalah sebesar 39,63 persen, tingkat SMP/ sederajat sebesar 20,13 persen, tingkat diploma I-IV dan strata 1-3 sebesar 17,61 persen, tingkat SD/ sederajat sebesar 12,82 persen, tingkat SMK/MAK sebesar 5,9 persen, dan tidak punya ijazah SD sebesar 3,91 persen.

**Gambar 3.4**  
**Persentase Penduduk Usia 15 tahun ke atas**  
**Menurut Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan dan Jenis Kelamin**  
**di Kota Jakarta Barat Tahun 2022 (Persen)**



Sumber: Susenas Maret 2022

Apabila dilihat berdasarkan jenis kelamin, pada tahun 2022 terdapat kecenderungan bahwa penduduk perempuan usia 15 tahun ke atas menamatkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi, yakni jenjang SMA/ perguruan tinggi dibandingkan laki-laki. Terlihat bahwa persentase penduduk perempuan usia 15 tahun ke atas yang menamatkan SMA sederajat dan diploma I-V/ strata 1-3 masing-masing sebesar 39,63 persen dan 17,61 persen, lebih tinggi daripada laki-laki usia 15 tahun ke atas yang masing-masing sebesar 42,72 persen dan 18,63 persen.

### 3.5. Rata-rata Lama Sekolah

Ada dua indikator pendidikan yang digunakan untuk mengukur tingkat pendidikan penduduk yang sekaligus digunakan dalam penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yakni Rata-rata lama sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). RLS menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal.

Secara umum RLS penduduk di Kota Jakarta Barat, menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, RLS Kota Jakarta Barat adalah sebesar 11,13 tahun, lebih tinggi daripada tahun sebelumnya yang

sebesar 10,78 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata penduduk Kota Jakarta Barat usia 25 tahun ke atas telah menyelesaikan pendidikan selama 11,13 tahun atau termasuk dalam kelas XII (kelas III SMA). Peningkatan ini sejalan dengan RLS Provinsi DKI Jakarta yang juga mengalami peningkatan, yakni menjadi 11,31 tahun atau termasuk kelas XII (Kelas III SMA) pada tahun 2022.

Gambar 3.5  
Rata-rata Lama Sekolah di Provinsi DKI Jakarta dan Kota Jakarta Barat  
Tahun 2018 dan 2022 (tahun)



Sumber: Indeks Pembangunan Manusia, BPS

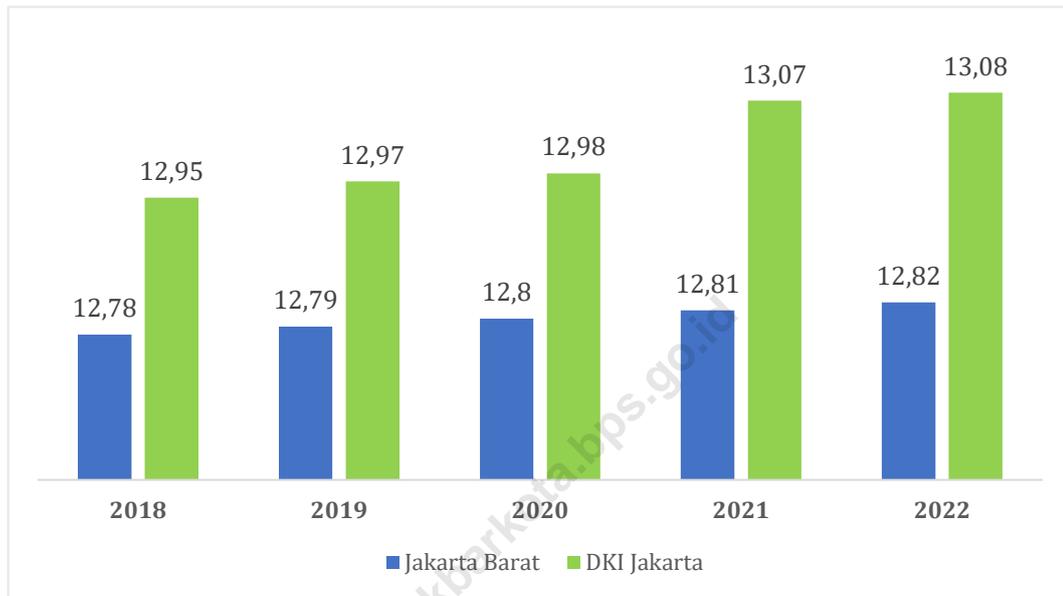
### 3.6. Harapan Lama Sekolah

Harapan lama sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Indikator ini dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Pada tahun 2022, HLS Kota Jakarta Barat tercatat sebesar 12,82 tahun naik 0,01 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa anak usia 7 tahun ke atas yang memasuki dunia pendidikan diharapkan dapat bersekolah selama 12,82 tahun atau diperkirakan dapat mencapai Diploma Satu.

Sejalan dengan hal tersebut, HLS Provinsi DKI Jakarta juga mengalami kenaikan, yakni mencapai 13,08 tahun pada tahun 2022, yang berarti bahwa anak usia 7 tahun ke atas yang memasuki dunia pendidikan diharapkan dapat bersekolah selama 13,07 tahun atau diperkirakan dapat mencapai Diploma Dua.

Gambar 3.6  
Harapan Lama Sekolah di Kota Jakarta Barat, 2020-2022 (tahun)



Sumber: Indeks Pembangunan Manusia, BPS

Tabel 3.1.  
Tingkat Buta Huruf Penduduk 15 Tahun ke atas  
menurut Kabupaten/Kota Administrasi  
di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 dan 2022 (Persen)

Kabupaten/Kota	2021	2022
(1)	(2)	(3)
Jakarta Selatan	0,14	0,45
Jakarta Barat	0,30	0,62
Jakarta Timur	0,30	0,85
Jakarta Pusat	0,31	1,05
Jakarta Utara	0,40	1,20
Kepulauan Seribu	0,35	1,88
<b>DKI Jakarta</b>	<b>0,30</b>	<b>0,78</b>

Sumber: Susenas 2021 dan 2022

Tabel 3.2.  
Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Usia Sekolah dan Jenis Kelamin  
di Kota Jakarta Barat, 2021 – 2022 (Persen)

Usia Sekolah	2021			2022		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+ Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+ Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7 - 12	100	98,79	99,4	100	99,52	99,76
13 - 15	99,09	99,1	99,1	97,98	97,69	97,84
16 - 18	68,14	69,19	68,64	65,92	70,41	67,96

Sumber: Susenas 2021 dan 2022

Tabel 3.3.  
Angka Partisipasi Murni (APM)  
Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin  
di Kota Jakarta Barat, 2021 – 2022 (Persen)

Jenjang Sekolah	2021			2022		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<i>SD sederajat</i>	100	98,54	99,28	99,61	99,52	99,76
<i>SMP sederajat</i>	87,4	83,61	85,5	83,6	88,59	85,98
<i>SMA sederajat</i>	58,18	56,54	57,41	56,37	58,72	57,44

Sumber : Susenas 2021 dan 2022

Tabel 3.4.  
Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas  
Menurut Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan dan Jenis Kelamin  
di Kota Jakarta Barat dan Provinsi DKI Jakarta, 2021 – 2022 (Persen)

Usia Sekolah/ Jenis Kelamin	2021		2022	
	Jakarta Barat	DKI Jakarta	Jakarta Barat	DKI Jakarta
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b><u>Tidak/belum punya ijazah SD</u></b>				
<i>Laki-laki</i>	2,3	2,95	2,95	3,02
<i>Perempuan</i>	6,18	5,5	4,87	4,64
<i>Total</i>	4,24	4,24	3,91	3,83
<b><u>SD/sederajat</u></b>				
<i>Laki-laki</i>	12,84	11,34	10,57	10,54
<i>Perempuan</i>	16,75	14,87	15,07	13,3
<i>Total</i>	14,8	13,13	12,82	11,92
<b><u>SMP/sederajat</u></b>				
<i>Laki-laki</i>	20,86	19,13	19,47	16,74
<i>Perempuan</i>	21,66	20,58	20,79	18,79
<i>Total</i>	21,26	19,86	20,13	17,77

<b><u>SMA/ sederajat</u></b>				
<i>Laki-laki</i>	40,13	37,51	42,72	43,03
<i>Perempuan</i>	30,5	31,33	36,55	38,52
<i>Total</i>	35,31	34,39	39,63	40,78
<b><u>SMK/MAK</u></b>				
<i>Laki-laki</i>	10,52	12,03	5,66	8,44
<i>Perempuan</i>	10,71	10,24	6,14	7,11
<i>Total</i>	10,61	11,12	5,9	7,78
<b><u>Diploma 1-4/S 1-3</u></b>				
<i>Laki-laki</i>	13,35	17,04	18,63	18,23
<i>Perempuan</i>	14,2	17,48	16,58	17,64
<i>Total</i>	13,78	17,26	17,61	17,92

Sumber: Susenas Maret 2021-2022

Tabel 3.5  
Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kota Jakarta Barat dan Provinsi DKI Jakarta, 2018-2022 (Tahun)

<b>Wilayah</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>
<i>Jakarta Barat</i>	10,38	10,4	10,63	10,78	11,13
<i>DKI Jakarta</i>	11,05	11,06	11,13	11,17	11,31

Sumber: Indeks Pembangunan Manusia, BPS

Tabel 3.6  
Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Jakarta Barat dan Provinsi DKI Jakarta, 2018-2022 (Tahun)

<b>Wilayah</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>
<i>Jakarta Barat</i>	12,78	12,79	12,8	12,81	12,82
<i>DKI Jakarta</i>	12,95	12,97	12,98	13,07	13,08

Sumber: Indeks Pembangunan Manusia, BPS



# BAB



**Pendidikan**

---

# 4





# "Turunnya tingkat pengangguran terbuka Kota Jakarta Barat

menjadi kabar yang sangat baik dan pemerintah terus berupaya menekan angka pengangguran pasca pandemi."

## BAB IV



# KETENAGAKERJAAN

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Administrasi Jakarta Barat

2020

64,37

2021

63,21

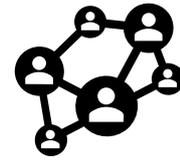




## BAB IV

### KETENAGAKERJAAN

---



Pembangunan manusia pada dasarnya ditujukan kepada manusia (*People-Centered-Development*). Oleh karena itu, setiap upaya pembangunan selalu diarahkan kepada manusia baik sebagai objek maupun subjeknya. Aspek yang amat mendasar dalam kehidupan manusia adalah ketenagakerjaan karena ketenagakerjaan tidak hanya berpengaruh pada dimensi ekonomi, tetapi juga menyangkut dimensi sosial.

Dimensi ekonomi menjelaskan kebutuhan manusia akan pekerjaan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, sedangkan dimensi sosial berkaitan dengan pengakuan masyarakat terhadap kemampuan individu.

Perkembangan jumlah penduduk, sebagai akibat adanya perubahan tingkat kelahiran, kematian dan mobilitas penduduk mempengaruhi struktur penduduk menurut umur. Hal ini berdampak pula pada meningkatnya usia kerja dan angkatan kerja. Sebagai konsekuensinya, pembangunan di bidang ketenagakerjaan selayaknya berorientasi pada penciptaan lapangan kerja, perluasan kesempatan kerja dan kemampuan berusaha. Hal ini dimaksudkan untuk menampung ledakan penduduk usia produktif yang masuk dalam angkatan kerja. Adanya peningkatan dan perluasan kesempatan kerja serta kesempatan berusaha diharapkan berimplikasi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan.

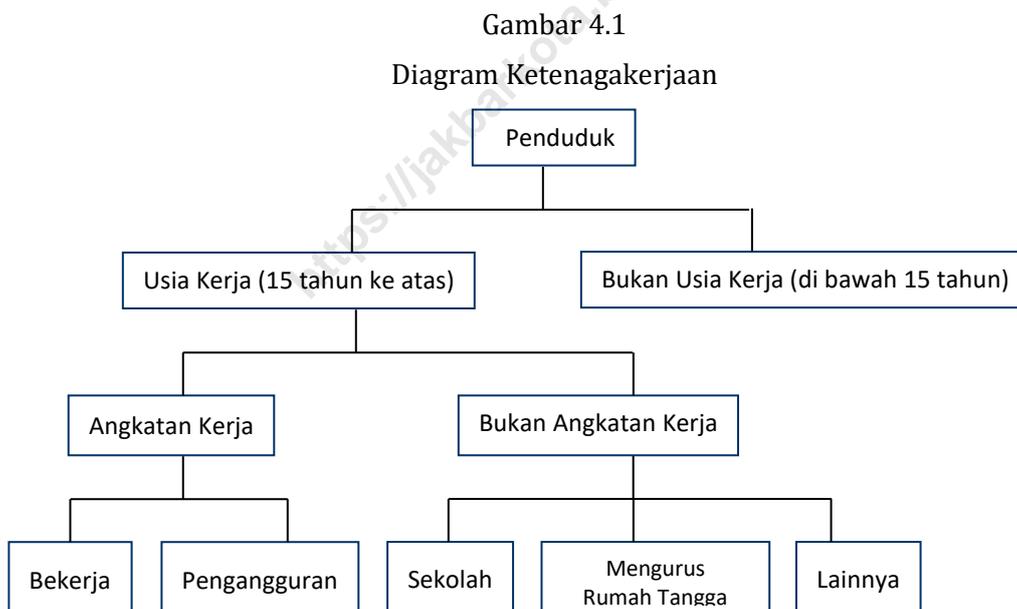
Datangnya pandemi COVID-19 pada tahun 2021, membuat pemerintah harus mencari jalan terbaik, mengutamakan kesehatan tanpa mengabaikan perputaran kegiatan ekonomi dan sosial. Pemberlakuan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dipilih oleh pemerintah dalam rangka mencegah meluasnya penyebaran COVID-19. Tentunya kebijakan ini sangat disadari akan mengurangi aktivitas usaha/perusahaan yang dapat berimplikasi terhadap pengurangan tenaga kerja maupun produktivitas

tenaga kerja dengan adanya pengurangan jam kerja.

Untuk melihat sejauh mana hasil pembangunan bidang ketenagakerjaan dan bagaimana dampak pandemi COVID-19 di DKI Jakarta, diperlukan informasi yang akurat dan mutakhir mengenai keadaan ketenagakerjaan. Hal tersebut dapat dilihat dengan menggunakan beberapa indikator ketenagakerjaan, seperti komposisi penduduk menurut jenis kegiatan, penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan dan status pekerjaan serta jumlah pencari kerja.

#### 4.1. Konsep dan Definisi Ketenagakerjaan

Konsep dan definisi yang digunakan dalam pengumpulan data ketenagakerjaan oleh Badan Pusat Statistik adalah *The Labor Force Concept* yang disarankan oleh *International Labor Organization (ILO)*. Konsep ketenagakerjaan digambarkan oleh diagram ketenagakerjaan sebagai berikut:



Sumber: Sakernas, BPS

Penduduk dibagi menjadi dua kelompok, yaitu penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Penduduk usia kerja adalah mereka yang berusia 15 tahun ke atas, sedangkan bukan usia kerja adalah mereka yang berusia di bawah 15 tahun (UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003). Penduduk usia kerja dibagi ke dalam dua kelompok yaitu angkatan kerja dan

bukan angkatan kerja. Penduduk yang tergolong angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang aktif secara ekonomi.

Struktur penduduk dalam kelompok angkatan kerja mencakup penduduk yang kegiatan utamanya bekerja dan mencari pekerjaan. Sedangkan penduduk yang masuk dalam kelompok bukan angkatan kerja adalah penduduk yang kegiatan utamanya sekolah, mengurus rumah tangga dan kegiatan lainnya (pensiunan, orang jompo, orang cacat, penerima pendapatan dan lainnya). Penduduk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang tidak aktif secara ekonomi.

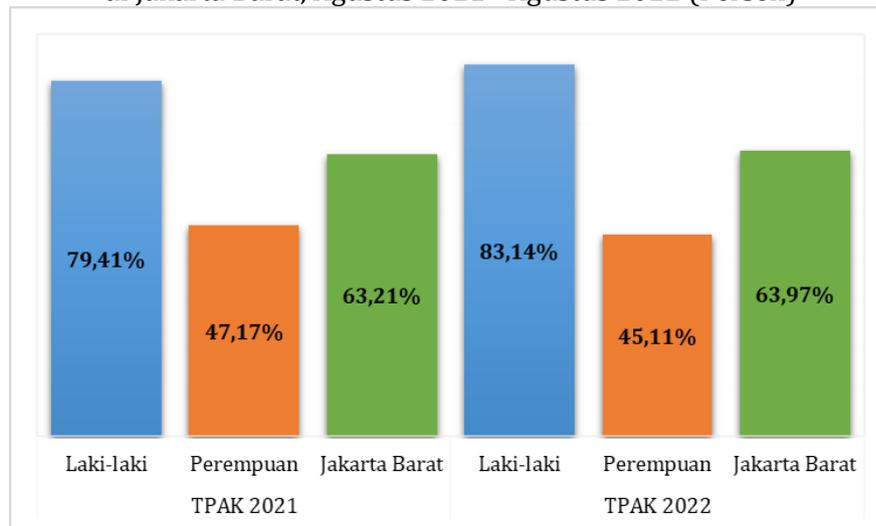
#### **4.2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja**

Tingkat partisipasi angkatan kerja adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survei. Salah satu indikator yang dapat menggambarkan partisipasi angkatan kerja adalah *General Economic Activity Ratio* (Rasio Aktivitas Ekonomi Umum) atau biasa disebut Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK merupakan perbandingan jumlah angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Indikator ini menggambarkan persediaan tenaga kerja dalam pasar kerja dan biasa digunakan untuk menganalisa partisipasi angkatan kerja.

Pada Agustus 2022, TPAK Kota Jakarta Barat mencapai 63,97 persen, mengalami kenaikan dari tahun 2021. Hal ini memberikan informasi bahwa dari 100 orang penduduk usia kerja, hampir 64 orang diantaranya adalah angkatan kerja, sedangkan sekitar 36 persen adalah bukan angkatan kerja.

Jika dicermati menurut jenis kelamin (Gambar 4.2), selama periode Agustus 2021 - Agustus 2022, TPAK laki-laki mengalami kenaikan sebanyak 3,73 persen sementara perempuan turun sebesar 2,06 persen.

Gambar 4.2  
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja menurut Jenis Kelamin  
di Jakarta Barat, Agustus 2021 - Agustus 2022 (Persen)

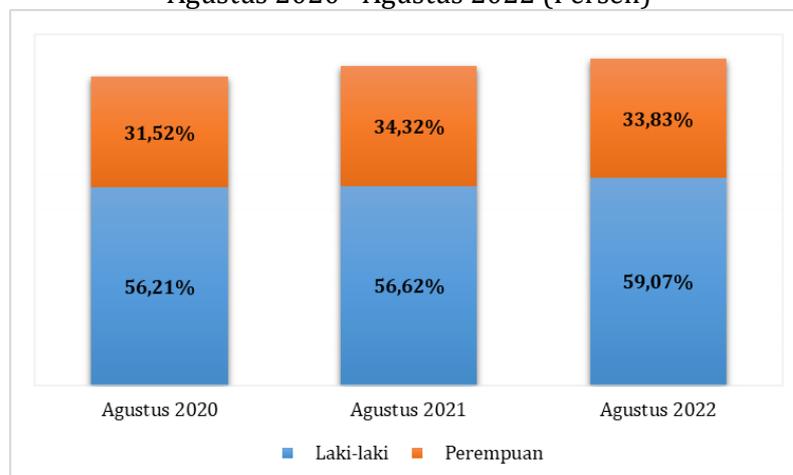


Sumber : Sakernas Agustus, 2021-2022

### 4.3. Tingkat Kesempatan Kerja

Tingkat kesempatan kerja adalah peluang penduduk usia kerja yang termasuk angkatan kerja untuk bekerja. Tingkat kesempatan kerja menggambarkan kesempatan seseorang untuk masuk pada pasar kerja. Indikator yang biasa digunakan adalah Tingkat Kesempatan Kerja (TKK). TKK merupakan perbandingan jumlah penduduk bekerja terhadap jumlah angkatan kerja.

Gambar 4.3  
Tingkat Kesempatan Kerja Menurut Jenis Kelamin di Jakarta Barat,  
Agustus 2020 - Agustus 2022 (Persen)



Sumber : Sakernas Agustus, 2020-2022

Pada Agustus 2022, peluang seorang penduduk usia kerja yang termasuk angkatan kerja untuk bekerja mencapai 92,90 persen, lebih tinggi dari tahun 2021. Hal ini memberikan informasi bahwa dari 100 orang angkatan kerja, sebanyak 92 hingga 93 orang diantaranya adalah penduduk bekerja, sedangkan sisanya penduduk yang mencari kerja. Selama periode Agustus 2020 - Agustus 2022, TTK cenderung terus meningkat, dimana pada TTK laki-laki mengalami peningkatan konsisten sementara TTK Perempuan pada tahun 2022 sedikit menurun 0,49 persen poin.

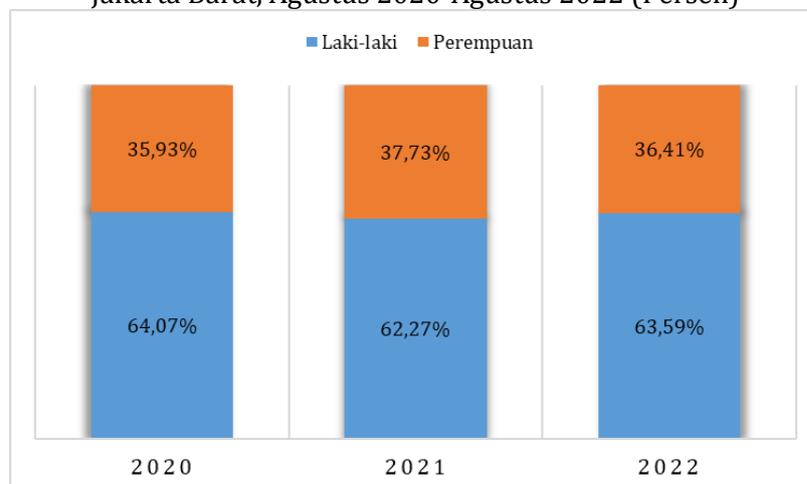
#### 4.4. Penduduk Bekerja

Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang paling sedikit satu jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu, dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan. Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan penduduk yang bekerja dengan status pekerja keluarga tanpa upah yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.

##### 4.4.1. Penduduk Bekerja menurut Jenis Kelamin

Analisis mengenai penduduk bekerja menurut jenis kelamin dilakukan untuk mengetahui komposisi atau dominasi pekerja suatu wilayah menurut jenis kelamin.

Gambar 4.4  
Persentase Penduduk Bekerja terhadap Total Pekerja menurut Jenis Kelamin di Jakarta Barat, Agustus 2020-Agustus 2022 (Persen)



Sumber : Sakernas Agustus, 2020-2022

Pada Agustus 2022, komposisi pekerja didominasi oleh laki-laki dengan proporsi sebesar 63,59 persen. Namun jika diperhatikan komposisi pekerja perempuan pada Agustus 2022 ini turun menjadi 36,41 persen dari tahun sebelumnya sebesar 37,73 persen.

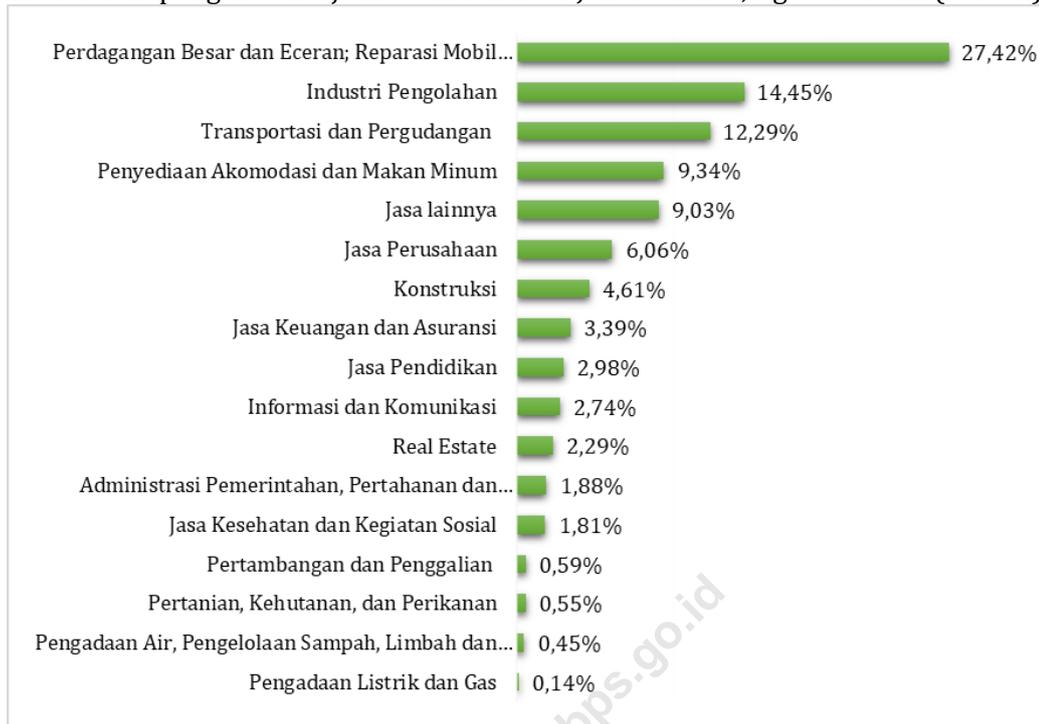
#### **4.4.2. Penduduk Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama**

Analisa mengenai penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama dilakukan untuk mengetahui lapangan usaha yang banyak menyerap tenaga kerja. Pada Tabel 4.5, terlihat jumlah penduduk bekerja selama Agustus 2022 sebagian besar terserap ke dalam lapangan usaha Perdagangan; Industri Pengolahan; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makanan dan Minuman; dan Jasa lainnya yang masing-masing memiliki persentase lebih dari 9 persen. Selama periode tersebut, kelima lapangan usaha ini mampu menyerap 72,53 persen penduduk bekerja di Kota Jakarta Barat, sedangkan sisanya terserap ke dalam lapangan usaha lainnya.

Pada Agustus 2022, lapangan usaha yang menjadi sandaran hidup paling utama penduduk Kota Jakarta Barat adalah Perdagangan yang mampu menyerap seperempat penduduk bekerja yaitu sekitar 27,42 persen. Dampak COVID-19 yang menyebabkan adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) di beberapa perusahaan, turut menyebabkan pergeseran porsi lapangan usaha. Dimana orang yang di PHK sebagian berusaha untuk tetap bekerja namun di lapangan usaha yang lain. Perdagangan menjadi salah satu pilihan.

Lapangan usaha Perdagangan, merupakan penyerap tenaga kerja terbesar untuk penduduk Kota Jakarta Barat dalam berusaha atau memperoleh pendapatan. Selain itu, sektor perdagangan juga merupakan pilihan yang mempunyai peluang terbesar, baik yang bersifat formal maupun informal serta mampu menampung penduduk bekerja yang mempunyai kualifikasi pendidikan rendah dan *skill* yang kurang memadai.

**Gambar 4.5**  
**Persentase Penduduk Bekerja terhadap Total Pekerja**  
**menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Kota Jakarta Barat, Agustus 2022 (Persen)**



Sumber : Sakernas Agustus, 2022

Lapangan usaha kedua yang menjadi sandaran hidup penduduk Kota Jakarta Barat adalah Industri Pengolahan dimana pada Agustus 2022 mampu menyerap 14,45 persen penduduk bekerja di Kota Jakarta Barat. Selanjutnya, berkembang pesatnya penggunaan transportasi *online* dan pengiriman barang turut memberikan dampak penyerapan tenaga kerja di sektor tersebut. Kondisi ini menyebabkan sektor transportasi dan pergudangan menduduki peringkat ke tiga sebagai lapangan usaha yang menyerap banyak tenaga kerja di Kota Jakarta Barat.

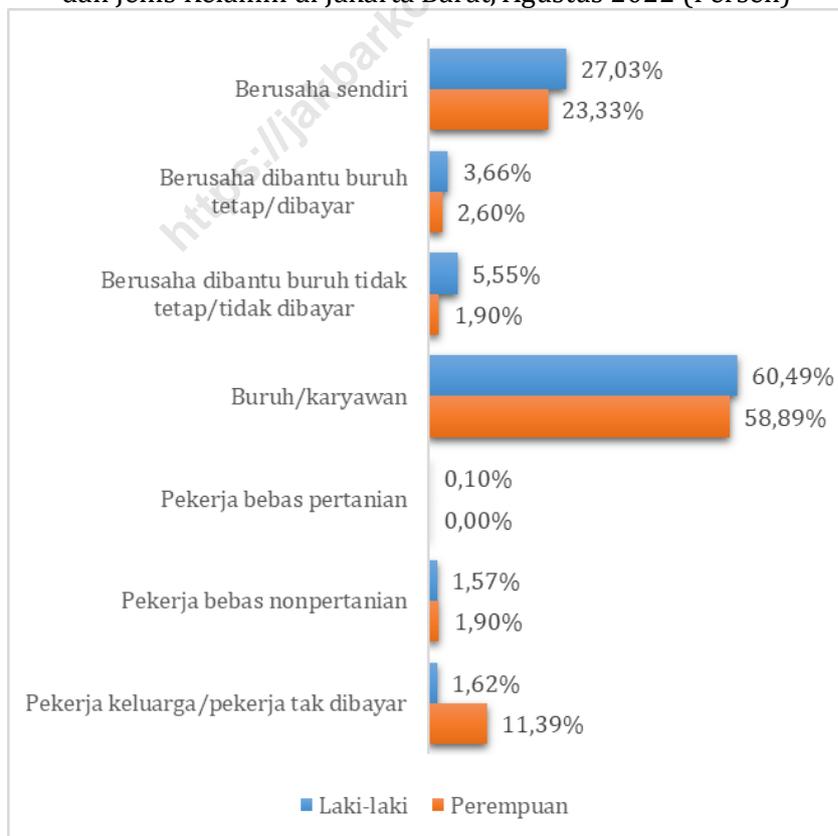
#### 4.4.3. Penduduk Bekerja menurut Status Pekerjaan Utama

Status pekerjaan adalah kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha. Berdasarkan status pekerjaan, penduduk bekerja digolongkan ke dalam berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tetap, berusaha dibantu buruh tidak tetap, buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas dan pekerja keluarga/tidak dibayar.

Pada Gambar 4.6, terlihat bahwa selama Agustus 2022 menurut status pekerjaan utama dan jenis kelamin. Secara umum, struktur status pekerjaan utama baik laki-laki dan perempuan memiliki pola yang sama. Buruh/karyawan masih mendominasi penduduk yang bekerja di Kota Jakarta Barat tahun 2022 baik laki-laki dan perempuan masing-masing sebesar 60,49 dan 58,89 persen. Selain menjadi buruh/karyawan, pekerja di Kota Jakarta Barat tahun 2022 baik laki-laki dan perempuan juga didominasi dengan berusaha sendiri yang mencapai lebih dari 20 persen.

Perbedaan yang paling mencolok antara laki-laki dan perempuan di Kota Jakarta Barat yaitu pada status pekerja keluarga atau tak dibayar. Perempuan yang biasanya menjadi ibu rumah tangga seringkali menjadi pekerja keluarga yang tidak dibayar karena dianggap tidak memiliki kegiatan pekerjaan.

Gambar 4.6  
Persentase Penduduk Bekerja menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Jakarta Barat, Agustus 2022 (Persen)



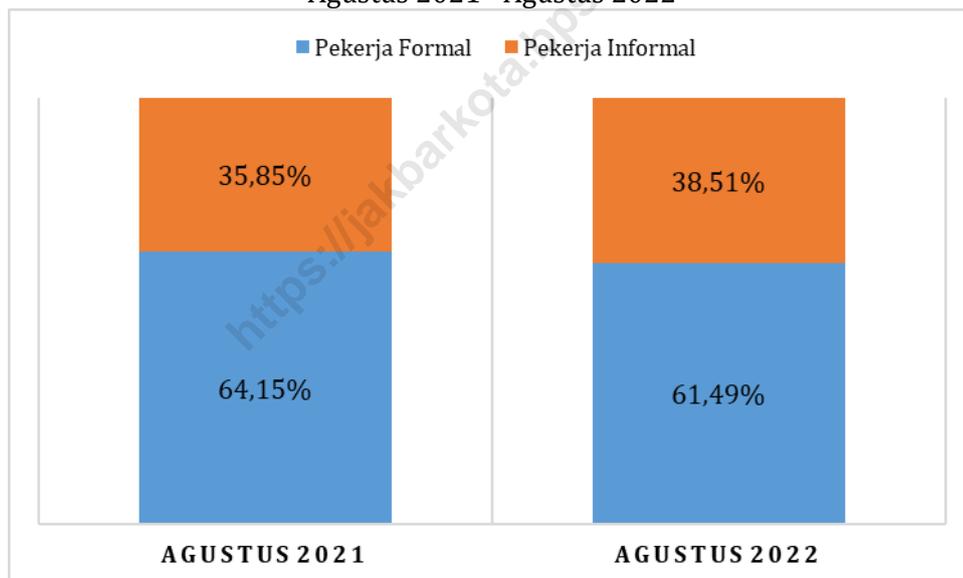
Sumber : Sakernas Agustus, 2022

#### 4.4.4. Pekerja Formal dan Informal

Pekerja berstatus buruh/karyawan/pegawai dan berusaha dibantu buruh tetap biasanya digolongkan ke dalam pekerja sektor formal, sedangkan pekerja berstatus berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap, pekerja bebas dan pekerja keluarga/tidak dibayar digolongkan ke dalam sektor informal.

Tingginya persentase orang yang bekerja dengan status buruh/karyawan/pegawai bila dibandingkan dengan status pekerjaan lain menyebabkan porsi pekerja formal masih lebih besar dibandingkan pekerja informal. Hal ini juga menunjukkan banyaknya keberadaan usaha berskala besar yang mendukung perekonomian di Kota Jakarta Barat.

Gambar 4.7  
Persentase Pekerja Formal dan Informal di Jakarta Barat,  
Agustus 2021 - Agustus 2022



Sumber : Sakernas Agustus, 2021-2022

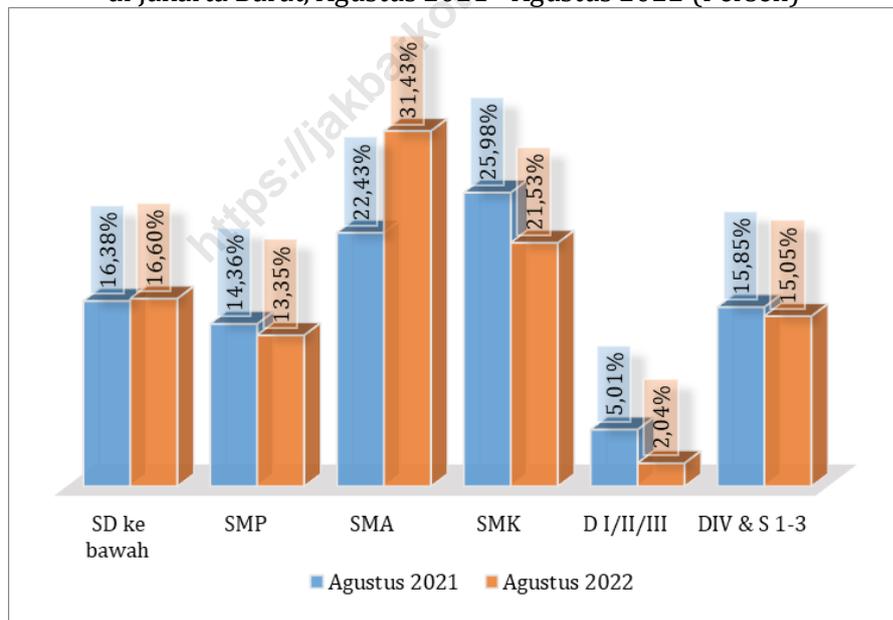
Pekerja formal baik pada Agustus 2022 dan 2021 di Kota Jakarta Barat masih mendominasi dibandingkan informal. Lebih dari 60 persen dari pekerja di Kota Jakarta Barat merupakan pekerja formal. Pekerja formal pada Agustus 2022 mengalami penurunan dibandingkan Agustus 2021 sebesar minus 2,66 persen poin. Sebaliknya, pekerja informal pada Agustus 2022 mengalami peningkatan.

#### 4.4.5. Penduduk Bekerja menurut Pendidikan

Berdasarkan pendidikan yang ditamatkan, penduduk bekerja di Kota Jakarta Barat baik pada Agustus 2022 dan 2021 secara umum memiliki pola. Pola tersebut ditunjukkan dari penduduk bekerja didominasi lulusan pendidikan SMA/ sederajat (SMA Umum dan SMA Kejuruan). Pada Agustus 2022 persentase lulusan SMA Umum dan SMA Kejuruan mencapai masing-masing sebesar 31,43 dan 21,53 persen dan 22,43 dan 25,98 persen pada Agustus 2021.

Penduduk bekerja di Kota Jakarta Barat dengan pendidikan SMP ke bawah (SMP dan SD ke bawah) menduduki peringkat selanjutnya. Tercatat, pada tahun 2022, penduduk dengan lulusan SD ke bawah lebih banyak dibandingkan lulusan SMP yang masing-masing mencapai 16,60 dan 13,35 persen.

Gambar 4.8  
Persentase Penduduk Bekerja menurut Pendidikan  
di Jakarta Barat, Agustus 2021 - Agustus 2022 (Persen)



Sumber : Sakernas Agustus, 2021-2022

Menariknya, pekerja dengan pendidikan tinggi (Diploma dan Sarjana) di Kota Jakarta Barat menunjukkan persentase yang kecil. Selain itu, persentase pekerja dengan lulusan Diploma dan Sarjana tahun 2022 menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Pada Gambar 4.6, terlihat bahwa pada

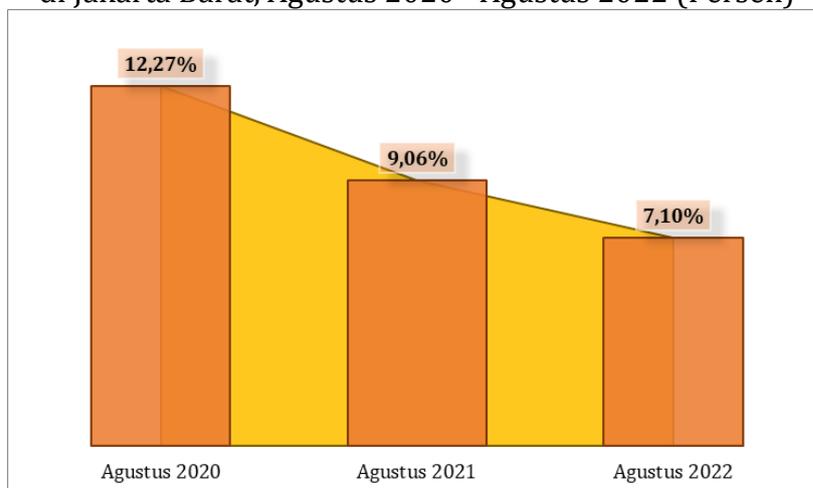
Agustus 2022, persentase pekerja dengan pendidikan tinggi di Kota Jakarta Barat sebesar 17,09 persen menurun dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 20,86 persen.

#### 4.5. Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka (*open unemployment rate*) merupakan perbandingan antara pencari kerja dengan jumlah angkatan kerja. Indikator ini memberikan informasi tentang jumlah angkatan kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. Selain pencari kerja, yang juga termasuk pengangguran adalah mereka yang tidak bekerja, tetapi sedang mempersiapkan usaha, mereka yang sudah mendapat pekerjaan tetapi belum mulai bekerja atau mereka yang merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan tetapi mau menerima tawaran pekerjaan.

Pada Gambar 4.8, terlihat bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Jakarta Barat selama tiga tahun terakhir menunjukkan penurunan tiap tahunnya. TPT pada Agustus 2020 yang meningkat akibat pandemi COVID-19 berangsur menurun pada tahun 2021 sebesar 3,21 persen poin. Kondisi ini menunjukkan pemulihan ekonomi yang sedang berjalan dengan TPT kembali turun pada tahun 2022 hingga mencapai 7,10 persen.

Gambar 4.9  
Tingkat Pengangguran Terbuka  
di Jakarta Barat, Agustus 2020 - Agustus 2022 (Persen)



Sumber : Sakernas Agustus, 2020-2022

Tabel 4.1  
Keadaan Ketenagakerjaan Jakarta Barat, Agustus 2020 - Agustus 2022

<b>Keadaan Ketenagakerjaan</b>	<b>Jakarta Barat</b>		
	<b>Agustus 2020</b>	<b>Agustus 2021</b>	<b>Agustus 2022</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
<i>Penduduk Usia Kerja (orang)</i>	2.033.228	2.054.557	2.074.595
<i>Angkatan Kerja (orang)</i>	1.308.798	1.298.775	1.327.171
<i>Bekerja (orang)</i>	1.148.244	1.181.095	1.232.966
<i>Laki-laki</i>	735.712	735.417	784.021
<i>Perempuan</i>	412.532	445.678	448.945
<i>Pengangguran (orang)</i>	160.554	117.680	94.205
<i>Bukan Angkatan Kerja (orang)</i>	724.430	755.782	747.424
<i>Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)</i>	64,37	63,21	63,97
<i>Tingkat Kesempatan Kerja (%)</i>	56,47	57,49	59,43
<i>Tingkat Pengangguran Terbuka (%)</i>	12,27	9,06	7,10

Sumber: Sakernas Agustus, 2020-2022

Tabel 4.2  
 Persentase Penduduk Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama  
 di Kota Jakarta Barat, Agustus 2022 (Persen)

Lapangan Usaha/ Sektor		Agustus 2022 (%)
(1)		(2)
1	<i>Pertanian, Kehutanan dan Perikanan</i>	0,55
2	<i>Pertambangan dan Penggalian</i>	0,59
3	<i>Industri Pengolahan</i>	14,45
4	<i>Pengadaan Listrik dan Gas</i>	0,14
5	<i>Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang</i>	0,45
6	<i>Konstruksi</i>	4,61
7	<i>Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil</i>	27,42
8	<i>Transportasi dan Pergudangan</i>	12,29
9	<i>Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum</i>	9,34
10	<i>Informasi dan Komunikasi</i>	2,74
11	<i>Jasa Keuangan dan Asuransi</i>	3,39
12	<i>Real Estate</i>	2,29
13	<i>Jasa Perusahaan</i>	6,06
14	<i>Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib</i>	1,88
15	<i>Jasa Pendidikan</i>	2,98
16	<i>Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial</i>	1,81
17	<i>Jasa Lainnya</i>	9,03
<b>Jumlah</b>		<b>100,00</b>

Sumber: Sakernas Agustus, 2022

Tabel 4.3  
 Persentase Penduduk Bekerja menurut Status Pekerjaan Utama  
 dan Jenis Kelamin di Kota Jakarta Barat, Agustus 2022 (Persen)

Status Pekerjaan Utama	Agustus 2022	
	Laki-Laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)
1. Berusaha sendiri	27,03	23,33
2. Berusaha dibantu buruh tidak tetap/ buruh tidak dibayar	3,66	2,60
3. Berusaha dibantu buruh tetap/ buruh dibayar	5,55	1,90
4. Buruh/karyawan/pegawai	60,49	58,89
5. Pekerja bebas di Pertanian	0,10	0,00
6. Pekerja bebas di non Pertanian	1,57	1,90
6. Pekerja keluarga/tak dibayar	1,62	11,39
<b>Jumlah</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Sakernas Agustus, 2022

Tabel 4.4  
 Persentase Penduduk Bekerja menurut Pendidikan  
 di Kota Jakarta Barat, Agustus 2021- Agustus 2022 (Persen)

<b>Pendidikan</b>	<b>Agustus 2021</b>	<b>Agustus 2022</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>
<i>SD ke bawah</i>	20,90	16,60
<i>SMP</i>	17,92	13,35
<i>SMA Umum</i>	21,60	31,43
<i>SMA Kejuruan</i>	24,47	21,53
<i>Diploma I/II/III</i>	3,26	2,04
<i>Diploma IV/S1/S2/S3</i>	11,85	15,05

*Sumber : Sakernas Agustus, 2021-2022*

Tabel 4.5  
 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Jakarta Barat,  
 Agustus 2020 - Agustus 2022 (Persen)

<b>Tahun</b>	<b>Tingkat Pengangguran Terbuka</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>
<i>Agustus 2020</i>	12,27
<i>Agustus 2021</i>	9,06
<i>Agustus 2022</i>	7,10

*Sumber : Sakernas Agustus, 2020-2022*

# B BAB



**Kesehatan**

---

**5**





## BAB V

# "Imunisasi adalah upaya pemberian kekebalan tubuh balita

terhadap suatu penyakit dengan vaksin sehingga balita memiliki daya tahan terhadap suatu jenis penyakit yang sedang mewabah."



## KESEHATAN

### KISAH JIMMI DAN AYESHA



"Ibu, Jimmi tidak mau pergi imunisasi."

"Ibu, Ayesha takut disuntik, huhu."



"Jimmi dan Ayesha sayang, tidak apa-apa... tidak sakit sama sekali kok, cuma seperti digigit semut."

"Pemberian imunisasi dasar pada balita **belum mencapai 95 persen**, terutama imunisasi campak/morbili yang masih di bawah 75 persen."

"Tentunya, **kepedulian orang tua** mengenai pentingnya imunisasi anak khususnya balita masih perlu ditingkatkan."







Salah satu dimensi penting dalam kesejahteraan adalah kualitas fisik penduduk yang dapat dilihat dari derajat kesehatan penduduk. Tingkat kesehatan merupakan indikator penting untuk menggambarkan mutu pembangunan manusia suatu wilayah. Semakin tinggi derajat kesehatan masyarakat, maka akan semakin mendukung proses dan dinamika pembangunan ekonomi suatu negara/wilayah menjadi semakin baik, khususnya dalam meningkatkan produktivitas.

Berkaitan dengan pembangunan kesehatan, pemerintah sudah melakukan berbagai program kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya memberikan kemudahan akses pelayanan publik. Implementasi pembangunan di bidang kesehatan secara fisik terlihat pada pembangunan prasarana fisik dan penyediaan tenaga kesehatan. Upaya ini dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan kesehatan masyarakat secara menyeluruh dalam rangka menurunkan angka kesakitan masyarakat, angka kematian ibu dan bayi, prevalensi gizi buruk dan gizi kurang, serta meningkatkan Angka Harapan Hidup. Keberadaan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan adanya tenaga kesehatan bidan/penolong persalinan akan mempengaruhi tingkat kesehatan masyarakat di sekitarnya dan factor yang mempengaruhi tinggi rendahnya angka kematian ibu dan bayi. Tenaga kesehatan tersebut harus memiliki kompetensi yang baik dan didistribusikan secara merata ke seluruh wilayah. Dengan demikian, semua lapisan masyarakat mempunyai akses yang sama terhadap pelayanan kesehatan yang relative mudah, murah dan merata.

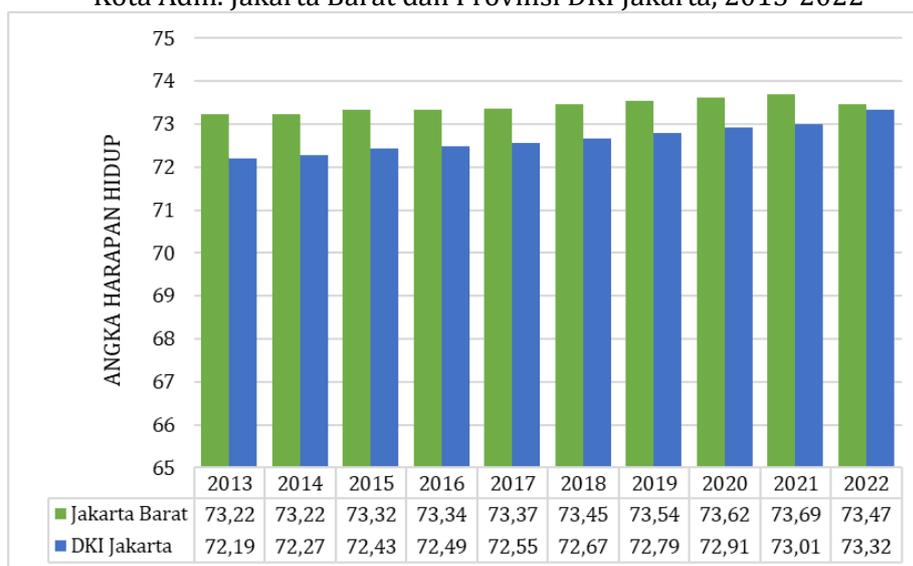
Selain memperluas akses kesehatan bagi seluruh masyarakat secara fisik dengan adanya fasilitas kesehatan berupa Puskesmas dan tenaga kesehatan, perluasan akses kesehatan juga mencakup aspek keterjangkauan secara finansial. Untuk itu, pemerintah telah memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi penduduk yang kurang mampu serta menyediakan obat-obatan yang terjangkau oleh masyarakat.

Capaian upaya-upaya yang telah dilakukan dalam bidang kesehatan dapat diukur dengan beberapa indikator kesehatan antara lain perkembangan angka harapan hidup, angka kesakitan (morbiditas), rata-rata lama sakit, dan indikator lain yang berkaitan dengan akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan seperti persentase balita yang bersalinannya ditolong oleh tenaga medis, persentase penduduk yang berobat jalan ke rumah sakit, dokter/klinik, puskesmas, dan lainnya.

### 5.1 Derajat dan Status Kesehatan Penduduk

Tingkat kesehatan di suatu wilayah salah satunya dapat dilihat dari besarnya Angka Harapan Hidup (AHH) penduduknya. AHH yang lebih sering dikaji adalah AHH penduduk saat lahir. AHH saat lahir didefinisikan sebagai suatu perkiraan rata-rata lamanya hidup sejak lahir yang akan dicapai oleh penduduk. AHH merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. AHH yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

Gambar 5.1  
Angka Harapan Hidup Saat Lahir  
Kota Adm. Jakarta Barat dan Provinsi DKI Jakarta, 2013-2022



Sumber: Indeks Pembangunan Manusia, BPS

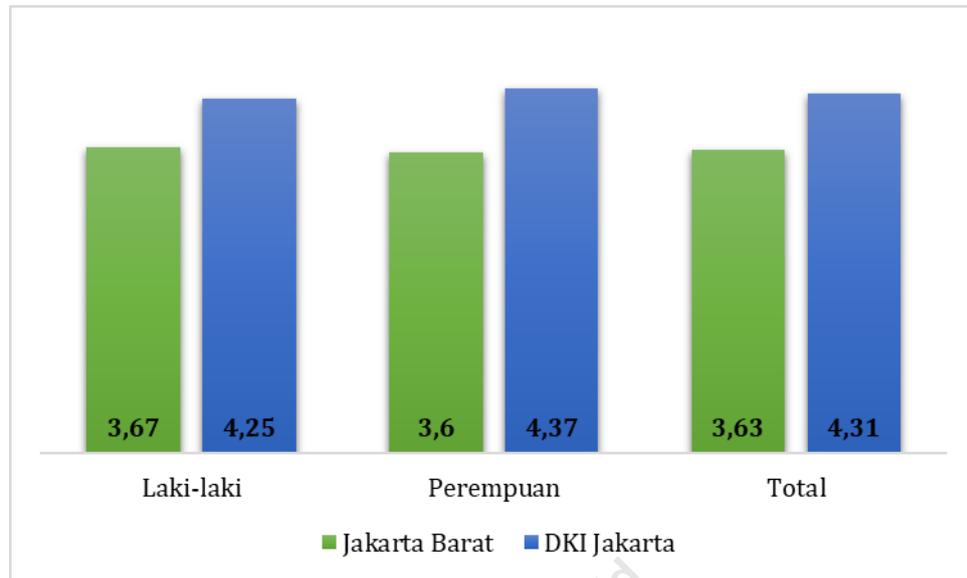
Tren angka harapan hidup saat lahir dari tahun 2013-2021 cenderung meningkat. Namun, pada tahun 2022 terjadi penurunan angka harapan hidup di Kota Adm. Jakarta Barat, dengan AHH tahun 2021 sebesar 73,69 menjadi 73,47 di tahun 2022, yang artinya bayi-bayi yang dilahirkan pada tahun 2022 diperkirakan akan dapat tetap hidup sampai usia 73 atau 74 tahun. Walaupun mengalami penurunan, perkiraan usia ini tetap berkisar di angka 73 hingga 74 tahun. Jika dibandingkan dengan AHH Provinsi DKI Jakarta, AHH Kota Jakarta Barat selalu melebihi AHH Provinsi DKI Jakarta. Walaupun begitu, AHH Provinsi DKI Jakarta terus mengalami peningkatan hingga tahun 2022.

Peningkatan angka harapan hidup menunjukkan harapan bayi yang baru lahir untuk hidup semakin besar karena membaiknya derajat kesehatan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh kemajuan teknologi di bidang kesehatan, peningkatan sarana dan prasarana Kesehatan serta kepedulian masyarakat terhadap gaya hidup sehat yang meningkat.

Selain AHH, indikator yang menggambarkan derajat dan status kesehatan penduduk adalah Angka Kesakitan (Morbiditas). Merujuk pada konsep yang diterapkan pada Susenas, Morbiditas menunjukkan adanya keluhan kesehatan yang mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari, baik dalam melakukan pekerjaan, bersekolah, mengurus rumah tangga, maupun aktivitas lain. Sementara yang dimaksud dengan keluhan Kesehatan adalah keadaan seseorang merasa terganggu oleh kondisi kesehatan, kejiwaan, kecelakaan dan hal lain, termasuk juga mereka yang menderita penyakit kronis tetapi telah sembuh.

Kesehatan merupakan kebutuhan vital bagi setiap manusia sebab bila Kesehatan terjamin, manusia dapat melakukan aktivitas sehari-hari dengan baik, begitu pula sebaliknya. Semakin banyak penduduk yang mengalami keluhan Kesehatan menggambarkan semakin rendahnya derajat kesehatan di wilayah tersebut.

Gambar 5.2  
Angka Morbiditas Penduduk  
Kota Jakarta Barat dan Provinsi DKI Jakarta, 2022 (Persen)

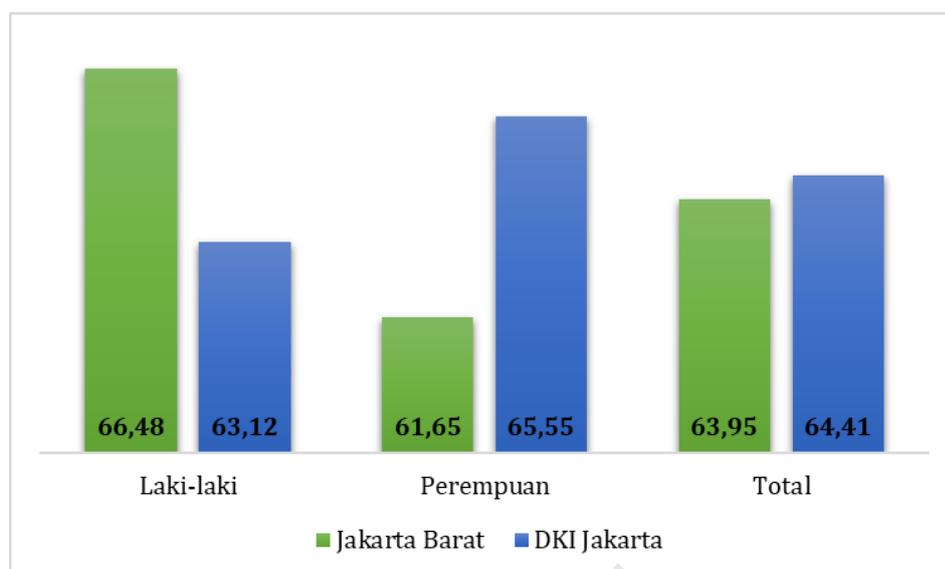


Sumber: Susenas Maret 2022, BPS

Hasil Susenas tahun 2022 menunjukkan Angka Kesakitan penduduk Kota Adm. Jakarta Barat mencapai 3,63. Angka kesakitan merupakan persentase penduduk yang menderita sakit selama sebulan terakhir. Angka Kesakitan penduduk perempuan tahun 2022 lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki, masing-masing sebesar 3,6 dan 3,67 persen, berbeda dengan tahun 2021 yang justru lebih tinggi perempuan dibandingkan laki-laki.

Angka morbiditas Kota Jakarta Barat cukup memiliki perbedaan yang besar di masing-masing jenis kelamin jika dibandingkan dengan Provinsi DKI Jakarta. Angka morbiditas Provinsi DKI Jakarta secara keseluruhan menyentuh 4,31 persen. Namun, dengan angka kesakitan Kota Jakarta Barat yang lebih rendah dari Provinsi DKI Jakarta, tidak dapat dikatakan bahwa kondisi ini sudah baik. Tentunya angka morbiditas perlu untuk terus ditekan di setiap tahunnya.

Gambar 5.3  
Penduduk yang Berobat Jalan Menggunakan Jaminan Kesehatan  
Kota Jakarta Barat dan Provinsi DKI Jakarta, 2022 (Persen)



Sumber: Susenas Maret 2022, BPS

Sementara itu, persentase penduduk yang berobat jalan dengan menggunakan jaminan kesehatan merupakan salah satu indikator yang menunjukkan gambaran mengenai kesadaran penduduk dalam menggunakan fasilitas kesehatan oleh penduduk suatu wilayah. Pada tahun 2022, secara rata-rata penduduk Kota Adm. Jakarta Barat yang menggunakan jaminan Kesehatan sebanyak 63,95 persen. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, persentase penduduk laki-laki Kota Jakarta Barat yang melakukan rawat jalan dengan memanfaatkan jaminan kesehatan justru lebih banyak dibandingkan persentase penduduk perempuan, yaitu mencapai 66,48 persen.

## 5.2 Tingkat Imunitas dan Gizi Balita

Imunisasi sangat diperlukan bagi perkembangan dan peningkatan kekebalan serta daya tahan tubuh balita terhadap suatu penyakit. Kekebalan terhadap penyakit ada yang bersifat alami (bawaan sejak lahir) dan buatan (melalui vaksin). Imunisasi adalah upaya pemberian kekebalan tubuh balita terhadap suatu penyakit dengan cara memasukkkan/meneteskan vaksin ke dalam tubuh sehingga balita memiliki daya tahan terhadap suatu jenis penyakit yang sedang mewabah. Selain itu, tujuan diberikannya imunisasi

pada anak adalah agar bayi yang relatif masih rentan terhadap penyakit dapat terhindar dari penyakit berbahaya, kecacatan atau kematian.

Perhatian pemerintah terhadap kesehatan balita melalui imunisasi dapat dilihat dari pemberian Lima Imunisasi Dasar Lengkap (LIL) di puskesmas yaitu Hepatitis B, BCG, Polio, DPT serta campak/morbili sebelum usia 1 tahun. Anak yang mendapat imunisasi dasar lengkap akan terlindungi dari beberapa penyakit berbahaya dan akan mencegah penularan kepada orang di sekitarnya.

Kepedulian orang tua di Kota Jakarta Barat mengenai pentingnya imunisasi bagi anak khususnya balita dapat dikatakan masih perlu ditingkatkan. Hal ini dapat dilihat dari persentase pemberian imunisasi dasar pada balita yang belum mencapai 95 persen. Jenis imunisasi yang paling banyak dilakukan adalah BCG sebesar 84,06 persen. Sedangkan imunisasi campak/morbili masih kurang, yaitu di bawah angka 75 persen.

Berdasarkan jenis kelamin, terlihat bahwa terdapat perbedaan yang cukup berarti antara pemberian imunisasi pada balita laki-laki dan perempuan. Pada balita laki-laki, capaian pemberian imunisasi lebih rendah dibanding balita perempuan pada hampir seluruh jenis imunisasi. Perbedaan terbesar antar laki-laki dan perempuan terdapat pada pemberian jenis imunisasi Hepatitis B, yaitu perempuan lebih besar 4,22 persen.

Secara umum, baik balita laki-laki maupun perempuan, capaian imunisasi campak/morbili merupakan yang terendah, yaitu sebesar 78,03 persen. Namun, angka ini sudah mengalami kenaikan jika dibandingkan pada tahun 2021 sebesar 74,08 persen. Hal ini diduga karena imunisasi campak tidak sepopuler imunisasi lainnya. Selain itu, waktu pemberian imunisasi dengan jadwal yang berbeda dengan lainnya sehingga terkadang orang tua lalai dalam memberikan imunisasi ini pada balitanya. Padahal jenis imunisasi ini sangat penting untuk melindungi dari penyakit campak/morbili, tetapi tingkat keparahannya dapat diminimalisasi. Karena penyakit campak/morbili pada penderita belum pernah divaksinasi, dapat menyebabkan kematian.

Imunisasi merupakan salah satu investasi Kesehatan yang paling murah (*cost effective*) karena terbukti dapat mencegah dan mengurangi kejadian sakit, cacat, dan kematian. Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009 mengamanatkan pemerintah untuk memberikan imunisasi lengkap kepada setiap bayi dan anak. Berdasarkan hasil Susenas 2022, cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) pada bayi dapat dilihat pada Gambar 5.4. Data yang ditampilkan adalah data balita usia 1-4 tahun agar dapat dianalisis cakupan imunisasinya saat berusia 0-11 bulan.

Gambar 5.4  
Persentase Balita Usia 1-4 tahun yang Mendapat Imunisasi Lengkap di Kota Jakarta Barat dan Provinsi DKI Jakarta, 2022 (Persen)



Sumber: Susenas, 2022

Berdasarkan Gambar 5.4, sebanyak 68,05 persen anak usia 12-23 bulan sudah mendapat imunisasi dasar lengkap. Angka tersebut masih jauh di bawah target Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan yang ditetapkan sebesar 91 persen. Hal ini juga tergambar pada Provinsi DKI Jakarta, bahwa persentase balita yang mendapat imunisasi lengkap masih di bawah target Renstra Kementerian Kesehatan, yaitu hanya sebesar 62,3 persen. Angka ini justru masih berada di bawah persentase keseluruhan Kota Jakarta Barat.

### 5.3 Pemanfaatan Fasilitas Tenaga Kesehatan

Salah satu tolak ukur pembangunan kesehatan dari sisi *supply* adalah tersedianya fasilitas dan tenaga kesehatan secara merata. Namun demikian,

ukuran pembangunan tersebut menjadi kurang berarti apabila tidak dilengkapi dengan ukuran pembangunan dari sisi demand, yaitu perilaku aktif masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas dan tenaga kesehatan.

Perilaku aktif masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas dan tenaga kesehatan dapat dianalisis mulai dari proses persalinan. Pemilihan penolong persalinan merupakan upaya untuk mengurangi resiko kematian ibu dan bayi. Hal ini disebabkan karena kematian ibu terbesar adalah pada kondisi pra persalinan. Sedangkan penyebab kematian bayi tertinggi adalah saat neonatal. Oleh karena itu, kematian ibu dan bayi dapat dicegah dengan penolong persalinan yang kompeten dan fasilitas kesehatan yang memadai.

Penolong persalinan yang ideal adalah tenaga medis karena mereka telah menerapkan proses persalinan yang memenuhi standar kesehatan. Oleh sebab itu, pemerintah selalu berupaya untuk memperluas akses, sarana pelayanan serta tenaga kesehatan.

Pada Susenas 2022, dikumpulkan informasi mengenai perempuan usia 15-49 tahun yang melahirkan anak dalam dua tahun terakhir dan tempat persalinannya. Berdasarkan hasil pendataan Susenas, hampir semua perempuan berusia 15-49 tahun yang melahirkan anak dalam 2 tahun terakhir, memilih melahirkan di fasilitas kesehatan dengan persentase sebesar 94,21 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa penggunaan fasilitas kesehatan untuk persalinan anak sudah memadai di Kota Jakarta Barat.

Jika dilihat dari distribusi pengeluaran perkapita sebulan berdasarkan 40% bawah, 40% menengah, dan 20% atas, sudah mencapai 100 persen perempuan usia 15-49 tahun pada kelompok pengeluaran 20% ke atas melahirkan di fasilitas kesehatan. Sementara, jika dilihat dari tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan ART, masih ada 14,09 persen perempuan usia 15-49 tahun dengan tamatan SD ke bawah yang melahirkan tidak di fasilitas kesehatan.

Tabel 5.1  
 Persentase Pemberian Imunisasi Dasar pada Balita menurut Jenis Imunisasi dan Jenis Kelamin di Kota Jakarta Barat, 2022 (Persen)

Jenis Imunisasi	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Hepatitis B	91,79	96,01	93,82
BCG	93,85	94,28	94,06
Polio	89,6	91,31	90,42
DPT	88,81	92,13	90,4
Campak/Morbili	73,64	82,79	78,03

Sumber: Susenas, 2022

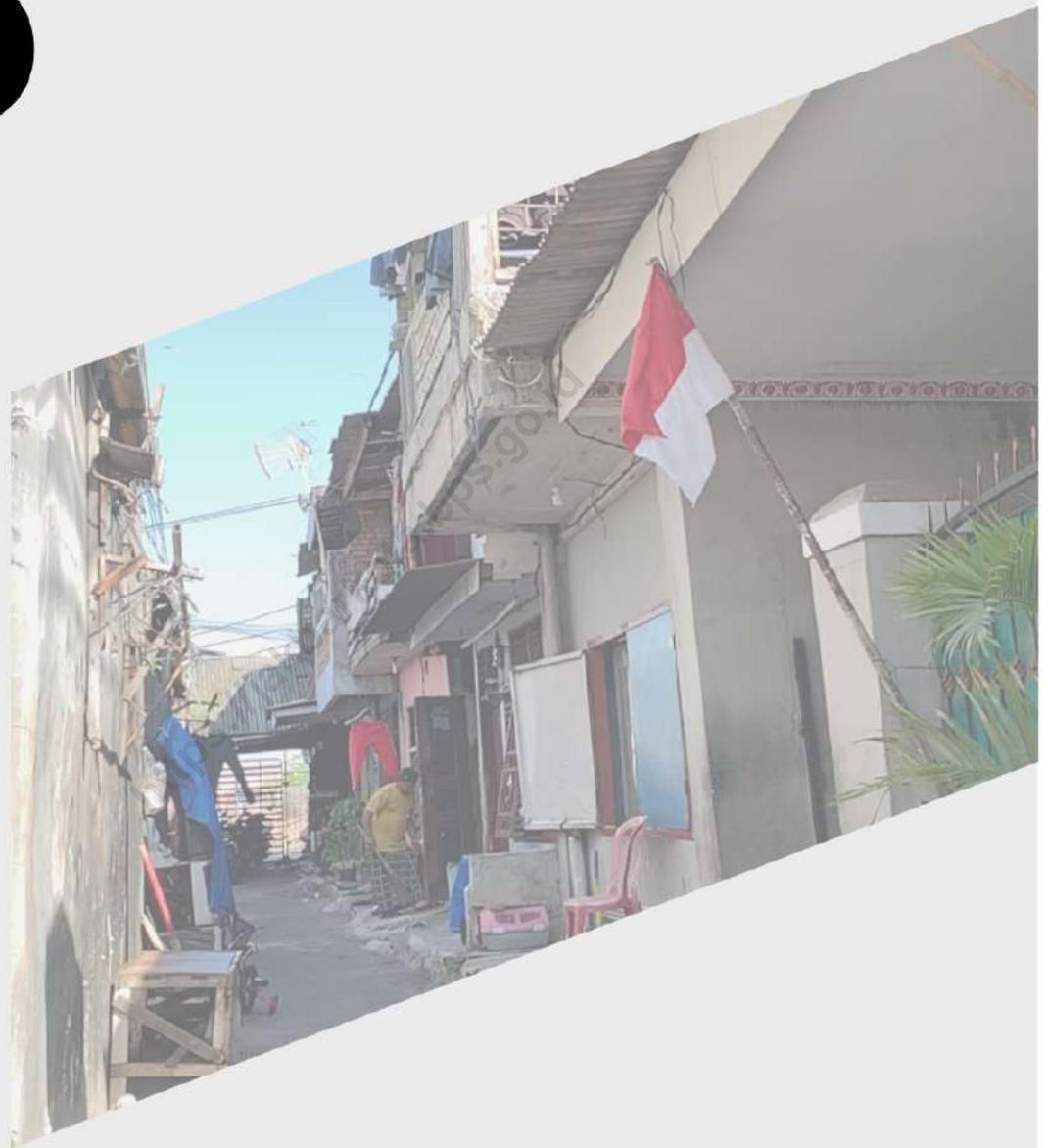
Tabel 5.2  
 Persentase Perempuan Usia 15-49 Tahun Menurut Tempat Melahirkan Anak yang Terakhir di Kota Jakarta Barat, 2022 (Persen)

	Distribusi pengeluaran perkapita sebulan			Tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan ART		Total
	40% bawah	40% menengah	20% atas	SD ke bawah	SMP ke atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Melahirkan di Fasilitas Kesehatan	89,99	99,22	100	85,91	94,95	94,21
Melahirkan Tidak di Fasilitas Kesehatan	10,01	0,78	0	14,09	5,05	5,79
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber: Susenas, 2022



# BAB



## Perumahan & Teknologi Informasi

---

# 6





## BAB VI

"Luas bangunan yang tidak sebanding dengan jumlah penghuninya

akan menyebabkan overcrowded yang berdampak kurang baik terhadap kesehatan penghuninya (kekurangan oksigen, mudah tertular penyakit, dsb.)"



# PERUMAHAN & TEKNOLOGI INFORMASI

**52,1%** rumah tangga di Kota Jakarta Barat menggunakan jenis atap **asbes**

**99,84%** rumah tangga di Kota Jakarta Barat telah mendapat akses **listrik PLN**





Rumah sebagai tempat tinggal digunakan untuk tempat berlindung dari panas dan hujan. Tempat tinggal dan lingkungan yang baik merupakan hak setiap warga negara yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Dalam perkembangannya tempat tinggal mengalami penambahan fungsi yang dapat menunjukkan tingkat sosial keluarga dalam masyarakat. Berbagai fasilitas di dalam rumah tinggal yang semakin lengkap menambah tingkat kesejahteraan penghuninya, seperti luas lantai yang dipergunakan, sumber dan penggunaan air, jenis penerangan rumah, serta penanganan tempat pembuangan air besar/kotoran.

### **6.1 Luas Lantai**

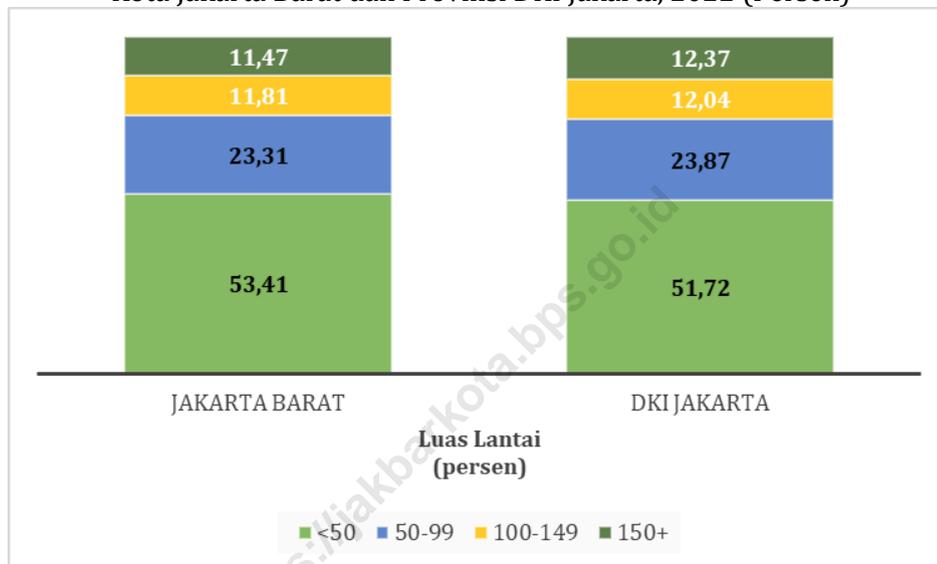
Luas lantai bangunan merupakan salah satu aspek yang membuat seseorang nyaman tinggal dalam suatu rumah. Luas rumah sehat harus cukup untuk penghuni di dalamnya, artinya luas lantai bangunan tersebut harus disesuaikan dengan jumlah penghuninya. Luas bangunan yang tidak sebanding dengan jumlah penghuninya akan menyebabkan *overcrowded*. Hal ini berdampak kurang baik terhadap kesehatan penghuninya, sebab disamping menyebabkan kurangnya konsumsi oksigen juga bila salah satu anggota keluarga terkena penyakit infeksi, akan mudah menular kepada anggota keluarga yang lain.

Semakin luas rumah yang dihuni (tercermin dari luas lantai), semakin luas ruang gerak penghuninya. Luas lantai yang dimaksud di sini adalah luas lantai yang ditempati dan digunakan untuk keperluan sehari-hari oleh anggota rumah tangga, termasuk di dalamnya teras, garasi, WC, dan gudang dalam satu bangunan. Tidak termasuk di dalamnya luas lantai bangunan untuk usaha, seperti untuk berdagang, buka salon atau lainnya.

Gambar 6.1 memperlihatkan bahwa pada tahun 2022 mayoritas rumah tangga yang ada di Kota Administrasi Jakarta Barat menempati luas lantai di

bawah 50 m<sup>2</sup> sebesar 53,41 persen. Persentase tertinggi berikutnya adalah luas lantai 50-99 m<sup>2</sup> yang dihuni oleh 23,31 persen rumah tangga Kota Jakarta Barat. Kelompok rumah tangga yang menempati bangunan dengan luas lantai lebih dari 150 m<sup>2</sup> sebanyak 11,47 persen adalah kelompok yang paling sedikit. Tingginya harga tanah dan mahalnya bahan bangunan konstruksi menyebabkan pilihan untuk tinggal di rumah yang luas semakin kecil.

Gambar 6.1  
 Persentase Rumah Tangga menurut Luas Lantai Bangunan  
 Kota Jakarta Barat dan Provinsi DKI Jakarta, 2022 (Persen)



Sumber: Susenas Maret, 2022

## 6.2 Jenis Atap Rumah

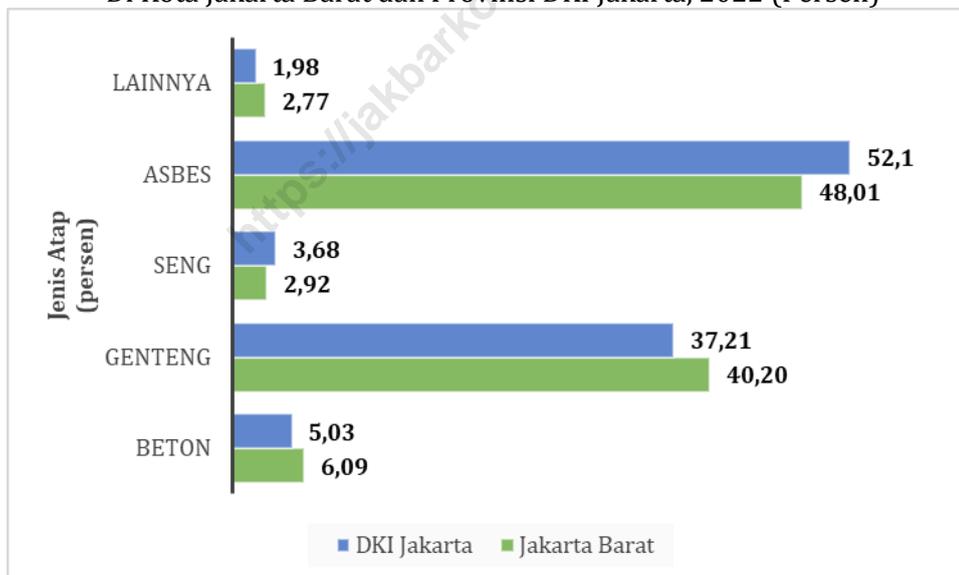
Atap merupakan salah satu bagian paling penting dalam sebuah konstruksi bangunan. Atap berfungsi untuk melindungi rumah dari panas dan hujan serta menghambat pergerakan angin yang membawa debu dan kotoran masuk ke dalam rumah. Pemilihan jenis atap rumah ditentukan oleh kemampuan ekonomi sebuah rumah tangga dan selera penghuni rumah tersebut.

Tahun 2022, Mayoritas jenis atap bangunan tempat tinggal penduduk Kota Jakarta Barat terbuat dari asbes. Kelebihan atap asbes jika dibandingkan dengan atap lainnya yaitu harga yang lebih murah, tidak membutuhkan kayu yang banyak untuk pemasangannya dan juga pemasangannya mudah,

sedangkan kekurangan jenis atap asbes menyebabkan suhu ruangan menjadi lebih panas, pemasangan harus lebih hati-hati karena mudah patah. Sementara kekurangan lainnya adalah pada efek kesehatan, yakni jika digunakan dalam jangka waktu lama, akan menimbulkan efek pada kesehatan, terutama untuk sistem pernafasan, karena bahan utamanya adalah karbon, serat asbes yang terhirup dan masuk ke paru-paru bisa menyebabkan asbestosis (timbulnya jaringan parut di paru-paru).

Penggunaan atap jenis asbes di tahun 2022 sebanyak 52,1 persen, lebih tinggi dibandingkan jenis genteng yang hanya 37,21 persen. Hal ini wajar karena asbes relatif lebih murah dibandingkan genteng karena kualitas genteng jauh lebih baik dibanding asbes. Gambar 6.2 menunjukkan secara lengkap persentase rumah tangga di Kota Jakarta Barat dan Provinsi DKI Jakarta menurut jenis atap terluas yang digunakan.

Gambar 6.2  
 Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Atap Bangunan  
 Di Kota Jakarta Barat dan Provinsi DKI Jakarta, 2022 (Persen)



Sumber: Susenas Maret, 2022

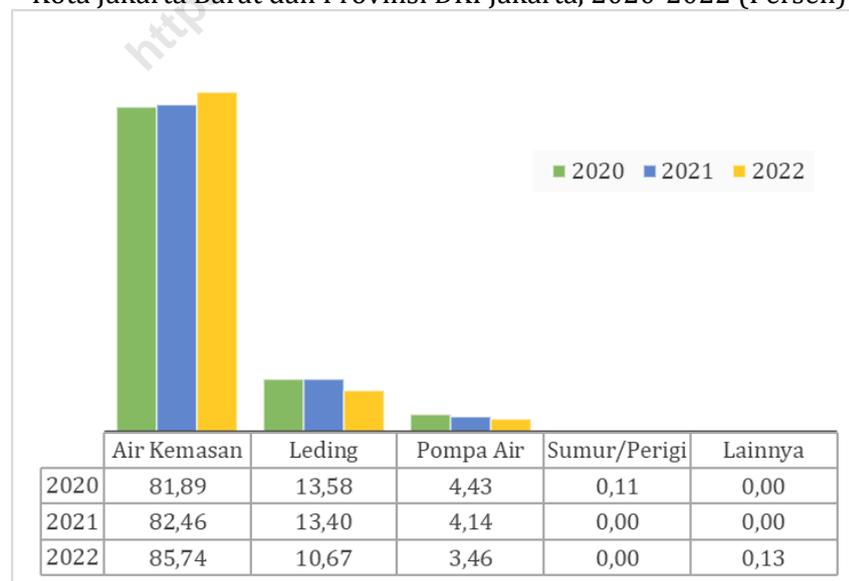
### 6.3 Fasilitas Rumah

Rumah yang sehat harus didukung oleh kelengkapan fasilitas yang memadai, yang pada akhirnya kelengkapan fasilitas tempat tinggal akan menentukan kualitas hidup penghuninya. Fasilitas yang paling mendasar agar sebuah rumah menjadi nyaman dan sehat untuk ditempati adalah tersedianya listrik, sumber air minum, bahan bakar untuk memasak, serta jamban dengan tangki septik di dalam rumah tersebut.

Ketersediaan listrik menjadi sangat penting selain pangan. Manfaat listrik untuk kehidupan sudah menjadi kebutuhan primer. Hampir seluruh aktivitas pemenuhan kebutuhan tidak terlepas dari peran listrik. Selain berfungsi sebagai penerangan, semua peralatan rumah tangga membutuhkan listrik seperti AC, lemari es, dan rice cooker.

Berdasarkan data Susenas 2022, sebanyak 99,84 persen rumah tangga di Kota Jakarta Barat telah mendapat akses listrik PLN, sementara sisanya sebesar 0,16 persen merupakan listrik non PLN.

Gambar 6.3  
Perkembangan Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Air Minum di Kota Jakarta Barat dan Provinsi DKI Jakarta, 2020-2022 (Persen)



Sumber: Susenas Maret, 2020-2022

Selama tiga tahun terakhir, sebagian besar rumah tangga menggunakan air kemasan sebagai sumber air minum di Kota Jakarta Barat. Pengguna air kemasan sebagai sumber air minum pun terus meningkat dari tahun ke tahun. Beragam pilihan, praktis, variasi harga dan manfaat menjadi salah satu sebab masyarakat lebih senang mengkonsumsi air kemasan. Di sisi lain, kenaikan yang signifikan ini dapat dipahami mengingat terjadinya krisis air bersih di Jakarta, sungai-sungai yang menjadi sumber air bersih sudah tercemar berbagai macam limbah, mulai dari buangan sampah organik rumah tangga hingga limbah beracun dari industri. Hal ini juga dapat menggambarkan seiring dengan penurunan persentase rumah tangga yang menggunakan leding dan pompa air sebagai sumber air minum di setiap tahunnya hingga tahun 2022.

Persentase pengguna sumber air minum utama terbanyak kedua di Kota Jakarta Barat, yaitu leding. Pada tahun 2022, sebanyak 10,67 persen rumah tangga di Kota Jakarta Barat menggunakan leding sebagai sumber air minum. Angka ini turun cukup jauh dari tahun 2021 yang mencapai 13,40 persen. Peringkat ketiga adalah pengguna pompa air yaitu sebesar 3,46 persen pada tahun 2022, turun sebesar 0,68 persen dibandingkan tahun 2021.

Air yang telah tercemar dapat menimbulkan berbagai penyakit pencernaan seperti kolera, tifus, disentri, cacingan, dan lain-lain dengan gejala diare. Keberadaan E. Coli di air dipengaruhi oleh banyak hal yakni konstruksi fisik sumur, baik dinding sumur, bibir sumur, lantai sumur, dan sarana pembuangan air limbah, serta jarak *septic tank* dengan sumur gali yang kurang dari 11 meter. Semakin dekat jarak maka semakin besar pula kemungkinan air sumur/pompa tersebut tercemar. Akibatnya derajat higienitas air yang diminum menjadi sangat rendah.

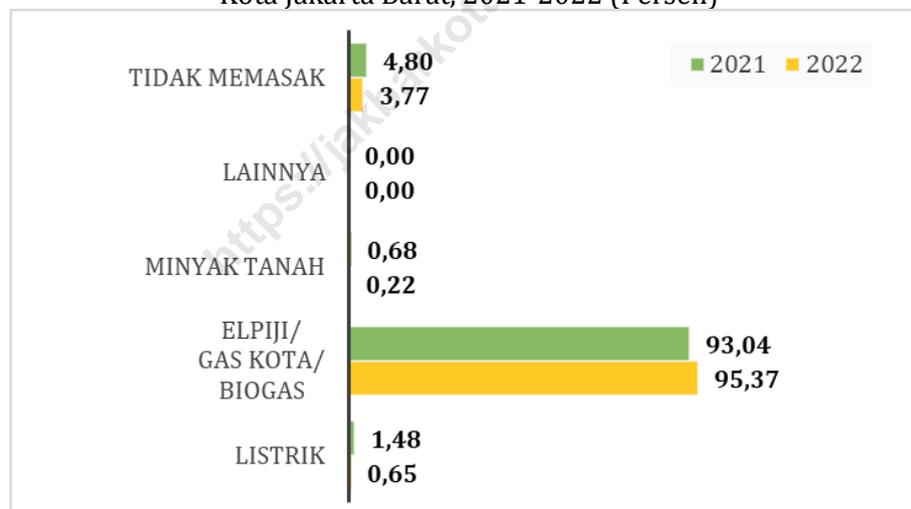
Kondisi jarak pompa/sumur ke penampungan kotoran di Kota Jakarta Barat, dapat dilihat pada Tabel 6.5. Data ini mencerminkan kualitas sanitasi dan kesehatan rumah tangga sekaligus lingkungan tempat tinggal masyarakat. Perkembangan data yang ada menunjukkan separuh populasi rumah tangga di DKI Jakarta memiliki jarak pompa/sumur ke tempat penampungan kotoran kurang dari 10 meter. Semakin padatnya penduduk mengakibatkan semakin rendahnya jarak sumur/pompa ke penampungan kotoran. Tentu saja hal ini

menyiratkan bahaya yang akan dihadapi masyarakat Jakarta dari sisi kesehatan.

Pada tahun 2022, persentase rumah tangga yang mempunyai jarak antara tempat penampungan kotoran dengan sumur yang kurang dari 10 meter adalah 15,43 persen, jarak 10 meter atau lebih sebesar 49,11 persen, dan yang tidak tahu berapa jaraknya sebesar 35,47 persen.

Sementara itu, sumber bahan bakar utama untuk memasak yang terbanyak digunakan oleh rumah tangga di Kota Jakarta Barat adalah Elpiji/Gas Kota/Biogas yaitu sebesar 95,37 persen, dan mengalami peningkatan di tahun 2022. Sementara itu, jenis bahan bakar lainnya seperti minyak tanah mengalami penurunan hingga 0,46 persen dari tahun 2021. Namun begitu, walaupun ketersediaan minyak tanah di Jakarta sudah semakin langka, masih ada 0,22 persen rumah tangga yang menggunakannya.

Gambar 6.4  
Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Bahan Bakar Utama untuk Memasak di Kota Jakarta Barat, 2021-2022 (Persen)



Sumber: Susenas Maret, 2021

Ketersediaan kakus/kloset dengan menggunakan tangki septik merupakan fasilitas rumah tangga yang cukup penting dan berkaitan dengan kesehatan. Salah satu cara pengelolaan terbaik tinja manusia adalah dengan menggunakan tangki septik (*septic tank*) dan resapannya. Pada Tabel 6.7 dapat terlihat pada tahun 2022, sebesar 97,22 persen rumah tangga di Kota Jakarta

Barat menggunakan kakus tangka septik, dan sebesar 2,78 persen dengan penampungan Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) untuk membuang air besar.

#### **6.4 Teknologi Komunikasi dan Informasi**

Teknologi informasi tidak hanya sebatas pada teknologi komputer, tetapi juga termasuk teknologi telekomunikasi. Dengan kata lain bahwa teknologi informasi merupakan konvergensi antara teknologi komputer dan teknologi telekomunikasi. Teknologi informasi dapat meningkatkan kinerja dan memungkinkan berbagai kegiatan untuk dilaksanakan dengan cepat, tepat, dan akurat, sehingga akhirnya akan meningkatkan produktivitas kerja.

Dengan kemajuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi sekarang ini, dunia tidak lagi mengenal batas, jarak, ruang, dan waktu. Orang dapat dengan mudah memperoleh berbagai macam informasi yang terdapat di belahan dunia tanpa harus datang ke tempat tersebut. Bahkan orang dapat berkomunikasi dengan siapa saja di berbagai belahan dunia, dengan memanfaatkan seperangkat komputer yang tersambung internet.

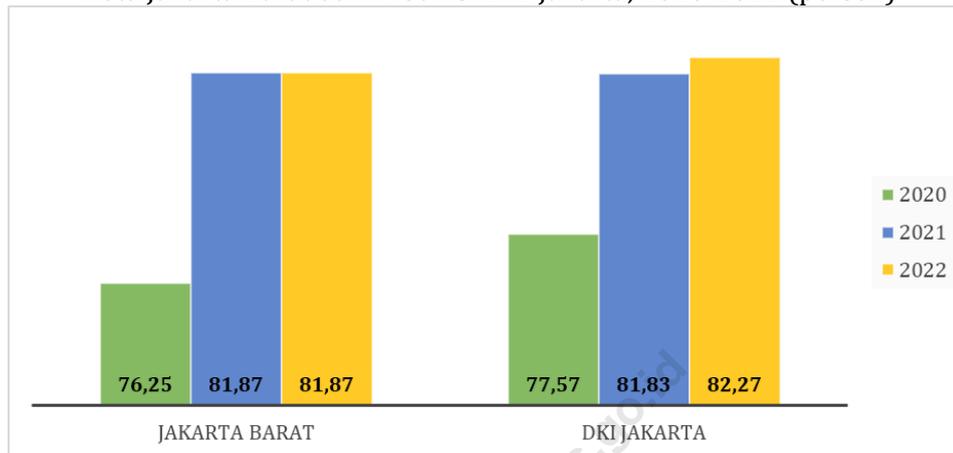
Salah satu kunci kemajuan suatu negara adalah informasi. Kemajuan bangsa dapat dilihat dari pandainya negara itu mengelola sumber informasi. Sumber informasi harus dapat dimanfaatkan dan diolah sehingga menjadi sesuatu yang bermanfaat. Beberapa peralatan yang bermanfaat sebagai teknologi informasi antara lain internet, komputer/lap top/notebook, dashbook, handphone (HP).

Dalam era globalisasi saat ini, telepon seluler atau HP merupakan salah satu alat komunikasi yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat modern, terutama di perkotaan. Alat komunikasi sudah menjadi kebutuhan utama masyarakat Kota Jakarta.

Mudahnya teknologi HP menjangkau semua lapisan masyarakat, berimbas pada menurunnya persentase rumah tangga yang memiliki telepon rumah. Pesatnya transformasi HP dari tahun ke tahun menggeser eksistensi telpon rumah. Pada tahun 2022, Persentase rumah tangga yang memiliki

telpon rumah di Kota Jakarta Barat adalah sebanyak 9,24 persen. Hal ini dikarenakan meningkatnya penggunaan HP dan semakin terjangkaunya harga dan tarif operator telekomunikasi.

Gambar 6.5  
Persentase Penduduk berumur 5 Tahun ke atas yang Memiliki Telepon Seluler di Kota Jakarta Barat dan Provinsi DKI Jakarta, 2020-2022 (persen)



Sumber: Susenas Maret, 2021

Kepemilikan telpon seluler (HP) pada penduduk berumur 5 tahun ke atas di Kota Jakarta Barat tahun 2022 sebesar 81,87 persen. Telepon seluler sudah menjadi kebutuhan primer bagi setiap orang di era globalisasi, tidak hanya bagi umur-umur produktif, namun telepon seluler sudah mampu dikuasai oleh kalangan umur-umur non produktif (balita dan lansia). Tidak heran jika di tahun yang akan mendatang, kembali terjadi peningkatan penggunaan telepon seluler.

Selain alat komunikasi berupa HP dan sejenisnya, penggunaan komputer sebagai alat komunikasi dan sumber informasi juga menjadi hal penting dalam kehidupan masyarakat perkotaan seperti Jakarta. Komputer atau *laptop* yang terkoneksi dengan internet memungkinkan dapat menghubungkan manusia di seluruh dunia dalam waktu yang singkat dan dengan biaya yang murah. Kesulitan dalam kaitannya dengan perolehan informasi secara cepat dan akurat telah dapat diatasi. Pada Tabel 6.8, pada tahun 2022 rumah tangga yang memiliki komputer/*laptop* di Kota Jakarta Barat tercatat sebesar 36,41 persen. Walaupun angka ini mengalami

penurunan dari tahun 2021, hal ini dapat diindikasikan bahwa sudah banyaknya media-media internet yang dapat diakses secara praktis melalui telepon seluler sehingga untuk mengakses banyak aplikasi tidak harus menggunakan komputer atau laptop.

Penggunaan akses internet di Kota Jakarta Barat juga menunjukkan bahwa penduduk Kota Jakarta Barat menggunakan fasilitas internet cukup intens, baik untuk kepentingan bekerja, rekreasi, sosial, pendidikan, maupun lainnya. Terlebih disaat pandemi akibat Covid-19 dimana bekerja, beribadah dan belajar banyak dikerjakan di rumah seperti sekarang, tentunya kedepannya penggunaan internet masih akan terus terjaga bahkan sangat mungkin terus meningkat. Selain itu banyaknya provider dengan tingkat harga yang bersaing memudahkan masyarakat Kota Jakarta Barat dalam mengakses informasi melalui internet.

Tabel 6.9 menunjukkan bahwa penggunaan internet oleh penduduk Kota Jakarta Barat pada tahun 2022 mencapai angka 83,52 persen. Persentase pengguna internet tahun 2022 ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2021, begitu pula dengan Provinsi DKI Jakarta. Peningkatan yang pesat di tahun 2021 dapat diindikasikan bahwa pengaruh pandemi Covid-19 sangat besar dan memaksa gaya hidup masyarakat untuk lebih menuju digital (pembayaran banyak dilakukan dengan *cashless*).

Tabel 6.1  
 Persentase Rumah Tangga menurut Luas Lantai Bangunan di  
 Kota Jakarta Barat dan Provinsi DKI Jakarta, 2020-2022 (Persen)

	Luas Lantai (m <sup>2</sup> )				Total
	<50	50-99	100-149	150+	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Jakarta Barat</b>					
2020	61,91	20,51	10,32	7,26	100
2021	57,47	25,65	8,38	8,5	100
2022	53,41	23,31	11,81	11,47	100
<b>DKI Jakarta</b>					
2020	59,64	21,19	11,86	7,32	100
2021	56,14	24,3	9,95	9,61	100
2022	51,72	23,87	12,04	12,37	100

Sumber: Susenas Maret, 2020-2022

Tabel 6.2  
 Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Atap Rumah Terluas di  
 Kota Jakarta Barat dan Provinsi DKI Jakarta, 2020-2022 (Persen)

	Jenis Atap					Total
	Beton	Genteng	Seng	Asbes	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>Jakarta Barat</b>						
2020	3,51	34,18	2,46	58,88	0,97	100
2021	3,42	37,89	-	57,33	1,35	100
2022	6,09	40,20	2,92	48,01	2,77	100
<b>DKI Jakarta</b>						
2020	3,11	34,25	3,43	58,09	1,13	100
2021	4,28	38,01	-	54,78	2,93	100
2022	5,03	37,21	3,68	52,1	1,98	100

Sumber: Susenas Maret, 2020-2022

Tabel 6.3  
 Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Penerangan Utama di  
 Kota Jakarta Barat dan Provinsi DKI Jakarta, 2022 (Persen)

Wilayah	Sumber Penerangan Utama			Total
	Listrik PLN	Listrik Non PLN	Bukan listrik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Jakarta Barat	99,84	0,16	0	100
DKI Jakarta	99,82	0,18	0	100

Sumber: Susenas Maret, 2022

Tabel 6.4  
 Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Air Minum di  
 Kota Jakarta Barat dan Provinsi DKI Jakarta, 2020-2022 (Persen)

	Sumber Air Minum					Total
	Air Kemasan	Leding	Pompa Air	Sumur/Perigi	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>Jakarta Barat</b>						
2020	81,89	13,58	4,43	0,11	-	100
2021	82,46	13,4	4,14	-	-	100
2022	85,74	10,67	3,46	-	0,13	100
<b>DKI Jakarta</b>						
2020	78,33	8,68	12,63	0,32	-	100
2021	79,78	8,11	11,98	0,13	-	100
2022	76,66	7,06	15,33	0,69	0,26	100

Sumber: Susenas Maret, 2020-2022

Tabel 6.5  
 Persentase Rumah Tangga menurut Jarak Sumber Air Mandi/Cuci yang  
 Menggunakan Pompa/Sumur ke Penampungan Kotoran di  
 Kota Jakarta Barat dan Provinsi DKI Jakarta, 2020-2022 (Persen)

	Jarak Pompa/Sumur ke Penampungan (m)			Total
	<10	>=10	Tidak Tahu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>Jakarta Barat</b>				
2020	53,87	37,88	8,25	100
2021	50,02	46,82	3,17	100
2022	15,43	49,11	35,47	100
<b>DKI Jakarta</b>				
2020	44,8	44,71	10,49	100
2021	36,73	12,17	49,27	100
2022	41,58	43,15	15,28	100

Sumber: Susenas Maret, 2020-2022

Tabel 6.6  
 Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Bahan Bakar/Energi untuk Memasak di  
 Kota Jakarta Barat dan Provinsi DKI Jakarta, 2020-2022 (Persen)

	Bahan Bakar/Energi untuk Memasak					Total
	Listrik	Elpiji/ Gas Kota/ Biogas	Minyak Tanah	Arang/ Kayu/ Lainnya	Tidak Pernah Memasak	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>Jakarta Barat</b>						
2020	0,32	89,05	0,61	0	10,02	100
2021	1,48	93,04	0,68	0	4,8	100
2022	0,65	95,37	0,22	0	3,77	100
<b>DKI Jakarta</b>						
2020	1,17	89,52	1,12	0,03	8,17	100
2021	1,28	92,15	0,85	0,01	5,71	100
2022	0,56	95,59	0,54	0,02	3,29	100

Sumber: Susenas Maret, 2020-2022

Tabel 6.7  
 Persentase Rumah Tangga menurut Pembuangan Akhir Kotoran/Tinja di  
 Kota Jakarta Barat dan Provinsi DKI Jakarta, 2020-2022 (Persen)

	Jenis Jamban/Kakus					Total
	Tangki Septik	IPAL	Kolam/ Sawah/ Sungai/ Danau/ Laut	Lubang Tanah	Pantai/ Tanah Lapang/ Kebun/ Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>Jakarta Barat</b>						
2020	98,19	-	1,81	0	0	100
2021	100	0	0	0	0	100
2022	97,22	2,78	0	0	0	100
<b>DKI Jakarta</b>						
2020	96,2	-	2,82	0,88	0,1	100
2021	97,93	0,02	1,57	0,46	0,02	100
2022	97,86	1,59	0,34	0,2	0,01	100

Sumber: Susenas Maret, 2020-2022

Tabel 6.8  
 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Telepon Rumah dan Komputer/Laptop di  
 Kota Jakarta Barat dan Provinsi DKI Jakarta, 2020-2022 (Persen)

	Memiliki Telepon Rumah	Memiliki Komputer/Laptop
(1)	(2)	(3)
<b>Jakarta Barat</b>		
2020	7,77	31,93
2021	0,02	41,73
2022	9,24	36,41
<b>DKI Jakarta</b>		
2020	7,75	34,19
2021	10,65	44,36
2022	8,22	36,83

Sumber: Susenas Maret, 2020-2022

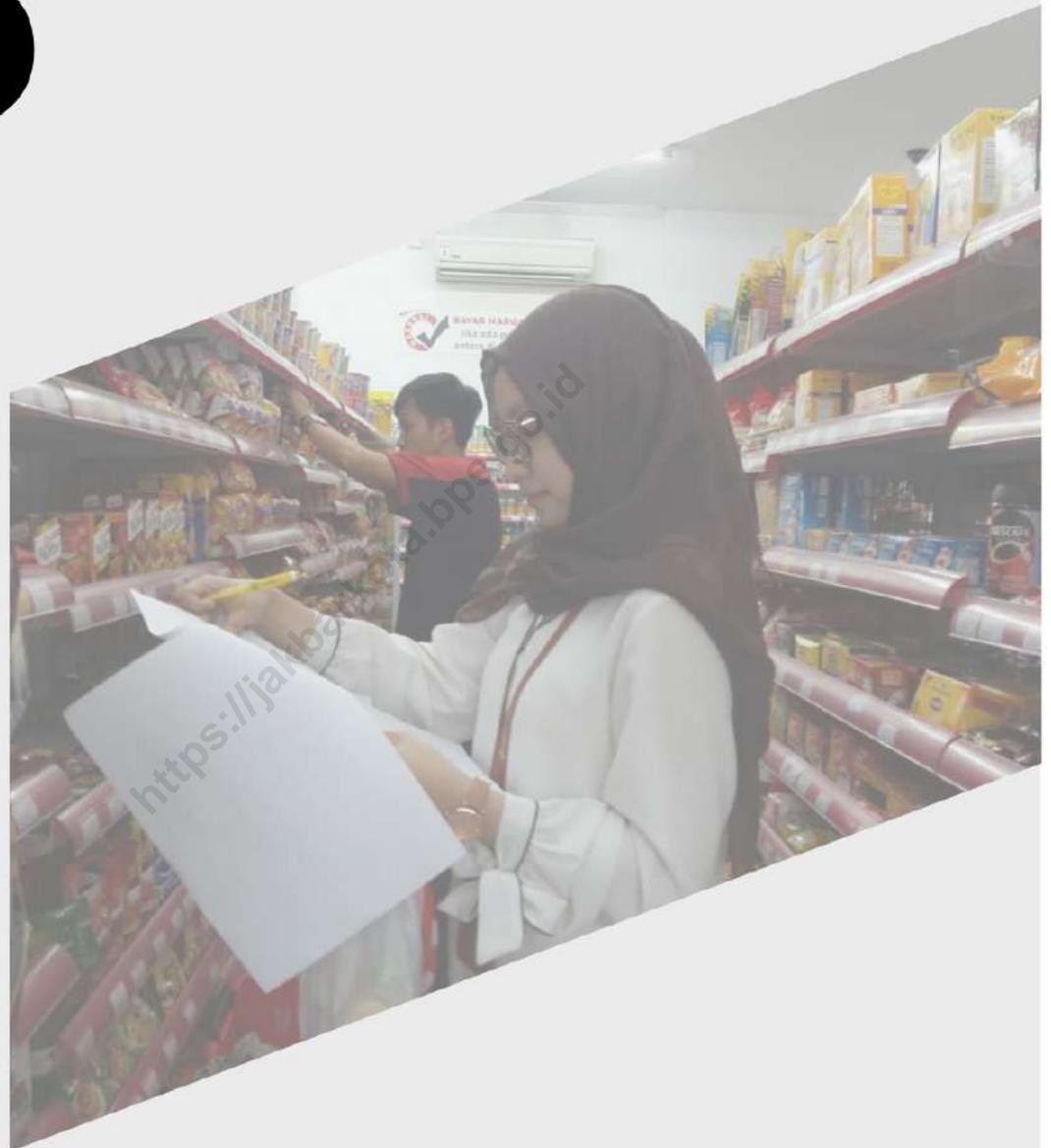
Tabel 6.9  
 Persentase Penduduk 5 Tahun ke Atas yang Pernah Mengakses Internet dalam 3  
 Bulan Terakhir di Kota Jakarta Barat dan Provinsi DKI Jakarta, 2020-2022 (Persen)

	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Jakarta Barat</b>			
2020	79,42	73,77	76,61
2021	88,65	81,3	84,98
2022	87,01	80	83,52
<b>DKI Jakarta</b>			
2020	80,03	75,2	77,62
2021	88,31	82,82	85,55
2022	87,1	82,18	84,65

Sumber: Susenas Maret, 2020-2022



# BAB



## Pendapatan & Pengeluaran

---

# 7





"Kelompok pengeluaran rendah masih memprioritaskan kebutuhan makanan, sedangkan untuk kelompok pengeluaran tertinggi, bagian untuk konsumsi makanan tidak terlalu besar."

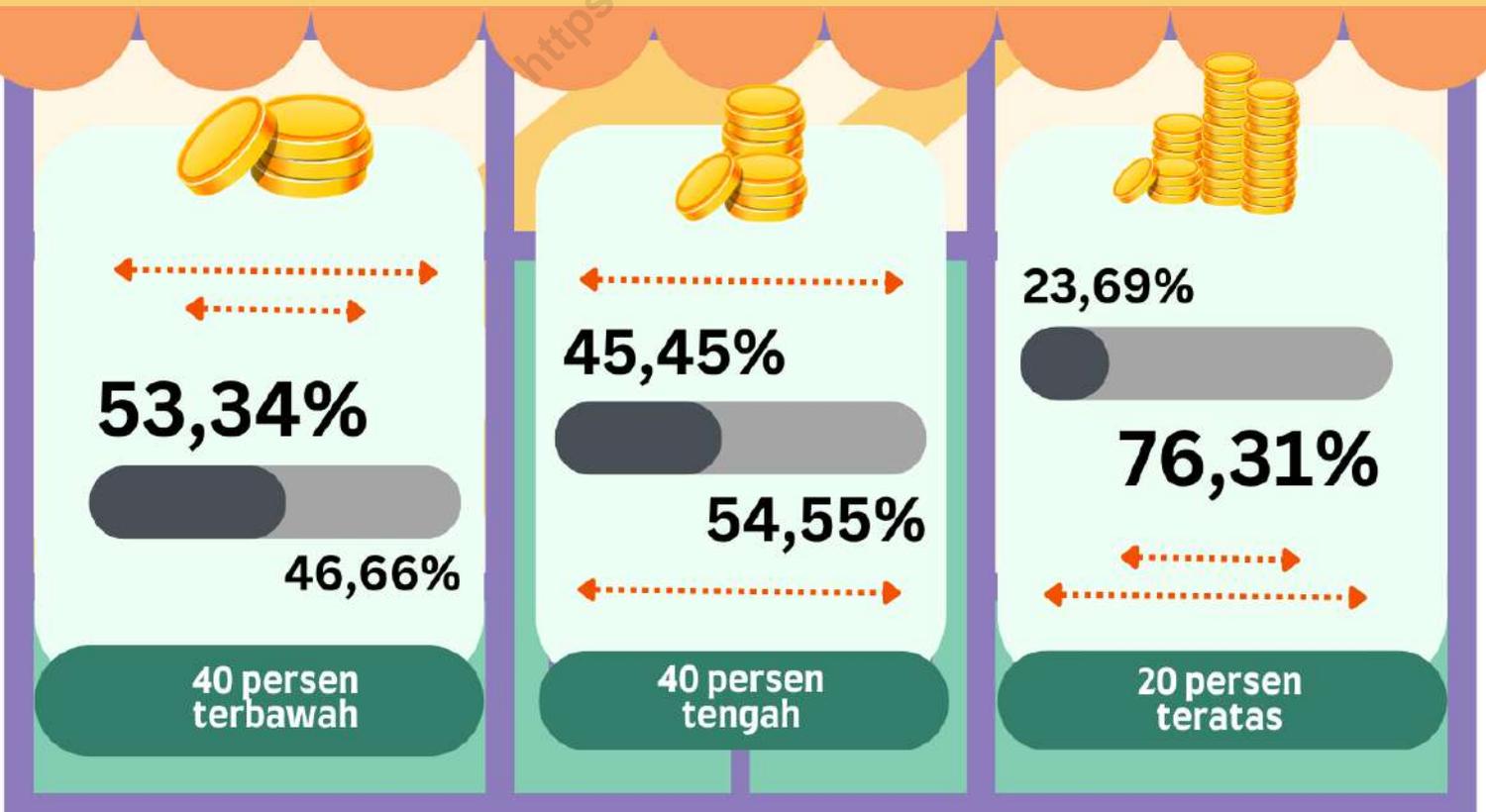
## BAB VII



## PENDAPATAN & PENGELUARAN

## RUMAH TANGGA

**Persentase Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan**  
untuk Konsumsi Makanan dan Bukan Makanan menurut Kelompok Pengeluaran  
(Kota Jakarta Barat, 2022)



 Makanan  
 Bukan Makanan

Sumber: Susenas, 2022



## BAB VII

### PENDAPATAN DAN PENGELUARAN RUMAH TANGGA

---



Aspek pendapatan, tingkat konsumsi rumah tangga dan pola konsumsi masyarakat merupakan aspek penting yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Besarnya tingkat pendapatan seseorang sangat menentukan besaran dan pola konsumsi rumah tangga.

Peningkatan pendapatan rumah tangga biasanya akan diikuti oleh pergeseran pola konsumsi rumah tangga dari konsumsi makanan ke konsumsi bukan makanan (*Engel's Law*). Di negara-negara maju, persentase pengeluaran penduduk untuk konsumsi makanan biasanya berada di bawah 50 persen. Sedangkan komposisi pengeluaran untuk makanan di negara-negara berkembang pada umumnya di atas 50 persen.

Kondisi masyarakat Jakarta sudah mengikuti pola pengeluaran di negara maju, dimana sebagian besar porsi pengeluarannya dibelanjakan untuk kebutuhan selain makanan. Hal ini mengindikasikan bahwa kesejahteraan masyarakat Jakarta lebih tinggi dari kesejahteraan rata-rata masyarakat Indonesia. Namun demikian, terlihat proporsi pengeluaran makanan dan non makanan berfluktuasi seiring dengan kondisi perekonomian di ibukota selama kurun waktu tersebut.

Peningkatan pendapatan saja tidak cukup untuk menggambarkan kondisi kesejahteraan masyarakat, karena ada hal lain yang lebih penting untuk diperhatikan, yakni pemerataan distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat. Jika pendapatan meningkat secara umum, namun hanya dinikmati oleh segolongan masyarakat, yang umumnya berada pada kelompok menengah ke atas, maka peningkatan ini menjadi tidak bermakna bagi masyarakat secara keseluruhan. Kelompok masyarakat yang berpendapatan rendah belum dapat menikmati hasil pembangunan sebagaimana mestinya. Namun demikian, harus disadari pula bahwa untuk mewujudkan distribusi pendapatan yang benar-benar merata antar kelompok masyarakat adalah hal yang sangat sulit dilakukan. Usaha yang mungkin diupayakan adalah memperkecil kesenjangan yang ada antar kelompok masyarakat tersebut.

Dalam upaya memperkecil jurang perbedaan pendapatan antar kelompok masyarakat tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai upaya, diantaranya dengan program pengentasan kemiskinan. Upaya tersebut dilakukan dengan cara memberikan berbagai program bantuan kepada masyarakat miskin. Dengan upaya ini diharapkan pendapatan masyarakat miskin dapat meningkat, dan jurang pendapatan antar kelompok masyarakat dapat diperkecil.

### **7.1. Distribusi Pendapatan, Gini Rasio dan Kriteria Bank Dunia**

Distribusi pendapatan menggambarkan merata atau tidaknya hasil pembangunan suatu daerah yang diterima oleh masing-masing orang/kelompok. Sulitnya memperoleh data pendapatan, menyebabkan pengukuran distribusi pendapatan didekati dengan data pengeluaran. Analisis distribusi pendapatan disini menggunakan data pengeluaran rumah tangga hasil susenas.

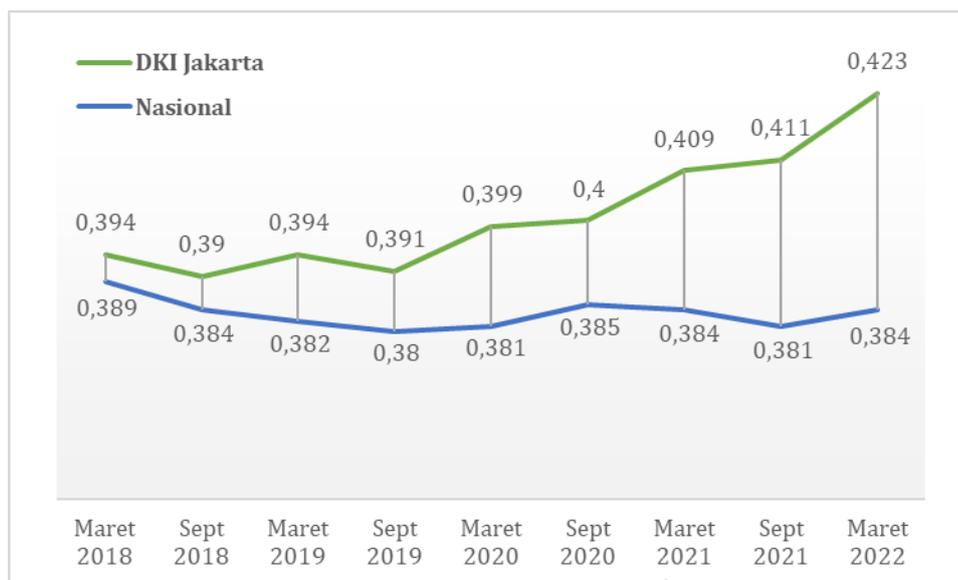
Untuk menilai ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat, salah satu alat yang umumnya digunakan sebagai indikator adalah Gini Rasio, serta pengelompokan menggunakan kriteria Bank Dunia. Gini Rasio merupakan ukuran distribusi pendapatan yang nilainya diantara 0 sampai dengan 1. Apabila nilai Gini Rasio mendekati 0, kesenjangan distribusi pendapatan dianggap rendah. Sebaliknya, apabila nilai Gini Rasio mendekati angka 1, maka kesenjangan distribusi pendapatan dianggap tinggi.

Untuk mengetahui ketimpangan distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat, Gini Rasio dibagi ke dalam tiga kategori:

- Gini Rasio  $> 0,50$ , menggambarkan distribusi pendapatan dengan tingkat ketimpangan **tinggi**.
- Gini Rasio  $0,4 - 0,5$ , menggambarkan distribusi pendapatan dengan tingkat ketimpangan **sedang**.
- Gini Rasio  $< 0,40$ , menggambarkan distribusi pendapatan dengan tingkat ketimpangan **rendah**.

Gambar 7.1

Gini Rasio di DKI Jakarta dan Nasional, 2018 – 2022



Sumber: Susenas 2018-2022

Gini ratio Provinsi DKI Jakarta pada periode tahun 2018 hingga 2022 berkisar antara 0,39 hingga 0,43 yang artinya ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi DKI Jakarta cenderung berada pada kategori sedang. Jika dibandingkan dengan Gini Ratio Nasional, pada periode tahun 2018 hingga 2022 berkisar di angka 0,38.

Gambar di atas menunjukkan Gini Rasio Provinsi DKI Jakarta selalu mengalami peningkatan dan jauh berada di atas Gini Ratio Nasional. Hal ini mengindikasikan bahwa distribusi pendapatan di Provinsi DKI Jakarta cenderung tidak merata dibandingkan distribusi pendapatan Nasional. Gini Ratio Provinsi DKI Jakarta juga secara keseluruhan terus mengalami peningkatan sampai Maret 2022 menyentuh angka 0,423.

Pada era digitalisasi yang semakin meningkat, ketimpangan dapat ditekan dengan berbagai cara, salah satunya dengan memaksimalkan ekonomi digital. Pemerataan distribusi pendapatan dapat ditunjang dengan infrastruktur digital yang juga harus merata, terutama Provinsi DKI Jakarta yang merupakan kota metropolitan dan seluruh aktivitas ekonomi seharusnya sudah dapat ditunjang dengan dunia digital.

Selain *Gini Ratio*, ukuran ketimpangan lain yang sering digunakan adalah persentase pendapatan pada kelompok penduduk 40 persen terbawah atau yang dikenal dengan ukuran ketimpangan Bank Dunia. Kategori ketimpangan Bank Dunia ditentukan dengan menggunakan tiga kriteria, yaitu:

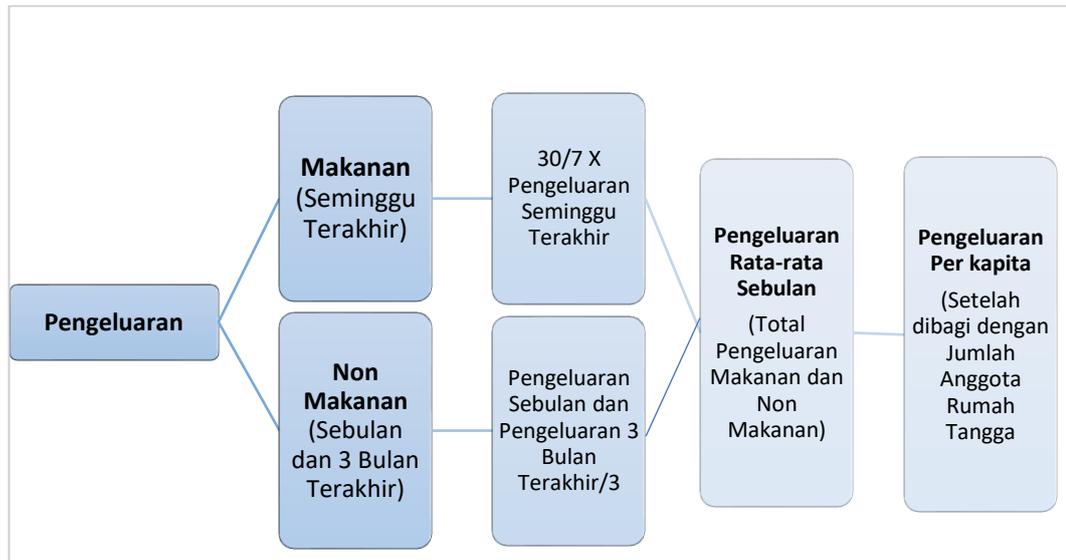
- a. Apabila proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk kurang dari 12 persen dikategorikan ketimpangan pendapatan tinggi.
- b. Jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk di antara 12 hingga 17 persen dikategorikan ketimpangan pendapatan sedang/menengah/moderat.
- c. Jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk lebih dari 17 persen dikategorikan ketimpangan pendapatan rendah.

## **7.2. Pengeluaran per Kapita menurut Jenis Pengeluaran**

Data pengeluaran rumah tangga yang telah dikumpulkan melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional, merupakan salah satu upaya untuk memperoleh gambaran keadaan kesejahteraan penduduk. Data ini diharapkan dapat memberikan gambaran pola pengeluaran konsumsi rumah tangga, baik untuk pengeluaran makanan maupun non makanan.

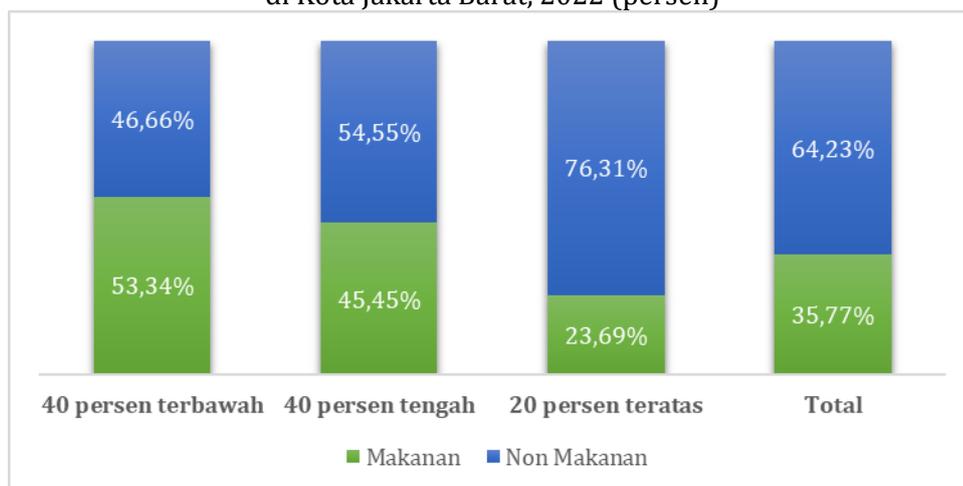
Data pengeluaran yang dikumpulkan adalah data pengeluaran seminggu atau sebulan yang lalu tergantung pada jenis pengeluarannya. Pengeluaran untuk makanan ditanyakan selama seminggu yang lalu, yang selanjutnya dihitung menjadi rata-rata pengeluaran untuk makanan selama sebulan. Sedangkan pengeluaran untuk non makanan meliputi pengeluaran sebulan yang lalu dan 3 bulan yang lalu, selanjutnya dihitung menjadi pengeluaran non makanan rata-rata selama sebulan.

Gambar 7.2  
Skema Pengeluaran Rumah Tangga



Pola pengeluaran rumah tangga dapat memberikan gambaran tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Semakin baik tingkat kesejahteraan masyarakat terlihat dari semakin banyaknya proporsi pendapatannya yang dibelanjakan untuk kebutuhan non makanan, begitu pula sebaliknya.

Gambar 7.3  
Persentase Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan untuk Konsumsi Makanan dan Bukan Makanan menurut Kelompok Pengeluaran di Kota Jakarta Barat, 2022 (persen)



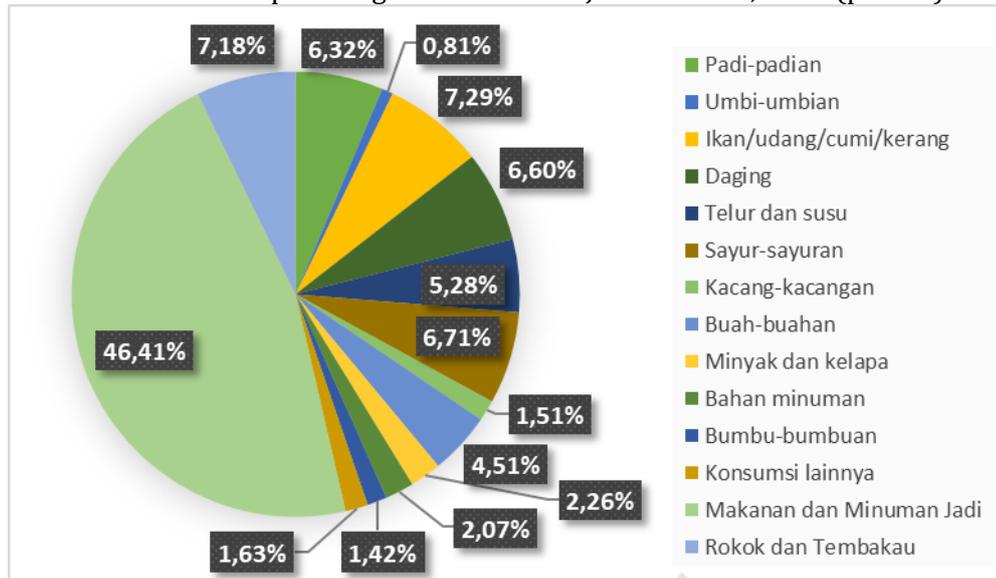
Sumber : Susenas Maret 2022

Secara rata-rata, konsumsi makanan masyarakat Jakarta Barat adalah sebesar Rp992.961,00. Sebanyak 35,77 persen pengeluaran ini digunakan untuk membeli makanan dan minuman jadi, rokok dan tembakau, ikan, padi-padian serta sayuran. Pangsa pengeluaran makanan merupakan salah satu indikator ketahanan pangan, makin besar pangsa pengeluaran makanan berarti ketahanan pangan semakin berkurang. Makin tinggi kesejahteraan masyarakat suatu wilayah, pangsa pengeluaran makanan penduduknya semakin kecil, demikian pula sebaliknya (BPS, 2020).

Bila dicermati lebih dalam pada Gambar 7.3, pola konsumsi akan berbeda menurut tingkat pendapatannya. Secara keseluruhan, pengeluaran penduduk Kota Jakarta Barat lebih banyak dialokasikan pada jenis pengeluaran non makanan. Penduduk dengan kelompok pengeluaran 40 persen terbawah, sebanyak 53,34 persen dari total pengeluaran dihabiskan untuk konsumsi makanan. Sementara pengeluaran untuk konsumsi makanan bagi penduduk dengan kelompok pengeluaran 40 persen tengah dan 20 persen teratas, tidak mencapai 50 persen dari total pengeluarannya.

Dari pengklasifikasian penduduk menurut kelompok pengeluaran ini dapat disimpulkan bahwa pada penduduk dengan kelompok pengeluaran rendah, prioritas mereka masih untuk memenuhi kebutuhan makanan. Sedangkan untuk penduduk yang berada pada kelompok pengeluaran tertinggi, pengeluaran yang digunakan untuk konsumsi makanan tidak terlalu besar. Hal ini semakin terlihat di tahun 2022 yang mana kembali terjadi penurunan proporsi pengeluaran non makanan pada kelompok pengeluaran tertinggi, yaitu mencapai 23,69 persen (pada tahun 2021 masih berada pada angka 39,5 persen). Peningkatan belanja non-makanan disebabkan oleh meningkatnya konsumsi perumahan dan fasilitasnya.

Gambar 7.4  
Distribusi Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan untuk Konsumsi Makanan Menurut Kelompok Pengeluaran di Kota Jakarta Barat, 2022 (persen)

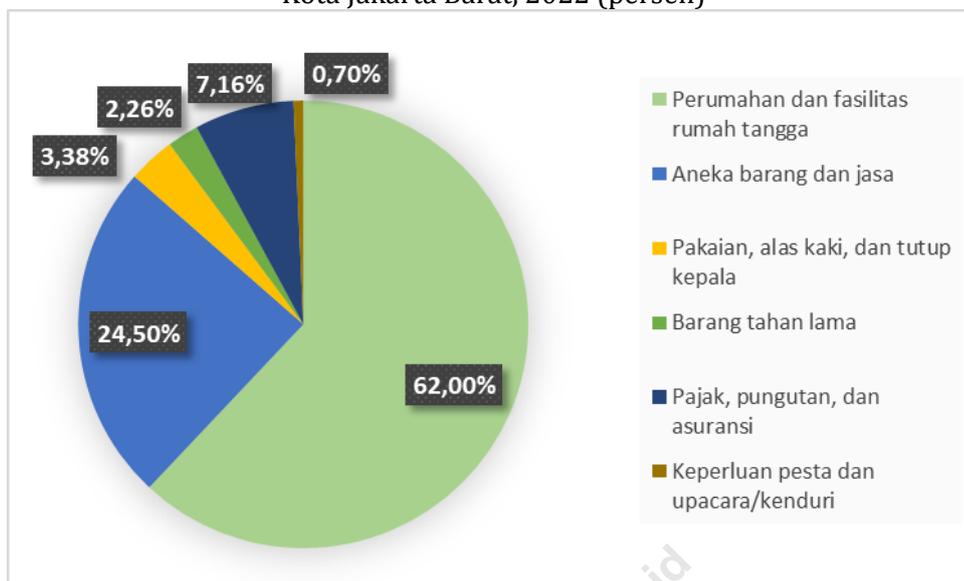


Sumber : Susenas Maret, 2022

Gambar 7.4 menunjukkan distribusi persentase pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk konsumsi makanan tahun 2022. Lima besar komoditi makanan masyarakat Jakarta adalah makanan minuman jadi sebesar 46,41 persen, diikuti ikan/udang/cumi/kerang 7,29 persen, rokok dan tembakau 7,18 persen, dan sayuran 6,71 persen serta daging 6,60 persen.

Dari struktur belanja makanan, dapat dilihat bahwa pembelian rokok dan tembakau menempati urutan ketiga setelah makanan dan minuman jadi dan ikan, bahkan lebih besar dibandingkan dengan belanja makanan pokok padi-padian. Kecenderungan konsumsi rokok yang tinggi di Kota Jakarta Barat ini telah berlangsung sejak tahun-tahun sebelumnya. Namun, jika dibandingkan dengan tahun 2021, pengeluaran untuk konsumsi rokok cukup mengalami penurunan yang besar (turun 1,99 persen). Penurunan ini diiringi dengan peningkatan distribusi konsumsi makanan untuk komoditi ikan/udang/cumi/kerang dan daging.

Gambar 7.5  
Distribusi Persentase Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan  
untuk Konsumsi Non Makanan Menurut Jenis Komoditas  
Kota Jakarta Barat, 2022 (persen)



Sumber : Susenas Maret, 2022

Pada Maret 2022, sebagian besar pengeluaran non makanan penduduk digunakan untuk konsumsi kebutuhan perumahan termasuk bahan bakar, penerangan, air dan pulsa. Pengeluaran penduduk untuk perumahan mencapai 62 persen dari total pengeluaran bukan makanan. Persentase tersebut terus meningkat disebabkan adanya kenaikan berbagai bahan baku konstruksi, termasuk kenaikan harga sewa/kontrak rumah, tarif dasar listrik dan tarif air leding (PAM). Pengeluaran untuk keperluan aneka barang dan jasa pada tahun 2022 sebesar 24,5 persen, yang mana merupakan pengeluaran terbesar kedua setelah pengeluaran untuk perumahan. Komposisi pengeluaran non makanan per kapita sebulan secara rinci dapat dilihat pada lampiran Tabel 7.3.

Tabel 7.1  
Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan untuk Konsumsi Makanan dan Bukan Makanan menurut Kelompok Pengeluaran di Kota Jakarta Barat, 2022 (Rp/Kapita/Bulan)

Jenis Pengeluaran	Kelompok Pengeluaran			Jakarta Barat
	40 persen terbawah	40 persen tengah	20 persen atas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Makanan	600.895	1.053.141	1.655.959	992.961
Non Makanan	525.616	1.263.966	5.334.489	1.783.337
Total	1.126.511	2.317.107	6.990.448	2.776.298

Sumber: Susenas Maret 2022

Tabel 7.2  
Distribusi Pendapatan dan Gini Rasio DKI Jakarta, Tahun 1990, 2000 - 2022

Tahun	Kelompok Penduduk			Gini Rasio
	40% yang berpendapatan Rendah	40% yang berpendapatan Sedang	20% yang berpendapatan Tinggi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1990*)	22,56	36,82	40,62	0,305
2000	20,17	35,60	44,23	0,351
2001	21,89	37,03	41,08	0,311
2002	19,37	32,63	48,00	0,389
2003	21,98	34,94	43,08	0,310
2004	20,18	34,81	45,81	0,363
2005	18,42	32,25	49,33	0,406
2006	20,11	30,89	49,00	0,360
2007	21,06	38,97	39,97	0,315
2008	19,87	35,48	44,65	0,361
2009	19,29	35,63	45,08	0,340
2010	18,25	34,08	47,66	0,381
2011	16,96	35,37	47,67	0,385
2012	15,67	33,94	50,39	0,397
2013	17,59	31,51	50,90	0,364
2014	17,42	32,98	49,61	0,447
2015	16,02	33,61	50,38	0,431
2016	16,03	36,28	47,69	0,411
2017	16,09	35,73	48,18	0,413

2018	17,16	36,03	46,81	0,394
2019	17,30	36,09	46,61	0,394
2020	17,25	35,11	47,25	0,399
2021	16,65	35,34	48,00	0,409
2022	16,60	33,22	50,18	0,423

Sumber: Susenas 2000 - 2022 BPS

*\*) Pengeluaran untuk konsumsi Penduduk Indonesia per Propinsi. 1990. BPS*

<https://jakbarkota.bps.go.id>

Tabel 7.3  
Rata-rata Pengeluaran Makanan per Kapita Sebulan  
menurut Jenis Pengeluaran Sebulan di Kota Jakarta Barat Tahun 2022

JENIS PENGELUARAN MAKANAN	RATA-RATA PENGELUARAN MAKANAN PER KAPITA PER BULAN	
	Rp	%
(1)	(2)	(3)
<b>PADI-PADIAN</b>	62.773	6,32%
<b>UMBI-UMBIAN</b>	8.024	0,81%
<b>IKAN</b>	72.364	7,29%
<b>DAGING</b>	65.559	6,60%
<b>TELUR DAN SUSU</b>	52.413	5,28%
<b>SAYUR-SAYURAN</b>	66.650	6,71%
<b>KACANG-KACANGAN</b>	14.949	1,51%
<b>BUAH-BUAHAN</b>	44.789	4,51%
<b>MINYAK DAN KELAPA</b>	22.486	2,26%
<b>BAHAN MINUMAN</b>	20.557	2,07%
<b>BUMBU-BUMBUAN</b>	14.149	1,42%
<b>BAHAN MAKANAN LAINNYA</b>	16.150	1,63%
<b>MAKANAN MINUMAN JADI</b>	460.805	46,41%
<b>ROKOK DAN TEMBAKAU</b>	71.293	7,18%
<b>TOTAL MAKANAN</b>	<b>992.961</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Susenas Maret 2021*

Tabel 7.4  
Rata-rata Pengeluaran Non Makanan per Kapita Sebulan  
menurut Jenis Pengeluaran Sebulan di Kota Jakarta Barat Tahun 2022

JENIS PENGELUARAN NON MAKANAN	RATA-RATA PENGELUARAN NON MAKANAN PER KAPITA PER BULAN	
	Rp	%
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>
<b>PERUMAHAN DAN FASILITAS RUMAH TANGGA</b>	1.105.674	62,00%
<b>ANEKA BARANG DAN JASA</b>	436.878	24,50%
<b>PAKAIAN, ALAS KAKI, DAN TUTUP KEPALA</b>	60.281	3,38%
<b>BARANG TAHAN LAMA</b>	40.314	2,26%
<b>PAJAK, PUNGUTAN DAN ASURANSI</b>	127.727	7,16%
<b>KEPERLUAN PESTA DAN UPACARA/KENDURI</b>	12.462	0,70%
<b>TOTAL BUKAN MAKANAN</b>	<b>1.783.336</b>	<b>100,%</b>

*Sumber : Susenas Maret 2022*

# BAB



**Kemiskinan**

---

**8**





## BAB VIII

# "Penduduk miskin adalah

penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan."



## KEMISKINAN & INDIKATOR LAINNYA

**4,22** persen 

**Garis Kemiskinan**  
Kota Jakarta Barat (Rupiah)

Jumlah penduduk miskin pada tahun 2022 adalah sebanyak **112.181** jiwa atau setara dengan 4,22 persen dari total penduduk Kota Jakarta Barat.

**2022** 599.514

**2021** 570.330

**2020** 557.803

**2019** 517.646

**2018** 490.331





Tujuan pembangunan nasional dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial. Dan salah satu dari indikator kesejahteraan umum dalam tujuan pembangunan nasional tersebut adalah dengan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dengan pembangunan nasional seharusnya seluruh rakyat Indonesia dapat hidup sejahtera, tidak ada perbedaan antar penduduk dan antar wilayah. Namun dalam kenyataannya masih dijumpai adanya perbedaan tingkat kesejahteraan baik antar penduduk maupun antar wilayah di Indonesia pada umumnya, atau di DKI Jakarta pada khususnya.

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat keterbandingan tingkat kesejahteraan antar wilayah adalah angka kemiskinan. Semakin tinggi angka kemiskinan suatu wilayah, semakin rendah tingkat kesejahteraan di wilayah tersebut. Selain kemiskinan, rasa aman pun dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan suatu wilayah. Rasa aman dibutuhkan oleh setiap masyarakat untuk dapat beraktifitas dalam kehidupan sehari-hari. Semakin aman suatu daerah, diasumsikan semakin sejahtera secara batiniah warganya.

#### 8.1 Kemiskinan

Ada banyak definisi kemiskinan yang dikemukakan oleh berbagai pihak seperti Bappenas. Bappenas mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan individu untuk memenuhi kebutuhannya, baik yang bersifat material maupun non material. Sedangkan Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep “*basic needs approach*” (pendekatan kebutuhan dasar), dan mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non makanan (diukur dari sisi pengeluaran).

Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di negara manapun. Sebagai permasalahan global, pengurangan penduduk miskin merupakan tujuan bersama negara-negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB). Dalam tujuan pembangunan berkelanjutan, seperti yang tertuang dalam Lampiran Perpres Nomor 59 Tahun 2018 yang menguraikan tujuan global Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN), disebutkan bahwa mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun, sebagai tujuan yang pertama.

Untuk mengukur tingkat kemiskinan, diperlukan suatu konsep kemiskinan yang jelas. Bank Dunia menyatakan bahwa kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk mendapatkan standar kehidupan minimum. Konsep yang dipakai BPS adalah kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Angka kemiskinan dihitung dengan menggunakan metode Garis Kemiskinan (GK). Komponen dari GK adalah Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). GKM setara dengan pemenuhan kebutuhan kalori 2100 Kkal per kapita per hari. GKNM setara dengan kebutuhan dasar bukan makanan seperti perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Dengan kata lain, GK adalah sejumlah uang untuk membeli makanan yang mengandung 2.100 Kkal per hari dan keperluan mendasar bukan makanan.

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan (GK). Selain Indonesia, pemakaian konsep 2.100 kilo kalori per hari ini juga digunakan oleh beberapa negara lain seperti Thailand, Vietnam, India, dan beberapa negara berkembang lainnya.

Sumber data yang digunakan dalam menghitung GK adalah Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) ditambah dengan Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar (SPKKD). Penghitungan yang didasarkan pada hasil survei

menyebabkan angka kemiskinan yang dihitung dengan GK hanya bersifat estimasi atau disebut sebagai data makro. Data kemiskinan makro tidak dapat memberikan informasi siapa dan dimana penduduk miskin itu berada. Data kemiskinan makro digunakan untuk pertama, mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, kedua membandingkan kemiskinan antar waktu, antar daerah, dan ketiga menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki status kemiskinan mereka. Data kemiskinan makro hanya memberikan informasi angka kemiskinan hingga level kabupaten/kota.

Jumlah penduduk miskin selain dipengaruhi oleh garis kemiskinan juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti laju pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Seperti kita ketahui bahwa sebagian dari mereka yang berada di seputaran garis kemiskinan pada umumnya bekerja di sektor informal. Mereka sangat rentan, dapat jatuh ke bawah garis kemiskinan atau naik melampaui garis kemiskinan sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian. Apabila pertumbuhan ekonomi membaik dan sesuai dengan yang diharapkan, maka proyek-proyek berjalan dengan lancar dan mereka dapat memperoleh pekerjaan dan pendapatan. Tetapi apabila ekonomi memburuk dan proyek-proyek tidak berjalan atau terlambat dijalankan maka sebagian dari mereka bisa menjadi tidak bekerja dan menjadi miskin. Inflasi sangat berpengaruh terhadap kenaikan dan penurunan jumlah penduduk miskin di suatu wilayah, termasuk di DKI Jakarta.

Gambar 8.1  
Tren Kemiskinan di Kota Jakarta Barat, 2018 – 2022

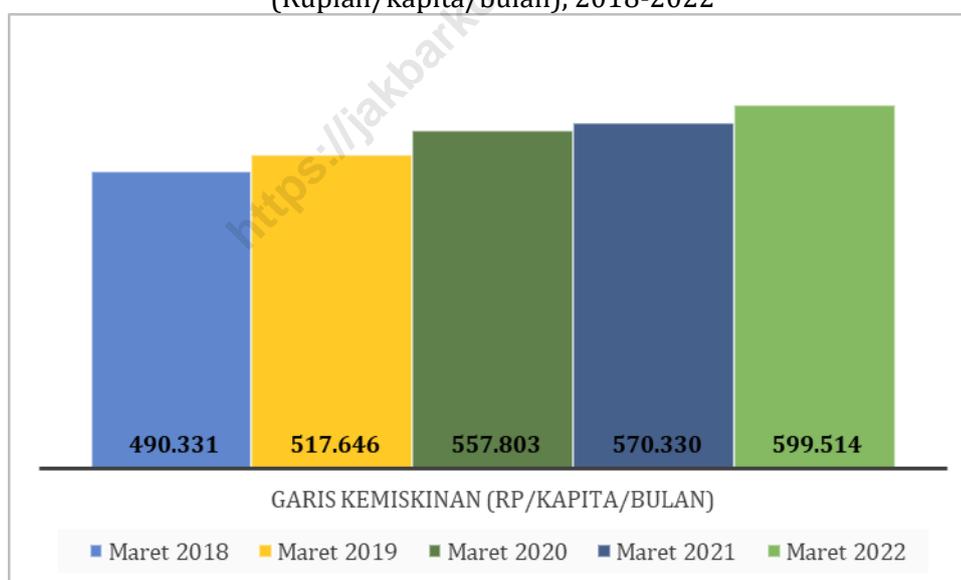


Sumber: Susenas Maret, 2018-2022

Secara umum, sejak Maret 2018 hingga sebelum pandemi, tingkat kemiskinan Jakarta sudah berada pada tren menurun. Kenaikan tingkat kemiskinan mulai terjadi pada periode Maret 2019 ke Maret 2020, dipicu oleh pandemi COVID-19. Persentase penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 4,25 persen, meningkat 1 persen dibanding Maret 2019 yang sebesar 3,25 persen.

Selanjutnya jumlah penduduk miskin pada tahun 2022 sebanyak 112.181 orang setara dengan 4,22 persen dari total penduduk Kota Jakarta Barat, menurun 1.189 orang dibanding Maret 2021 yang sebanyak 113.370 orang. Walaupun tidak terjadi penurunan yang signifikan, namun angka kemiskinan Kota Jakarta Barat dapat ditekan dan tidak kembali mengalami peningkatan, yaitu sebesar 4,22 persen.

Gambar 8.2  
Perkembangan Garis Kemiskinan di Kota Jakarta Barat  
(Rupiah/kapita/bulan), 2018-2022



Sumber: Susenas Maret 2018-2022

Sulitnya pemulihan daya beli penduduk akan menyebabkan kesulitan pula bagi penduduk miskin untuk dapat melewati garis kemiskinan. Garis Kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan non makanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan

miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.

Garis Kemiskinan pada Maret 2022 (Gambar 8.2) tercatat sebesar Rp599.514 per kapita per bulan. Garis Kemiskinan Maret 2021 ke Maret 2022 mengalami kenaikan sebesar 5,12 persen. Kenaikan Garis Kemiskinan Maret 2021 ke Maret 2022 terlihat cukup signifikan jika dibandingkan dengan Maret 2020 ke Maret 2021 yang hanya sebesar 2,24 persen. Hal ini dapat disebabkan oleh adanya perubahan harga, terutama untuk barang-barang yang dikonsumsi penduduk miskin.

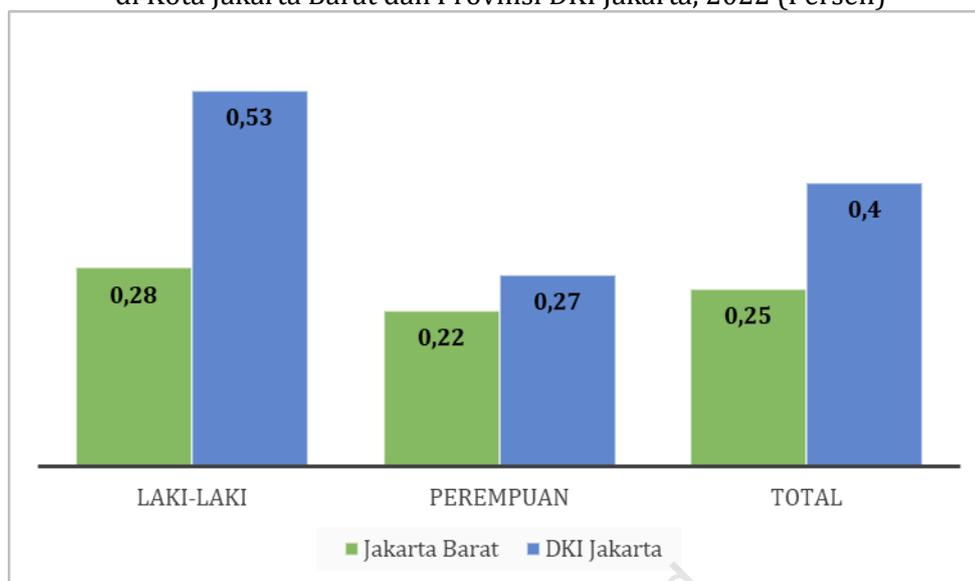
## **8.2 Kriminalitas**

Untuk dapat mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat dalam kehidupannya, diperlukan upaya agar hak-hak dasar manusia dapat terpenuhi. Selain terpenuhinya kebutuhan pangan, termasuk dalam hak dasar manusia adalah kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, dan lingkungan. Selain itu diperlukan juga rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, selain hak lain yang berupa partisipasi dalam kehidupan sosial dan politik.

Tindakan kriminal adalah segala sesuatu yang melanggar hukum atau sebuah tindak kejahatan dan pelanggaran yang dapat diancam dengan hukuman berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sedangkan tindak kejahatan adalah segala tindakan yang disengaja atau tidak, telah terjadi atau baru percobaan, yang dapat merugikan orang lain dalam hal badan, jiwa, harta benda, kehormatan, dan lainnya serta tindakan tersebut diancam hukuman penjara dan kurungan.

Gambar 8.3

Persentase Penduduk yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan di Kota Jakarta Barat dan Provinsi DKI Jakarta, 2022 (Persen)



Sumber: Susenas Maret 2022

Pada tahun 2022 persentase penduduk Kota Jakarta Barat yang pernah menjadi korban kejahatan sebanyak 0,25 persen dari total penduduk. Pemerintah Kota Jakarta Barat dan aparat berwenang mampu memberikan perlindungan terhadap warga Jakarta Barat, dimana sebanyak 99,75 persen penduduk Jakarta Barat tidak pernah menjadi korban kejahatan selama tahun 2022. Bila dilihat dari jenis kelamin, laki-laki lebih banyak menjadi korban kejahatan dibanding dengan perempuan. Dimana laki-laki yang menjadi korban kejahatan sebanyak 0,28 persen, lebih tinggi dibanding perempuan yang mencapai 0,22 persen. Hal yang sama juga terjadi di Provinsi DKI Jakarta jika dilihat berdasarkan jenis kelamin. Penduduk laki-laki lebih banyak pernah menjadi korban kejahatan selama tahun 2022 jika dibandingkan dengan perempuan.

# B BAB



**Penutup**

---

**9**





Keberhasilan pembangunan kesejahteraan rakyat suatu wilayah tentunya tidak hanya dicapai oleh satu atau dua tahun pembangunan, namun proses tersebut memerlukan rentang waktu yang lebih panjang dan berkesinambungan. Seperti yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya telah banyak kemajuan di bidang kependudukan, pendidikan, kesehatan, perumahan dan teknologi komunikasi serta bidang lainnya.

Pada tahun 2021, pandemi COVID-19 memang masih berdampak terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Datangnya pandemi sejak Maret tahun 2020, membuat pemerintah harus mencari jalan terbaik, menjaga kesehatan masyarakat dengan tetap berupaya menggerakkan roda perekonomian dan kehidupan sosial yang layak. Namun pada tahun 2022, jejak pandemi COVID-19 sudah perlahan menghilang dan Indonesia merupakan salah satu negara yang mampu bangkit dari keterpurukan pandemi.

BPS yang secara rutin melakukan berbagai kegiatan survei seperti SUSENAS Maret 2022 dan SAKERNAS Agustus 2022, masih menangkap dampak pandemi COVID-19 di Kota Jakarta Barat, khususnya Jakarta Barat, terhadap perkembangan berbagai indikator kesejahteraan masyarakat. Dalam BAB ini akan ditekankan kembali bagaimana ekonomi Kota Jakarta Barat mampu pulih di tahun 2022.

### **9.1 Kemiskinan dan Gini Ratio Maret 2022**

Secara umum, sejak Maret 2017 hingga sebelum pandemi (Susenas Maret 2019), tingkat kemiskinan Kota Jakarta Barat sudah berada pada tren menurun. Kenaikan tingkat kemiskinan mulai terjadi pada periode September 2019 ke Maret 2020, dipicu oleh pandemi COVID-19. Angka kemiskinan Kota Jakarta Barat ini konsisten berada pada angka 4 persen selama tiga tahun terakhir (tahun 2020-2022). Jumlah penduduk miskin di Kota Jakarta Barat pada Maret 2022 berkurang 1.190 jiwa menjadi 112,18 ribu jiwa atau 4,22

persen dari total penduduk Kota Jakarta Barat. Meskipun mengalami penurunan, namun persentase penduduk miskin masih belum kembali menyentuh angka 3 persen seperti sebelum pandemi COVID-19.

Sulitnya penduduk miskin meningkatkan pendapatan dan daya beli di tengah pandemi, menjadi ancaman lonjakan kemiskinan yang sebenarnya mungkin saja terjadi. Namun dengan segala upaya pemerintah dalam mengembalikan ekonomi pada tahun 2022 dengan berbagai fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK), penduduk Kota Jakarta Barat perlahan mengalokasikan pengeluaran mereka jauh lebih banyak pada komoditas non makanan pada tahun 2022. Proporsi pengeluaran non makanan untuk penduduk Kota Jakarta Barat pada tahun 2021 dan 2022 masing-masing mencapai 56,89 persen dan 64,23 persen.

Secara rata-rata, konsumsi makanan masyarakat Jakarta Barat adalah sebesar Rp992.961,00. Sebanyak 35,77 persen pengeluaran ini digunakan untuk membeli makanan dan minuman jadi, rokok dan tembakau, ikan, padi-padian serta sayuran. Pangsa pengeluaran makanan merupakan salah satu indikator ketahanan pangan, makin besar pangsa pengeluaran makanan berarti ketahanan pangan semakin berkurang. Makin tinggi kesejahteraan masyarakat suatu wilayah, pangsa pengeluaran makanan penduduknya semakin kecil, demikian pula sebaliknya (BPS, 2020).

## **9.2 Ketenagakerjaan Agustus 2022**

Data Sakernas Agustus 2022 menunjukkan bahwa penambahan tenaga kerja selama periode Agustus 2021-Agustus 2022 membuat tingkat kesempatan kerja (TKK) di Jakarta meningkat sebesar 1,94 persen. TKK pada Agustus 2022 sebesar 59,43 persen. Artinya, 59 hingga 60 dari 100 penduduk usia kerja di Kota Jakarta Barat berstatus sebagai pekerja.

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Agustus 2022 sebesar 7,10 persen turun 1,96 persen bila dibandingkan dengan Agustus 2021 seiring dengan adanya proses pemulihan ekonomi yang terus berjalan. Dengan demikian, TPT Kota Jakarta Barat mencerminkan perkembangan ekonomi yang sudah mampu menyerap tenaga kerja sejak Agustus 2020 yang mana

angka penganggurannya mencapai 12,27 persen. Penurunan lebih dari dua persen di setiap tahunnya ini menjadi kabar yang sangat baik bagi pemerintah Kota Jakarta Barat untuk terus berupaya mengeluarkan kebijakan ketenagakerjaan.

Secara umum dapat dikatakan kondisi ketenagakerjaan di Agustus 2022 membaik dibandingkan dengan Agustus 2021. Hal ini dilihat dari naiknya TKK dan turunnya TPT.

<https://jakbarkota.bps.go.id>



# DATA

## MENCERDASKAN BANGSA



*BADAN PUSAT STATISTIK*

*KOTA ADM. JAKARTA BARAT*

Jl. Raya Kebayoran Lama No. 5A Sukabumi Selatan

Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11550 Telp/Fax : (021) 25673776

Email: [bps3174@bps.go.id](mailto:bps3174@bps.go.id) Website: [jakbarkota.bps.go.id](http://jakbarkota.bps.go.id)